

# Haji SAMANHUDI

OLEH: MULJONG DAN SUTRISNO KUTOYO



Direktorat  
Kebudayaan

8

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1983 / 1984

# *Haji SAMANHUDI*

**Oleh :  
MULJONO dan  
SUTRISNO KUTOYO**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1979/1980**

**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

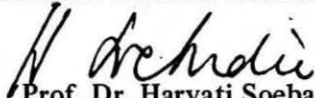
Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Maret 1980  
Direktur Jenderal Kebudayaan

  
Prof. Dr. Haryati Soebadio  
NIP. 130119123

## KATA PENGANTAR

*Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri atau pun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.*

*Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.*

*Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri-tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minat akan sejarah bangsa dan tanah air.*

*Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta bermanfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.*

*Jakarta; Maret 1980*

**PROYEK INVENTARISASI DAN  
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL**



## PENDAHULUAN

Pengalaman adalah guru yang baik, sebab dengan belajar dari pengalaman kita dapat memperoleh pengetahuan tentang yang benar dan yang salah, yang tepat dan yang tidak tepat, yang menguntungkan dan yang merugikan, dan sebagainya.

Pada hakekatnya sejarah adalah pengalaman umat manusia, bangsa atau masyarakat yang diperoleh berkat kegiatannya mempertahankan dan menyempurnakan hidup atau berkat kegiatannya memberi jawaban terhadap tantangan yang dihadapi. Dengan demikian belajar dari sejarah berarti belajar dari pengalaman manusia, bangsa atau masyarakat tertentu yang pasti mendatangkan manfaat bagi yang bersangkutan. Dalam kaitan ini kita belajar sejarah agar kita menjadi bijaksana sebelum suatu kejadian yang tidak kita harapkan menimpa kita.

Selanjutnya secara populer dapatlah kita katakan bahwa biografi adalah sejarah seorang tokoh tertentu atau sejarah seseorang. Penulisan biografi berarti penulisan sejarah atau pengalaman seseorang. Buku biografi berarti buku yang memuat uraian tentang sejarah atau pengalaman seseorang. Dalam buku ini biasanya terdapat uraian tentang pengalaman seseorang sejak lahir sampai meninggalnya.

Dengan pengertian sedemikian itu dapatlah kita menyatakan bahwa setiap orang boleh ditulis biografinya. Tetapi biasanya, yang ditulis orang adalah biografi orang-orang yang berjasa besar bagi umat manusia, bangsa atau masyarakat. Dengan perkataan lain, yang ditulis orang biasanya adalah biografi orang-orang besar yang sangat berjasa, sangat pandai, terpelajar, gagah berani, rajin sekali, berperikemanusiaan, jujur dan sebagainya.

Kalau kita ingin mempunyai pengetahuan yang baik tentang

sejarah, sangatlah baik jika kita suka membaca biografi, sebab jalan sejarah sangat dipengaruhi oleh tingkah laku orang-orang besar. *"The history of the world is but the biography of great men"*, yang berarti "Sejarah dunia hanyalah biografi orang-orang besar", begitulah kata Thomas Carlyle. Meskipun mungkin kita tidak sepenuhnya menyetujui pendapat Thomas Carlyle itu, sulitlah bagi kita untuk membantah bahwa saham orang-orang besar seperti Napoleon Bonaparte, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Meiji Tenno, Sun Yat Sen dan sebagainya kepada perkembangan sejarah memang besar.

Adapun karangan ini dimaksudkan sebagai karangan yang membicarakan biografi H. Samanhudi. Bahwa tokoh ini termasuk tokoh besar yang berjasa kepada tanah air dan bangsa Indonesia, sedikit pun kita tidak meragukan. Sebab dialah yang mendirikan Sarekat Islam, dan dia pulalah yang memimpin organisasi pergerakan itu sekurang-kurangnya sampai tahun 1916. Sarekat Islam tersebut, yang semula kecil, berkat jasanya dengan cepat tumbuh menjadi perkumpulan raksasa yang meliputi seluruh Hindia Belanda. Sarekat Islam yang didirikan dan dipimpin H. Samanhudi itulah yang mengajak seluruh bangsa bumiputera di seluruh Hindia Belanda untuk bersatu padu dan berjuang bersama-sama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia serta bahagia secara lahir batin.

Selanjutnya Sarekat Islam itu pulalah yang telah membobolkan bendungan-bendungan penghambat yang dibangun oleh pemerintah Belanda, sehingga terjadilah banjir dahsyat, yaitu banjir kegiatan pergerakan rakyat Hindia Belanda yang dengan semangat berkobar-kobar tak kunjung padam menuntut hak-haknya sebagai manusia yang terhormat dan bebas dari penjajahan atau perbudakan bangsa asing. Juga Sarekat Islam itulah yang telah menyebabkan rakyat Hindia Belanda yang tadinya putus asa, tidak mempunyai harapan apa-apa, menjadi rakyat yang menghadapi hari depannya dengan hati gembira, karena yakin bahwa hari depannya adalah gilang-gemilang asal ia mau berjuang untuk mencapainya.

Tetapi menulis biografi yang memadai tentang H. Samanhudi bukanlah pekerjaan yang mudah; sebab, *pertama*, tokoh ini hampir boleh dikatakan tidak meninggalkan tulisan yang dapat dipakai sebagai bahan penulisan; *kedua*, ketika ia masih hidup atau masih dapat diwawancarai tidak ada penulis yang berusaha untuk memulai menulis biografinya dalam ukuran yang agak memadai sehingga dapat dipakai sebagai bahan pembantu; dan *ketiga*, orang-orang yang benar-benar mengenal pribadinya pada waktu sekarang boleh dikatakan sudah tidak ada lagi.

Meskipun demikian, penulis karangan ini berusaha sekuat tenaga untuk dapat mempersembahkan suatu lukisan seluas mungkin dan seobyektif mungkin, yang kiranya dapat membantu para pembaca untuk mengetahui bagaimana kebesaran H. Samanhudi. Dalam kaitan ini penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ngadiman Reksowiyono (91 tahun), seorang tokoh pergerakan yang dulu bergaul selama dua tahun (1912–1914) dengan almarhum H. Samanhudi.
2. Bapak Reso Ramli (80 tahun), seorang tokoh pergerakan Sarekat Islam, teman dekat dan pengikut setia almarhum O.S. Tjokroaminoto yang juga pernah mengenal almarhum H. Samanhudi.
3. Bapak Sahlan Sastroaminoto (70 tahun) putera kelima almarhum H. Samanhudi.
4. Ibu Ny. Sadat Atmosukanto (70 tahun), isteri putera almarhum H. Samanhudi yang ketiga.
5. Bapak Martidjo (70 tahun), teman dekat putera pertama dan ketiga almarhum H. Samanhudi, dan yang mengenal almarhum H. Samanhudi dalam tahun 1940–1956.
6. Bapak Ahmad Musanni (70 tahun), penduduk di Laweyan Solo, yang mengenal almarhum H. Samanhudi sejak tahun 1932.
7. Ibu Atmohartono (73 tahun), puteri kedua almarhum H. Samanhudi.

Sebab, berkat informasi dari para informan tersebut, penulis dapat memperoleh bahan, yang meskipun tidak banyak, cukup berharga, yang bertalian dengan kehidupan pribadi H. Samanhudi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, yang disertai tujuan agar penulisan karangan ini mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Akhirul kalam, karena penulis menyadari bahwa karangan ini masih penuh dengan kekurangan, terutama kekurangan dalam data yang bertalian dengan pribadi tokoh yang seharusnya menjadi pusat penuturan, tegur sapa serta bantuan para pembaca sangat diharapkan, agar di kemudian hari karangan ini dapat lebih disempurnakan.

Para penulis,



## BAB I

### KEADAAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA HIDUP H. SAMANHUDI

Ketika H. Samanhudi mendirikan Sarekat Islam di Surakarta, masyarakat Indonesia adalah masyarakat jajahan yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah ini tidak bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi hanya sebagai badan penyelenggara yang bekerja di bawah dan atas tanggung jawab pemerintah Nederland. Dalam kaitan ini pemerintah Nederland mempunyai kementerian sendiri yang diberi nama *Ministerie van Kolonien* dan berkedudukan di Den Haag.

Di tanah air kita ini hanya diadakan wali negara atau *landvoogd*, yang dengan bantuan para anggota *Raad van Nederlands Indie*, menyerahkan segala tugas kewajibannya kepada *Departement van Algemeen Bestuur*. Di daerah-daerah terdapat *gouverneur* yang mengepalai *provincie*, *resident* yang mengepalai *residentie*, dan *assistent resident*, yang mengepalai *afdeeling*. Semua kepala daerah tersebut adalah orang Belanda.

Di daerah-daerah yang lebih rendah tingkatnya dari pada yang sudah disebutkan itu, terdapat pejabat-pejabat bumiputera yang tidak mempunyai kebebasan. Bupati yang mengepalai daerah kabupaten selalu berada di bawah pengawasan dan selalu menerima perintah dari pejabat Belanda yang bergelar *controleur*, yaitu pengawas atau pengontrol.

Orang bumiputera tidak akan dapat menjadi *controleur*. Sebagai contoh, R.M.A. Kusumojudo yang sudah tamat dari Fakultas Indologi Universitas Leiden, tidak diperbolehkan seperti teman-temannya yang berkebangsaan Belanda belajar menjadi *Controleur BB*, sebab ia adalah seorang *Inlander*.

Pada masa itu sebenarnya hampir semua pekerjaan dikerjakan oleh para pegawai bumiputera, tetapi jiwa kebangsaan belum dapat



memasuki pemerintahan. Hal itu disebabkan oleh adanya sistem dan organisasi pemerintahan yang bersifat kolonial.

Dalam sistem itu, di satu pihak bupati sangat dimanjakan, dijadikan raja kecil, dan ia diberi hak mewariskan jabatannya sebagai bupati kepada anaknya. Tetapi di pihak lain, bupati itu dijadikan alat untuk mempertahankan kedudukan Belanda, artinya ia harus menekan dan menindas rakyat. Sementara itu, pihak pemerintah kolonial mempunyai bermacam-macam alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Alat-alat itu di antaranya adalah tentaranya, yaitu *Koninklijk Leger* (KL) serta *Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger* (KNIL) dan Polisi, baik yang tidak rahasia maupun yang rahasia. Polisi yang rahasia ini disebut polisi PID (*Politiek Inlichtingen Dienst*). Semua alat kekuasaan tersebut bertugas menjaga keamanan. Biasanya mereka bertindak keras, malah sering melampaui batas pri-kemanusiaan, misalnya menangkap, membelenggu, membuang, menembak dan sebagainya.<sup>1)</sup>

Dengan demikian, mudahlah kita fahami, bahwa pada masa itu rakyat sama sekali tidak sejahtera, tetapi menderita lahir batin. Mereka kekurangan sandang, pangan, kesehatan dan lain-lain, sedang jiwa mereka sangat tertekan, sehingga harga diri dan kepercayaan kepada diri sendiri tidak ada pada mereka. Puncak penderitaan dialami oleh rakyat pada masa sistem tanam paksa.

Dalam rangka usaha kita memahami faktor-faktor yang mendorong H. Samanhudi bergerak dengan perkumpulannya, baiklah kita menyegarkan ingatan kita kepada sistem tanam paksa tersebut.

Dalam teorinya peraturan yang ditetapkan oleh sistem paksa itu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, para petani harus menanam seperlima dari tanah mereka masing-masing dengan tanaman yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: teh, kopi, nila, atau tebu. Empat perlima dari tanah mereka tanami sesuai hati sesuai dengan selera atau kepentingan mereka masing-masing. Hasil tanaman teh, kopi, tebu dan sebagainya itu, oleh para petani harus diserahkan kepada

pemerintah, tetapi sebagai imbalan atas jasa mereka ini mereka mendapat pembebasan dari sewa tanah yang seharusnya mereka bayar. Tanah yang disediakan oleh para petani untuk tanaman menurut sistem tanam paksa tidak usah merupakan bagian milik mereka yang paling baik, tetapi cukuplah jika hal itu bukan bagian yang paling jelek.

*Kedua*, waktu dan tenaga yang dipakai oleh para petani untuk menggarap tanah dan memelihara tanaman dalam rangka pelaksanaan sistem tanam paksa itu tidak boleh lebih banyak dari pada waktu dan tenaga yang mereka pakai untuk menggarap tanah bagi keperluan mereka sendiri.

*Ketiga*, hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah, jika lebih banyak nilainya dari pada pajak tanah yang harus mereka bayar, kelebihan itu diganti dengan uang.

*Keempat*, jika tanaman dalam rangka pelaksanaan sistem tanam paksa itu rusak, misalnya karena penyakit, banjir, atau tidak ada hujan, pendek kata bukan karena kesalahan atau kelalai-an para petani, kerugiannya ditanggung pemerintah.

*Kelima*, para petani yang tidak mempunyai tanah harus bekerja untuk pemerintah secara cuma-cuma selama enam puluh enam hari setiap tahun.<sup>2)</sup>

Tetapi, dalam prakteknya sistem tanam paksa itu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, para petani diharuskan menanam dua perlima, setengah atau lebih dari tanah milik mereka masing-masing dengan tanaman yang sesuai dengan ketentuan sistem tanam paksa. Malahan di sana sini ada pejabat yang mengharuskan para petani menanam seluruh tanah mereka masing-masing. Di samping itu, ada pula pejabat yang mengharuskan para petani menanam bagian tanah mereka yang paling subur dengan tanaman untuk keperluan pemerintah itu, sehingga mereka sendiri hanya memperoleh bagian tanah yang jelek untuk ditanami dengan padi, palawija atau tanaman lain yang sesuai dengan kepentingan atau selera masing-masing.

*Kedua*, waktu dan tenaga yang dipakai oleh para petani untuk menggunakan tanah dan memelihara tanaman dalam rangka pelaksanaan sistem tanam paksa lebih banyak dari pada waktu dan tenaga yang mereka pakai untuk bekerja bagi keperluan sendiri. Hal itu berakibat pekerjaan mereka sendiri terbengkalai dan produksi pangan di desa-desa merosot sekali.

*Ketiga*, para petani harus menyerahkan hasil tanaman mereka yaitu tebu, nila, teh atau kopi kepada pemerintah, padahal tempat penampungan hasil-hasil itu sangat jauh dari tempat para petani sendiri dan biaya pengangkutan harus mereka tanggung sendiri. Sesudah apa yang diserahkan oleh para petani itu sampai di tempat penampungan, dan sesudah ditimbang, meskipun ternyata lebih dari pada yang seharusnya mereka serahkan, kelebihanannya tidak diganti dengan uang menurut bunyi peraturan yang ada, tetapi diambil oleh para petugas untuk keuntungan para petugas itu sendiri. Hal itu berarti bahwa para petani telah dipaksa untuk mengorbankan waktu, tenaga dan uang mereka. Lebih celaka lagi, karena para petani itu biasanya harus pula membayar pajak tanah.

*Keempat*, panen yang gagal bukan karena kesalahan petani, dibebankan kepada para petani bersangkutan. Mereka harus membayar ganti rugi kepada pemerintah. Jika tidak mampu, ditahan atau dihukum.

*Kelima*, mereka yang tidak mempunyai tanah harus bekerja selama lebih dari enam puluh hari secara cuma-cuma bagi pemerintah, pembayaran pajak dengan kerja seperti itu sering berlangsung sampai berbulan-bulan.<sup>3)</sup>

Mudah dibayangkan betapa besar hasil yang dicapai oleh pemerintah Belanda dari pelaksanaan sistem tanam paksa itu. Dari tahun 1841 sampai tahun 1861 pemerintah Belanda memperoleh keuntungan sebesar 461 juta *gulden*, sehingga macam-macam kesulitan dalam bidang keuangan yang dialami pemerintah tersebut dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Kecuali yang sudah disebutkan itu, sistem tanam paksa juga mendatangkan hasil-hasil positif yang lain bagi negara Belanda.



Misalnya, perdagangan dan perkapalan Belanda menjadi lebih maju, kota Amsterdam menjadi pusat pemasaran hasil-hasil tropis dunia, dan industri tenun dapat dibangun. Berkat kerja sama yang dilakukan oleh para pengusaha tenun Belanda dengan *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) ekspor tenun Belanda meningkat. Pada tahun 1940 impor Hindia Belanda mencapai nilai 8,8 juta, yang berarti sepuluh kali lebih tinggi dari pada nilai impor tahun 1823.<sup>4)</sup>

Pada masa pelaksanaan sistem tanam paksa berbagai tanaman untuk pasar diusahakan penanamannya. Pada tahun 1833 areal tanah yang dipergunakan untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut:

Gula	:	22.722 ton.
Nila	:	22.141 ton.
Teh	:	324 ton.
Tembakau	:	286 ton.
Kayu manis	:	30 ton.
Kapas	:	5 ton.

Di samping itu diusahakan pula penanaman tanaman-tanaman yang kurang penting, misalnya lada, nopal dan pohon-pohon murbei. Pada tahun 1933 dipergunakan 56.000 bau sawah rakyat dalam rangka sistem tanam paksa; pada tahun 1861 dipergunakan 53.000 bau, di antaranya terdapat 39.000 bau untuk tanaman tebu.<sup>5)</sup>

Jelaslah bahwa sistem tanam paksa itu, di satu pihak sangat menguntungkan negeri Belanda, tetapi di pihak lain sangat merugikan rakyat Hindia Belanda. Agar penderitaan rakyat itu dengan mudah dapat kita fahami baiklah kita mengingat kenyataan kejadian berikut:

1. Ada pejabat yang mengeluarkan perintah agar rakyat di Kedu di sekitar Magelang menanam tanah mereka masing-masing-masing dengan tanaman kopi.

Ternyata, tanaman itu tidak dapat tumbuh dengan subur, dan hasilnya pun tidak baik. Sesudah sadar bahwa di situ

memang tidak mungkin dapat dihasilkan kopi seperti yang diharapkan, karena daerah tersebut bukan daerah pegunungan, maka pembesar yang sudah mengeluarkan perintah itu segera mengeluarkan perintah yang baru, yaitu agar pohon-pohon kopi tersebut ditebangi. Penebangan pohon kopi yang sudah besar ini ternyata menimbulkan kesusahan yang besar bagi para petani, sebab akar pohon-pohon ini sudah menjalar di dalam tanah.

2. Para petani yang diharuskan menanam tebu, diharuskan pula mengangkut tebu itu ke pabrik yang jauh letaknya dari rumah para petani. Pengangkutan itu dilakukan dengan gerobak milik mereka sendiri, pinjaman atau sewaan, atas biaya mereka sendiri, dan jika ada risikonya maka risiko itu harus ditanggung oleh mereka sendiri. Kemudian, sesudah tebu itu sampai di pabrik, dan sesudah ditimbang, meskipun seharusnya mereka mendapat pembayaran dengan uang atas kelebihan setoran mereka, maka uang itu diganti dengan beras yang diberi harga dua kali lebih tinggi dari pada harga di pasar. Pada masa itu harga beras sepikul 2 *gulden*, tetapi beras yang berasal dari pabrik itu berharga 4 *gulden* sepikul.<sup>6)</sup>

Dalam teorinya, sistem tanam paksa itu hanya berlangsung sampai 1870, tetapi dalam prakteknya sesudah tahun tersebut masih ada praktek tanam paksa. Pada tahun 1891, menurut R.M.A.A. Koesoema Oetojo, di Bandar Sedayu masih ada praktek tanam paksa. Di daerah ini rakyat masih diwajibkan menanam kopi dan hasilnya dijual kepada pemerintah dengan harga murah. Penanaman itu selalu diawasi oleh pegawai pemerintah.

Beberapa tahun kemudian, yaitu ketika R.M.A.A. Koesoema Oetojo menjadi asisten wedana di Buwaran, dekat kota Pekalongan, pembuatan jalan di sini juga masih dilaksanakan dengan kerja paksa. Pada masa itu, di kabupaten Pekalongan semua jalan harus dipelisir dengan batu besar, dan hal itu juga dilaksanakan dengan kerja paksa. Kerja paksa itu oleh orang-orang desa men-



dapat reaksi dengan ucapan mereka, "*Otot didu karo cocot*". Artinya, "kekuatan tubuh rakyat harus selalu siap untuk menjalankan perintah para priyayi."

Tentang akibat psikis yang ditimbulkan oleh sistem tanam paksa, DMG Koch mengatakan bahwa, meskipun sistem tersebut sudah dihapuskan, rakyat masih tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri, tidak mempunyai rasa berbangsa dan bertanah air, tidak mempunyai minat belajar, bersifat sabar dan suka tunduk. Mereka sadar bahwa mereka berada dalam cengkraman, tetapi mereka tidak mempunyai kemauan untuk melepaskan diri dari cengkraman tersebut, sebab pada mereka tidak ada keyakinan, bahwa cengkraman itu dapat dipatahkan.

Menurut DMG Koch, pada masa itu di atas lapisan rakyat terdapat lapisan pegawai kolonial yang selalu bekerja sama antara yang satu dengan yang lain dalam kegiatan menindas rakyat. Terhadap penindasan yang dilakukan para pegawai kolonial itu rakyat menaruh kebencian yang mendalam, tetapi penggalangan persatuan untuk melawan penindasan tersebut belum terpikirkan oleh mereka.<sup>7)</sup>

Demikianlah keadaan masyarakat Hindia Belanda sebagai akibat sistem tanam paksa serta ekornya. Sekarang baiklah kita ikuti pula lukisan yang lain.

Reso Ramli (80 tahun, seorang perintis kemerdekaan yang dulu berjuang dalam wadah Sarekat Islam di Surabaya dan Yogyakarta, memberi keterangan, bahwa dulu, yaitu ketika Sarekat Islam yang dipimpin H. Samanhudi belum didirikan, bangsa kita, yang pada masa itu disebut *Inlanders* atau pribumi, mempunyai kedudukan yang rendah sekali. Demikian rendahnya kedudukan bangsa kita pada masa itu, sehingga seolah-olah tidak mempunyai harga sedikit pun juga. Semua bangsa merendahkan, menghina dan meremehkan bangsa kita seenaknya sendiri saja. Tetapi di antara sekian banyak bangsa, yang terutama bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa kita adalah bangsa Belanda dan bangsa Cina. Pernah terjadi di Surabaya, seorang kusir dokar (delman) dipukuli

orang-orang Cina sebabnya ialah orang-orang Cina tadi tidak mau membayar ongkos naik delman, ketika kusir bumiputera menagih ongkosnya, malahan dianiaya. Hal itu disebabkan pada zaman kolonial kedua bangsa itu ditinggikan kedudukannya oleh pemerintah Belanda. Mereka malahan bermaksud pergi begitu saja tanpa menghiraukan betapa pedih hati kusir dokar tersebut. Apalagi ketika si kusir dokar yang malang itu memberanikan diri menuntut bayaran, orang-orang Cina itu menjadi sangat marah dan menyiksanya sampai setengah mati.

Pada waktu yang lain, di Surabaya pula, pernah terjadi perbuatan yang tidak mengenal kesopanan dan pri-kemanusiaan yang dilakukan oleh gerombolan pemuda Belanda terhadap seorang wanita bumiputera yang sedang berjalan di jalan bersama dengan suaminya. Ketika sang suami bermaksud mencegah perbuatan para pemuda Belanda yang berandalan itu, suami itu malahan dianiaya pula oleh para pemuda tersebut sampai pingsan.<sup>8)</sup>

Ngadimin Reksowijono (91 tahun), yang juga seorang perintis kemerdekaan dan pernah aktif dalam Sarekat Islam antara tahun 1912–1914, menyatakan pula, bahwa pada masa itu kedudukan bangsa Indonesia masih sangat rendah. Dituturkan oleh tokoh tersebut, bahwa dulu, di Solo, jika seorang Cina naik andong bersama dengan orang bumiputera, biasanya ia menuntut agar orang bumiputera itu duduk di bagian depan, artinya ia memandang martabat orang bumiputera tersebut lebih rendah dari pada martabatnya sendiri. Apalagi jika orang Cina itu naik andong bersama dengan pelayannya, maka ia menuntut, agar si pelayan duduk di bawah berarti bahwa ia memandang martabat si pelayan jauh lebih rendah dari pada martabatnya sendiri.

Menurut Ngadimin, pada masa itu juga terdapat diskriminasi di dalam kereta api yang dapat dilihat dari adanya dua macam karcis: ada karcis yang berwarna putih bagi mereka yang mempunyai banyak uang, yang biasanya terdiri dari orang Eropa dan orang Cina, dan ada pula karcis yang berwarna hijau bagi mereka yang termasuk golongan miskin, yang biasanya terdiri dari orang bumiputera. Malahan pada kereta api NIS diskriminasi itu dinyatakan

kan dalam karcis yang berwarna hijau dengan tulisan *Voor Inlanders*, yang berarti untuk orang pribumi.

Jangankan rakyat biasa, para pembesar kraton pun menurut Ngadimin terkena pula peraturan atau sikap yang bersifat diskriminatif. Misalnya, jika para pembesar kraton itu bergaul dengan pembesar-pembesar Belanda, mereka harus bersikap lebih menghormati dari pada pembesar Belanda itu sendiri. Malahan, menurut apa yang diketahui oleh tokoh tua kita ini, Sunan sendiri jika berjumpa dengan residen Surakarta harus menyembah.<sup>9)</sup>

Dalam pada itu, Ahmad Musanni (70 tahun), yaitu seorang penduduk di Laweyan, memberi keterangan, bahwa peraturan yang bersifat diskriminatif itu terdapat juga di tempat pemandian, di kantor pos, di sekolah dan di tempat-tempat lain.

Di tempat pemandian yang biasa didatangi oleh orang Eropa dan orang Asing lainnya biasanya terdapat tulisan "*Verboden voor Inlanders*", yang berarti bahwa kaum bumiputera dilarang mandi di tempat tersebut. Di kantor pos selalu terdapat loket khusus untuk melayani orang Eropa dan orang Asing lainnya, dan di samping itu ada pula loket yang khusus untuk melayani orang pribumi.<sup>10)</sup>

Jelaslah, dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan, bahwa pada masa itu di masyarakat kita ada tiga golongan penduduk, yaitu: orang Eropa yang di dalamnya orang Belanda merupakan jumlah terbesar, orang Asing yang berasal dari negeri-negeri Timur dan orang Bumiputera. Orang Asing yang berasal dari negeri-negeri Timur ini tertutama terdiri atas orang Cina dan mereka pada umumnya mempunyai kedudukan kuat dalam bidang perekonomian. Kedudukan mereka yang sedemikian itu semula tidak terasa sebagai masalah, tetapi sesudah jumlah mereka menjadi besar, mulailah mereka menjadi bahan pembicaraan di kalangan pemerintah maupun khalayak ramai. Dalam pembicaraan kita mengenai biografi H. Samanhudi masalah tersebut perlu kita ketahui juga sebab sedikit banyak hal itu ikut menjadi salah satu faktor mengapa Sarekat (Dagang) Islam segera berdiri.



Kapan orang Cina dalam jumlah besar mulai hadir dalam masyarakat bangsa kita, kita belum tahu dengan pasti. Yang sudah jelas bagi kita ialah, pada awal abad ke-17 sudah banyak orang Cina yang hadir di tanah air kita ini. Pada masa itu kebanyakan dari mereka hidup di kota-kota pelabuhan di seluruh Indonesia. Demikian pula sejak berdirinya Batavia, mereka banyak yang tinggal di kota yang cepat menjadi ramai itu. Di situ, sebagian besar di antara mereka hidup sebagai pedagang, sebagian hidup sebagai petani, atau tukang, tetapi ada pula yang hidup sebagai pengusaha pabrik gula. Dari tahun ke tahun jumlah mereka selalu saja bertambah banyak.<sup>11)</sup>

Pada masa pemerintahan raja Paku Buwono II (1717–1724) terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh gabungan tentara Jawa dengan orang-orang Cina.<sup>12)</sup> Pada akhir abad ke-19 orang-orang Cina banyak didatangkan dari negeri Cina, sebab tenaga mereka sangat diperlukan untuk menambah jumlah tenaga bumiputera yang dirasakan sangat kurang. Kebanyakan dari mereka bekerja di kebun tembakau di Sumatera Timur, di kebun gambir dan di kebun lada di sebelah selatan Riau dan Lingga, mengambil timah putih di Bangka dan Belitung, dan di perkebunan Kalimantan Barat.<sup>13)</sup>

Tetapi, di antara orang Cina yang berdatangan itu banyak yang masuk ke pulau Jawa. Hal ini telah menyebabkan jumlah orang Cina di pulau Jawa bertambah dengan cepatnya. Sebagai contoh, pada tahun 1900 jumlah mereka kira-kira 280.000 orang, tetapi sesudah ada tambahan ini jumlah mereka menjadi dua kali lipat.

Pertambahan jumlah orang Cina yang cepat itu telah menimbulkan kesulitan bagi pemerintah. Kesulitan ini tidak mudah diatasi, karena pada tahun 1896 pemerintah Cina telah mengeluarkan peraturan bahwa semua orang yang berayahkan bangsa Cina dengan sendirinya berstatus warganegara Cina. Begitu pula, karena pada tahun 1899 bangsa Jepang mendapat persamaan dengan bangsa Eropa, maka bangsa Cina menuntut hak yang serupa itu pula. Keadaan yang menyulitkan pemerintah itu menjadi lebih

terasa berat sesudah orang-orang Cina mendirikan sekolah-sekolah Cina dan mengirimkan inspektur-inspektornya sendiri untuk sekolah-sekolah tersebut.

Sekolah-sekolah Cina itu juga tumbuh dengan cepat. Dalam waktu kira-kira 10 tahun saja jumlah sekolah tersebut telah menjadi kira-kira 400 buah. Guru-gurunya adalah para bekas mahasiswa perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian ternyata sekolah-sekolah tersebut menjadi tempat penggemblengan kader-kader negeri Cina. Dari padanya lahirlah kaum terpelajar Cina yang kelak mendirikan perkumpulan dengan nama *Young China*.

Sebagai salah satu jalan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi, pemerintah lalu mendirikan *Hollands Chineze School* (HCS).<sup>14)</sup> Tetapi berdirinya HCS ini dapat dikatakan ibarat pisau yang bermata dua, di satu fihak mengerem arus kecinaan di kalangan orang Cina, tetapi di fihak lain, telah menyebabkan makin cepatnya pertambahan kaum terpelajar Cina, dan ini berarti makin kuatnya daya saing orang Cina terhadap penduduk bumiputera. Malahan, masalahnya tidak hanya berhenti di situ, tetapi kebijaksanaan pemerintah tersebut oleh penduduk bumiputera diartikan sebagai kebijaksanaan yang bersifat diskriminatif, sebab nyatanya lebih mudah anak-anak Cina masuk HCS dari pada anak-anak bumiputera masuk HIS.

Sementara itu, dalam Undang-undang tanggal 10 Februari 1910, terdapat ketentuan, bahwa yang dapat diakui sebagai *Nederlandsch Onderdaan* (Kawula Nederland) adalah:

1. Mereka yang lahir di Hindia Belanda dari orang tua yang bertempat tinggal di Hindia Belanda atau dari seorang ibu yang bertempat tinggal di sana, bila ayahnya tidak diketahui.
2. Mereka yang lahir di Hindia Belanda dari orang tua yang tidak diketahui.
3. Isteri atau janda yang tidak kawin kembali dari yang tersebut pada nomor satu dan dua.



4. Anak orang yang tersebut pada nomor 1 yang lahir di luar Hindia Belanda selama belum 18 tahun usianya atau belum kawin.
5. Anak orang tua yang *onderdaan* menurut undang-undang ini, yang lahir di luar Hindia Belanda bila mereka setelah mencapai umur 18 tahun atau kawin, bertempat tinggal dalam *Koninkrijk* (Nederland, Nederlands Indie, Suriname dan Curacao) dengan isterinya dan anaknya yang belum berusia 18 tahun, bila mereka juga bertempat tinggal dalam *Koninkrijk* (Kerajaan).
6. Mereka yang bertempat tinggal di Hindia Belanda setelah kehilangan "*Nederlands onderdaanschap*" karena tidak menyatakan menginginkannya waktu tinggal di luar negeri.<sup>15)</sup>

Jelaslah, bahwa karena adanya undang-undang tersebut, orang-orang Cina yang tinggal di Hindia Belanda, terutama anak-anak mereka, dengan mudah menjadi *Nederlandsch onderdaan*.

Menurut J. J. Meijer, redaktur majalah "Medan Prijaji" hal itu berarti orang-orang Cina mempunyai status rangkap; pertama, sebagai *Nederlandsch onderdaan*, dan kedua, sebagai warganegara Cina. Jadi berbeda halnya dengan orang Asing keturunan Eropa, misalnya orang Perancis atau Inggris, yang sesudah mendapat naturalisasi dari pemerintah Nederland kehilangan statusnya sebagai warganegara asalnya.<sup>16)</sup>

Dalam bidang perekonomian, orang-orang Cina mempunyai kedudukan yang makin lama makin kokoh, sehingga pemerintah Hindia Belanda yang pada masa itu sangat memerlukan uang, menyewakan tanah-tanah yang luas kepada mereka. Persewaan ini berlangsung dengan perjanjian, bahwa si penyewa harus bertanggung jawab atas pemasukan pajak tanah-tanah yang disewa. Kecuali pemerintah para bangsawan pun banyak yang menyewakan tanah kepada mereka. Para bangsawan ini kemudian banyak yang jatuh miskin karena mereka hidup mewah dan lain-lain, tidak dapat membayar hutang, sehingga tanah mereka masing-masing

terus berada di tangan yang berpiutang, padahal mereka harus terus-menerus membayar pajak tanah mereka masing-masing itu kepada pemerintah.

Sebagai tuan tanah, orang-orang Cina itu mempunyai penjaga keamanan sendiri, membeli hasil bumi rakyat, dan mempunyai hak dengan membungkakan uang dan melakukan sistem ijon. Keuntungan lain mereka peroleh dari sewa jalan, penjualan garam, dan dari penarikan pajak masuk dari daerah yang satu ke daerah yang lain.<sup>17)</sup> Dengan demikian dapatlah kita bayangkan betapa penderitaan serta kemiskinan rakyat yang hidup di tanah yang sudah disewa oleh para tuan tanah Cina itu.

Dalam bidang perdagangan orang-orang Cina banyak yang mencapai kemajuan. Di pantai-pantai, terutama di bagian utara pulau Jawa, mereka mempunyai perkumpulan-perkumpulan dagang. Kecuali itu, di antara orang Cina yang menjadi pedagang perantara, banyak yang mendapat hak monopoli dalam penjualan barang dagangan firma-firma Eropa.<sup>18)</sup> Dengan demikian makin terdesaklah rakyat bumiputera.

Selanjutnya, ditilik dari segi kecerdasannya, rakyat bumiputera yang sudah sangat terdesak itu juga sangat menyedihkan. Pada tahun 1886 hanya seorang saja anak bumiputera yang dapat memasuki *Hogere Burgerschool* (HBS). Hal itu berakibat, pada tahun 1891 hanya seorang pula anak bumiputera yang dapat menggondol ijazah sekolah tersebut. Anak bumiputera yang beruntung itu, tiada lain adalah R.M.A.A. Koesoemo Oetojo. Beberapa tahun kemudian menyusullah R.M. Sosrokartono (mungkin tahun 1897) dan P. Achmad Djajadiningrat (mungkin tahun 1898).<sup>19)</sup>

Jangankan memasuki *Hogere Burgerschool* (HBS), untuk dapat masuk *Europesche Lagere School* (ELS) saja seorang anak harus memenuhi syarat-syarat yang cukup berat, misalnya: orang tuanya harus mempunyai penghasilan paling sedikit F. 150,— dan bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari bahasa Belanda.<sup>20)</sup>

Sebelum tahun 1900 sekolah yang setingkat sekolah dasar

dan yang pada dasarnya diperuntukkan bagi anak-anak bumi-putera adalah:

1. *Tweede Inlandsche School* (Sekolah Dasar Bumiputera Kelas Dua); masa belajarnya hanya 3 tahun.<sup>21)</sup>
2. *Eerste Inlandsche School* (Sekolah Dasar Bumiputera Kelas Satu); masa belajarnya 5 tahun, tidak mendapat pelajaran bahasa Belanda. Jumlah kedua sekolah tersebut (khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah) di seluruh Hindia Belanda hanya 533 buah saja.<sup>22)</sup>
3. *Hoofdenschool* (Bandung, Magelang, Probolinggo dan Tondano). Sekolah ini hanya menerima anak laki-laki dari keluarga kepala atau keluarga terkemuka di kalangan penduduk bumiputera.<sup>23)</sup>
4. *Speciale School* (Ambon, Depok dan Magelang). Sekolah ini hanya menerima anak-anak dari keluarga tentara atau pensiunan tentara yang berasal dari karesidenan Menado, Ambon, Ternate dan Timor. Kedua sekolah tersebut menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.<sup>24)</sup>

Adapun sekolah lanjutan yang dibuka bagi anak-anak bumi-putera adalah:

1. Sekolah Guru atau *Kweekschool*, yang terdapat misalnya di Bandung, Yogyakarta, Fort de Kock (Bukittinggi), Ambon, Tondano, Probolinggo, Banjarmasin, Magelang (ini pindahan dari Surakarta), Makasar dan Padangsidempuan).
2. Sekolah Dokter Jawa di Batavia.
3. *Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) di Magelang.<sup>25)</sup>

Dari semua uraian mengenai pendidikan tersebut dapatlah kita mendapat gambaran sekadarnya, bahwa dibanding dengan orang Eropa dan orang Cina, sampai akhir abad ke-19 orang bumi-putera mendapat pendidikan yang lebih sedikit. Dengan demikian



mudahlah kita fahami mengapa pada masa itu dalam perhitungan rata-rata orang bumiputera lebih terbelakang yang berarti lebih lemah daya saingnya dari pada orang-orang asing.

Benarlah mulai abad ke-20 ini terlihat adanya perhatian dari pemerintah Belanda terhadap pendidikan bagi anak-anak bumiputera. Misalnya, pada tahun 1907 *Eerste Inlandsche School* diperbaiki dengan jalan mengubah masa belajarnya menjadi tujuh tahun, memberikan pelajaran bahasa Belanda mulai kelas III, menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar mulai kelas VI, dan pada tahun 1914 mengubah sekolah ini menjadi *Hollandsch Inlandsche School* (HIS),<sup>26)</sup> Malahan kemudian pemerintah membuka sekolah sebagai kelanjutan dari sekolah-sekolah HIS ini, yaitu *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO).<sup>27)</sup> *Algemene Middelbare School* (AMS)<sup>28)</sup>, dan sekolah-sekolah kejuruan setingkat MULO atau AMS.<sup>29)</sup> Tetapi, pengadaan sekolah-sekolah ini boleh dikatakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif kurang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat bumiputera di Hindia Belanda pada masa itu.

Akhirnya, untuk melengkapi pengertian kita tentang keadaan masyarakat pada masa hidup H. Samanhudi baiklah kita lihat pula apa yang disebut *Poenale Sanctie*.

Agar kita mempunyai pengertian mengenai *Poenale Sanctie* itu, lebih dulu baiklah kita menengok sebentar sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1880. Yang dimaksudkan di sini adalah peraturan perburuan yang menurut pemerintah untuk menjamin kebebasan kaum buruh dalam ikatan kerja mereka dengan perkebunan. Jaminan itu ditandai dengan adanya pertanggungjawaban pihak penguasa untuk mendaftarkan lebih dulu orang-orang yang ingin mengikat kontrak kerja dalam perkebunan. Memang dalam peraturan tersebut terdapat pasal-pasal yang secara tersurat menentukan kewajiban timbal balik buruh dan majikan. Jadi, bukan hanya kewajiban kaum buruh, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi majikan juga disebutkan di situ. Hanya saja, prakteknya tidak begitu, melainkan hanya pihak buruh atau pihak kuli saja yang terkena peraturan keras memenuhi kewajiban yang

sudah ditentukan.

Peraturan yang sudah kita sebutkan itu oleh pemerintah Belanda diberi nama *Koeli Ordonnantie*. Para buruh atau para *koeli* yang terikat dalam perjanjian perburuhan *Koelie Ordonnantie* itu disebut *Contract Koelie* atau kuli kontrak. Sedangkan perjanjian yang mengikat para kuli itu disebut *Koelie Contract* atau kontrak kuli.

Dalam pasal pertama peraturan tersebut dinyatakan bahwa yang tergolong sebagai kuli adalah: pertama, para karyawan yang berasal dari luar negeri, dan kedua, para karyawan bumiputera yang berasal dari daerah luar Sumatera Timur. Itu berarti bahwa karyawan yang berasal dari Sumatera Timur sendiri luput dari peraturan tersebut.

Oleh karena peraturan itu diperlukan identitas lengkap dari calon karyawan yang akan mengikat kontrak, yaitu: nama, tempat lahir, umur, sukubangsa, nama majikan dan kebun serta maskapainya, bentuk kerja, lama waktu kerja, yang tidak boleh lebih dari 10 jam, cara pembayaran gaji, panjar, lama perjanjian, yang tidak boleh lebih dari tiga tahun, dan waktu libur. Kontrak itu menentukan kewajiban pihak majikan menyediakan pemondokan dan rawatan kesehatan, supaya pihak pemerintah selalu dapat mengadakan pengawasan atau mengetahui hubungan kerja antara para karyawan dengan majikan, pemerintah setempat selalu mendapat salinan kontrak kerja sebanyak satu helai.

Agar pihak majikan tidak menderita rugi, ada suatu ketentuan dalam peraturan tersebut, bahwa jika kuli sakit atau tidak masuk kerja karena lari atau karena menjalani hukuman lebih dari sebulan, pihak majikan dapat mengurangi gaji kuli yang bersangkutan. Di samping itu, ada pula suatu ketentuan, bahwa jika tidak ada ijin tertulis dari administratur, kuli tidak boleh meninggalkan kebun tempat kerjanya.

Jika timbul pertikaian antara dua pihak, sedapat mungkin oleh pihak penguasa setempat hendaknya dicarikan penyelesaian secara damai: kalau tidak mungkin, penyelesaian harus dilakukan



oleh hakim.

Selanjutnya *Koelie Ordonnantie* itu menentukan, bahwa siapa saja yang melanggarnya diancam dengan hukuman. Jika yang melakukan pelanggaran orang Eropa diancam denda tidak lebih dari f. 100,—, sedang jika yang melakukan pelanggaran orang pribumi, atau yang dapat disamakan dengan itu, diancam denda setinggi-tingginya f. 25,— subsidair 12 hari. Dalam pada itu ditentukan pula, bahwa pelanggaran tanpa sebab yang masuk akal, oleh fihak majikan Eropa diancam dengan hukuman denda paling tinggi f. 100,—. Yang dimaksudkan dengan pelanggaran tanpa sebab yang masuk akal adalah, pertama, lari dan kedua: terus-menerus tidak masuk kerja. Tetapi kedua pelanggaran itu baru dapat diperkarakan jika fihak majikan sudah mengajukan tuntutan-nya. Mereka yang lari untuk pertama kalinya, atas permintaan majikan dapat dikembalikan saja ke kebun. Jika pelanggaran seperti itu dilakukan berulang-ulang, si pelanggar dapat dihukum selama paling ringan tiga bulan dan paling berat setahun.

Dalam pada itu untuk mewujudkan apa yang disebut iklim ketenangan, *Koelie Ordonnantie* itu menentukan ancaman terhadap: perbuatan yang dapat menyebabkan rasa malu pada fihak lain, perbuatan yang merusak ketertiban, menghasut, berkelahi, mabuk, atau perbuatan lain yang tidak dapat digolongkan kejahatan, akan diberikan hukuman setinggi-tingginya f. 25,—, atau bekerja selama-lamanya 12 hari.

Karena dalam ordonansi itu terdapat sanksi hukuman badan bagi kaum pekerja yang melanggar ketentuan yang ada, maka ordonansi tersebut sering dinamai orang *Poenale Sanctie*, artinya "syarat yang dapat berakibat hukuman bila dilanggar".

Tahun 1885 *Poenale Sanctie* tersebut diperbaharui, dan tahun 1889 diperbaharui lagi, artinya kian lama kian diperteguh, sehingga setiap buruh yang ingkar, lalai, lari dapat ditangkap dan dihukum. Demikianlah sejak kelahiran ordonansi tersebut fihak majikan makin lama makin sewenang-wenang. Malahan, dengan tujuan agar para karyawan menjadi lebih patuh, kadang-kadang fihak majikan

menahan gaji karyawan bersangkutan. Demikian pula dalam kaitan dengan hak para karyawan menyampaikan keluhan kepada penguasa yang berwenang di kota, pihak majikan selalu tidak memberikan ijinnya.<sup>30)</sup>

---

## Catatan

- 1) Ki Hajar Dewantara, *Dari Kebangunan Nasional Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, Penerbit Endang, Djakarta, 1952, hal. 107–109.
- 2) Soeroto, *Tanam Paksa*, Penerbit PT. Sanggabuwana, Bandung, Jakarta, 1977, hal. 12.
- 3) *Ibid*, hal. 14–16.
- 4) Sartono Kartodirdjo dkk., *Sejarah Nasional Indonesia V*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1977, hal. 10.
- 5) D.H. Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, Pradnyaparamita, Djakarta, 1962, hal. 183.
- 6) Soeroto, *op.cit.*, hal. 18–19.
- 7) DMG Koch, *Menudju Kemerdekaan*, terjemahan Abdoel Moeis, Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1951, hal. 9.
- 8) Wawancara dengan Bapak Reso Ramli pada tanggal 24 Agustus 1978.
- 9) Wawancara dengan Bapak Ngadiman Reksowijono pada tanggal 10 Agustus 1978.
- 10) Wawancara dengan Bapak Ahmad Mussani pada tanggal 15 Oktober 1978.
- 11) Soetjipto Wirjosoeparto, *Dari Lima Zaman Pendjadjahan Menudju Kemerdekaan*, Indira, 1953, hal. 35.
- 12) *Ibid.*, *loc. cit.*
- 13) J.J. Meijer, "Bangsa Tionghoa dan bangsa koelit poetih", *Medan Prijaji*, bundel tahun 1909, hal. 696.
- 14) Abu Hanifah, *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang*, Yayasan Idayu, Jakarta, hal. 16–17.
- 15) G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Timun Mas, Djakarta, hal 128.
- 16) J.J. Meijer, *op.cit.*, hal. 701–702.
- 17) Abu Hanifah, *op.cit.*, hal. 17.
- 18) *Ibid.*, *loc. cit.*
- 19) Ki Hadjar Dewantara, *op.cit.*, hal. 42.
- 20) Wawancara dengan Bapak Reso Ramli pada tanggal 24 Agustus 1978.
- 21) Ny. Darsiti Suratman, *Politik Pendidikan Belanda dan Masyarakat di Djawa*, IKIP Negeri Jogjakarta (kertas kerja dalam Seminar Sejarah II tahun 1970 di Jogjakarta) hal. 13.
- 22) *Ibid.*, *loc. cit.*
- 23) *Ibid.*, hal. 9.
- 24) *Ibid.*, *loc.cit.*

- 25) a. *Ibid.*, hal. 10.  
b. Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, Penerbit C.V. Toko Putra, Semarang, hal. 22.  
c. Ki Hadjar Dewantara, *op.cit.*, hal. 193.
- 26) Abu Ahmadi, *op.cit.*, hal. 27–28.
- 27) *Ibid.*, *loc.cit.*
- 28) *Ibid.*, *loc.cit.*
- 29) *Ibid.*, hal. 31.
- 30) H. Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe*, Percetakan Waspada, Medan, 1977, hal. 64–67.
-



## BAB II

### LINGKUNGAN HIDUP DAN PRIBADI

#### H. SAMANHUDI

Di kota Surakarta, terdapat sebuah kecamatan yang bernama Laweyan. Kecamatan ini terkenal sebagai daerah orang kaya. Kalau kita datang ke daerah tersebut, dapatlah kita melihat di situ rumah-rumah yang besar serta megah dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh kuat seperti benteng. Selanjutnya, jika sudah hadir dalam salah satu rumah tersebut, kita akan melihat ruangan-ruangan yang besar, lantai-lantai yang mengkilap, tiang-tiang yang dicat dengan indahnya dan lain-lain, yang memberi kesan bahwa pemiliknya benar-benar orang kaya.

Rumah yang seperti itu, tidak hanya lima atau sepuluh buah saja, tetapi banyak sekali. Malahan di Laweyan itu ada beberapa buah kampung yang boleh dikatakan hanya berisi rumah-rumah yang seperti itu. Kampung-kampung yang dimaksudkan di sini adalah: Sondakan, Bletikan, Premulung, Kranggan, Sayangan Kulon, Sayangan Wetan, Klaseman, Jagalan, Kidul Pasar, Sentono dan Keramat.

Orang-orang kaya itu kebanyakan hidup dari perusahaan kain batik atau dari perdagangan kain batik. Mereka yang hidup dari perusahaan, setiap hari memproduksi kain batik secara besar-besaran dan kemudian menjual produk itu secara besar-besaran pula. Sedang yang hidup dari perdagangan saja, tidak memproduksi sendiri, tetapi hanya kulak dan kemudian menjual hasil kulakan itu secara besar-besaran. Para pengusaha maupun para pedagang batik itu mempunyai relasi yang banyak sekali dan tersebar di kota-kota di seluruh tanah air, sehingga mereka terpaksa sering bepergian.

Kepergian para pengusaha atau para pedagang itu, kemudian ternyata menjadi salah satu faktor yang mempersatukan cita-cita

serta tindakan bangsa kita dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Sebab, pertemuan-pertemuan antar relasi dagang itu biasanya tidak hanya diisi dengan acara percakapan mengenai perdagangan, tetapi juga mengenai masalah agama, sosial dan politik.

Dalam pembicaraan mengenai agama, karena para pedagang atau para pengusaha tersebut pada umumnya memang orang-orang yang taat pada ajaran agama, pembicaraan mereka selalu berlangsung secara asyik tetapi khusuk, sedang yang menjadi pokok pembicaraan biasanya berkisar pada pembaharuan agama, agar umat Islam di Indonesia yang sudah mundur dan melemah itu dapat dikembalikan kepada jalan yang benar. Para pembicara tersebut pada umumnya berkeyakinan, bahwa kemunduran umat Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial itu disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan umat Islam dalam bidang agama. Sebaliknya, para pedagang dan para pengusaha yang sekaligus ulama itu yakin, bahwa jika umat Islam dapat kembali ke jalan yang benar, maka umat Islam pasti akan kembali ke jaman kejayaan; hal itu tidak hanya berlaku untuk umat Islam di dunia pada umumnya, tetapi juga berlaku bagi umat Islam Indonesia.<sup>1)</sup>

Agar kita dapat memahami latar belakang alam pikiran para pedagang dan para pengusaha itu, baiklah kita menengok sejenak keadaan Timur Tengah pada masa itu. Ketika Dunia Islam diliputi kegelapan, tiba-tiba bergemalah seruan dari padang pasir yang luas itu, memanggil umat Islam kembali ke jalan yang benar. Seruan itu berasal dari Muhammad bin Abdulwahab. Tokoh ini dilahirkan di Nejed di sekitar tahun 1700. Nejed adalah sebuah propinsi yang terletak di jantung padang pasir Arab. Dalam dunia Islam pada masa itu, Nejed mempunyai kedudukan yang istimewa, sebab di sana agama Islam masih hidup subur dengan kemurniannya.

Setelah mengembara kian kemari, di jazirah Arab bertahun-tahun lamanya, akhirnya Muhammad bin Abdulwahab dapat menundukkan pemimpin yang paling berkuasa di seluruh Nejed yaitu kepala suku Sa'ud. Dengan demikian diperolehnya prestise moral dan kekuatan material. Hal itu dipergunakannya dengan baik, sehingga padang pasir Arab dapat menjadi kesatuan

politis religius.

Setelah meninggal pada tahun 1878, Muhammad bin Abdulwahab diganti Sa'ud, muridnya. Sa'ud ternyata pengganti yang cakap, sehingga "negara Wahabi" yang baru ini amat menyerupai khalifah Mekkah yang dulu. Sementara itu, meskipun memiliki tenaga militer yang besar, Sa'ud selalu merasa bertanggung-jawab terhadap pendapat umum dan tidak pernah mengurangi kemerdekaan yang sah dari rakyatnya. Pemerintahannya memang keras, tetapi bijaksana dan adil. Di Nejed, hakim-hakim Wahabi cakap dan jujur, perampokan hampir tidak dikenal, pendidikan berkembang pesat, dan guru-guru dikirim ke kabilah-kabilah Badui.

Setelah Nejed dapat diperkokoh, Sa'ud bermaksud memulai pelaksanaan tugasnya yang besar, yaitu menguasai dan memurnikan seluruh Dunia Islam. Dalam kaitan ini yang ingin dicapai lebih dulu adalah kota-kota suci. Pada awal abad ke-19 tujuan tersebut sudah dapat dicapai. Sebab pada masa itu kekuatan tentara Turki tidak mampu menekan serbuan tentara berkuda Sa'ud yang diliputi kebencian fanatik terhadap orang-orang Turki yang dipandang sebagai orang-orang murtad dan keras kepala serta telah merampas supremasi dalam Islam dari tangan orang-orang Arab.

Tetapi, ketika sedang mempersiapkan untuk menyerang Siria, pada tahun 1814, Sa'ud wafat. Meskipun demikian, kaum Wahabi masih ingin terus bergerak untuk menyapu Siria dan sekaligus memurnikan agama Islam. Tetapi, ketika itu ada kekuatan yang menghalangi kegiatan tersebut, yaitu kekuatan tentara Muhammad Ali.

Muhammad Ali adalah gubernur Mesir yang bertanggung-jawab kepada Sultan Turki. Dengan tentara yang bercorak Eropa dalam organisasi dan persenjataannya sang gubernur merebut kembali kota-kota suci dan memaksa kaum Wahabi kembali ke padang pasir. Hal ini telah menyebabkan imperium Wahabi yang baru lahir itu lenyap.



Tetapi, lenyapnya imperium Wahabi itu hanya bersifat lahir saja. Secara rokhaniah peranan kaum Wahabi yang sebenarnya malahan mulai sejak peristiwa tersebut. Dengan Nejed tetap sebagai pusat kegiatannya kaum Wahabi memancarkan cahaya kemurnian agama Islam ke delapan penjuru angin.

Dalam garis besarnya gerakan Wahabi bertujuan mengatasi kepincangan-kepincangan, dan mengembalikan kaum muslimin ke ajaran Islam yang sejati. Tauhid Islam diajarkan dalam kesederhanaannya, Qur'an ditafsirkan secara harfiah. Kode moral yang keras dipegang dengan teguhnya. Semua rukun Islam dijalankan secara teliti. Pola hidup sederhana dilaksanakan benar-benar.<sup>2)</sup>

Apa yang dikerjakan oleh kaum Wahabi itu saling melengkapi dengan apa yang kemudian disebut *Pan Islamisme*. Dalam artinya yang luas hal itu adalah solidaritas antara sesama umat Islam. Solidaritas itu sudah ada sejak permulaan pertumbuhan agama Islam, yaitu sejak Nabi Muhammad dan para pengikutnya diikat antara yang satu dengan yang lain oleh tali iman berhadapan dengan bangsa sendiri yang masih biadab dan hendak menghancurkan mereka. Bagi Nabi Muhammad prinsip solidaritas, ukhuah di antara kaum muslimin merupakan kepentingan yang utama sekali. Solidaritas Islam itu berupa lembaga-lembaga yang ada, yaitu ibadah haji dan khilafah.

Tiap tahun ratusan ribu orang datang dari segala penjuru Dunia Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana, di hadapan Ka'bah yang dipandang suci oleh semua umat Islam, bertemulah orang-orang dari berbagai kebangsaan, bahasa serta kebudayaan untuk melakukan kebaktian bersama. Ibadah haji itu dapat disebut sebagai muktamar abadi Pan Islamisme. Sebab di dalamnya segala macam masalah yang timbul dalam kehidupan beragama dapat dibicarakan oleh utusan-utusan dari setiap penjuru Dunia Islam.

Dalam pada itu, meskipun kalah penting dengan ibadah haji, khilafah mempunyai peranan juga, terutama pada permulaan kelahirannya. Sebab, dengan memandang khalifah sebagai kepala atau pemimpin bersama umat Islam memperoleh persatuan.<sup>3)</sup>



Pan Islamisme itu mendapat bentuknya yang tegas berkat kegiatan Jamal al-Din Afghan (1839–1897). Tokoh ini telah mengobarkan peranan Islam di Dunia Timur Tengah, dan telah memberi bantuan kepada pemberontakan Arabi di Mesir serta revolusi di Iran. Tokoh ini juga telah membangun dan mengilhami pergerakan Pan Islamisme untuk berjuang mencapai persatuan umat Islam di seluruh dunia di bawah khilafah Usmanli. Meskipun akhirnya ia tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan, asas perjuangannya yang terutama terus berpengaruh terhadap pergerakan umat Islam.<sup>4)</sup>

Jamal al-Din mempunyai seorang murid yang terkenal pandai, yaitu Syaikh Muhammad Abduh (1849–1905). Tokoh tersebut dapat digolongkan modernis, sebab ia selalu menganjurkan agar umat Islam senantiasa menuntut cara berfikir yang modern. Menurut tokoh ini, pada akhirnya cara berfikir yang modern itu pasti mengakui kebenaran Islam. Karena pendapatnya yang seperti itu, tidak mengherankan jika ia tidak sependapat dengan golongan tua di al-Azhar, tetapi mempunyai pengaruh besar di kalangan angkatan muda.<sup>5)</sup>

Salah seorang murid Abduh yang terkenal adalah Syaikh Rasyid Rida (1865–1935). Tokoh ini adalah pemimpin gerakan *Salawiyah*. Gerakan Salawiyah adalah gerakan yang bertujuan menegakkan sunnah yang telah diberikan oleh para "leluhur yang agung", para bapak umat Islam. Tokoh tersebut adalah juga penerbit tafsir Qur'an serta majalah yang berhaluan reformis "Al Manar", yang penyebarannya demikian luas sehingga sampai di pulau Jawa pula.<sup>6)</sup>

Dalam pada itu, menurut H.A.R. Gibb, kalangan beragama berpendapat, bahwa yang menyebabkan kelemahan politik umat Islam adalah hilangnya kepercayaan dan kemerosotan ibadah, karena itu pergerakan pembaharuan umum yang pertama dari umat Islam dalam abad ke-19 memiliki dua sifat. Dalam segi agama, pergerakan menuntut pembersihan kepercayaan dan amal keagamaan, kenaikan taraf kecerdasan, dan perluasan serta modernisasi pendidikan. Dalam segi politik pergerakan bertujuan

menghilangkan sebab-sebab yang memecah belah umat Islam dan mempersatukan mereka untuk mempertahankan iman.<sup>7)</sup> Demikianlah keadaan Timur Tengah pada masa itu yang mempengaruhi alam fikiran umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Selanjutnya, dalam pembicaraan mengenai masalah sosial para pedagang dan para pengusaha Islam di Indonesia itu pada umumnya berpendapat, bahwa keadaan rakyat atau penduduk bumiputera sangatlah menyedihkan. Menurut pengamatan mereka, rakyat pada umumnya hidup sangat miskin, bodoh dan tertekan jiwanya. Selanjutnya mereka berpendapat, bahwa seharusnya ada usaha atau perjuangan yang dilakukan oleh kaum pandai bumi-putera untuk memperbaiki nasib para saudaranya yang menderita itu.

Dalam pembicaraan mengenai politik, para pedagang atau pengusaha itu menyatakan pendapat, bahwa pemerintah Belanda bersikap sewenang-wenang, diskriminatif, tidak memperhatikan nasib rakyat bumiputera dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut pendapat mereka, seharusnya rakyat bumiputera segera menyatukan diri dan memperkuat diri, agar dengan persatuan serta kekuatan itu dapat dengan segera berjuang untuk memperbaiki nasib mereka bersama-sama.

Salah seorang tokoh yang melakukan kegiatan seperti yang digambarkan di atas adalah Kiai Kartowikoro. Tokoh tersebut adalah seorang muslimin yang sangat taat pada agamanya yaitu agama Islam, mempunyai sifat yang suka menolong sesamanya, mempunyai hasrat yang besar untuk memperbaiki nasib bangsanya, bersikap anti penjajahan bangsa asing, dan sangat rajin mendidik para puteranya, agar para putera itu dapat menjadi manusia yang baik bagi Tuhan, bagi sesama manusia dan bagi diri mereka masing-masing. Sebagai pedagang, tokoh tersebut bersifat sangat rajin, teliti, trampil dan hemat. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ia dapat menjadi orang yang kaya raya.<sup>8)</sup>

Tokoh lain yang perlu disebutkan namanya pula, adalah Haji Ahmad Zein, yaitu putera Kiai Kartowikoro. Seperti ayahnya,

tokoh tersebut adalah seorang muslimin yang saleh dan seorang yang berhasil. Kecuali itu tokoh ini juga termasuk orang yang sangat baik dalam pergaulan dan sangat bijaksana dalam hal mendidik para puteranya. Ketika usianya belum begitu lanjut, Haji Ahmad Zein hidup dari perusahaan batiknya yang besar, tetapi sesudah usianya lanjut, ia hidup dari perdagangan bahan-bahan batik. Semula ia tinggal di Sondakan, tetapi kemudian ia tinggal di Bletikan. Sebagaimana kita ketahui, baik Sondakan maupun Bletikan adalah tempat tinggal para pengusaha batik yang kaya raya.

Putra Haji Ahmad Zein ada tiga orang, yakni Haji Samanhudi, Haji Alwi dan Haji Amir. Haji Samanhudi tinggal di Solo, Haji Alwi di Banyuwangi dan Haji Amir di Bandung. Tiga orang itu hidup dari perusahaan dan perdagangan batik, dan mereka adalah orang-orang yang sangat kaya.

Haji Samanhudi lahir pada tahun 1878 di Sondakan, Laweyan, Solo. Ketika masih muda ia bernama Sudarno Nadi.<sup>9)</sup> Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Sudarno Nadi ialah:

Pertama, belajar mengaji di Laweyan Surakarta.

Kedua, belajar ilmu agama pada Kiai Djodjermo di Surabaya.

Ketiga, belajar di sekolah dasar bumiputera (*Inlandsche School*).

Keempat, belajar di sekolah dasar bumiputera kelas satu (*Eerste Inlandsche School*).<sup>10)</sup>

Sesudah tidak lagi bersekolah, Sudarno Nadi melakukan kegiatan sebagai pengusaha. Karena memang berbakat dan mempunyai modal yang besar, meskipun masih muda dan sekolahnya hanya sampai sekolah dasar, Sudarno Nadi segera tampak di masyarakat sebagai pengusaha, dan saudagar yang cakap dan berhasil.

Kira-kira pada usia 20 tahun Sudarno Nadi menikah dengan Suginah, anak Kiai Badjuri. Sejak pernikahan itu namanya berubah menjadi Wirjowikoro. Beberapa tahun kemudian Wirjowikoro menemukan jodohnya yang kedua, yaitu Marbingah, yang konon



masih termasuk keluarga Mangkunegaran.

Sementara itu, Sudarno Nadi atau Wirjowikoro makin giat dan makin berhasil dalam usahanya. Perusahaannya sangat besar, pegawainya ratusan, dan untungnya rata-rata f. 800,— sehari. Jumlah itu adalah jumlah yang besar sekali, sebab pada masa itu gaji seorang bupati rata-rata hanya f. 1000,— dalam sebulan.<sup>11)</sup>

Perusahaan Wirjowikoro yang besar itu mempunyai cabang di mana-mana, misalnya, di Solo, Bandung, Purwokerto, Surabaya dan Banyuwangi. Dengan demikian ia harus sering pergi ke kota-kota tersebut untuk mengurus cabang-cabang perusahaannya. Sebagai akibat kepergian yang sering dilakukannya itu, ia mempunyai banyak sahabat dan kenalan tempat ia berbincang-bincang mengenai berbagai masalah; seperti yang pernah dialami oleh kakeknya dan ayahnya ketika keduanya masih hidup. Ternyata setiap perbincangan yang dilakukannya dengan para relasi dagangnya selalu merupakan penataran semanga serta kecerdasannya. Dan karena hal itu selalu saja dilakukannya setiap kali ia berjumpa dengan sahabat serta kenalannya, maka semangat serta kecerdasannya selalu meningkat pula terus-menerus.<sup>12)</sup>

Pada tahun 1904, Wirjowikoro melaksanakan ibadah Haji ke Mekkah. Ketika perjalanan ke Tanah Suci itu sampai di Jedah, pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya itu ia merasa seolah-olah lidahnya menjadi sangat panjang dan kemudian melilit dunia. Sesudah sesaat bermimpi, sadarlah ia dari tidurnya dan segera bangun. Sejak itu ia selalu termenung, merenungkan takbir mimpinya itu. Tetapi betapa pun kesungguhan usahanya untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam pikirannya itu, tiada juga ia memperoleh jawaban yang memuaskan. Oleh sebab itu segera pergilah ia ke tempat orang-orang yang terkenal sebagai ahli tafsir takbir mimpi. Ketika ia sudah bertemu dengan orang tersebut, diuraikanlah masalah yang dihadapinya. Atas pertanyaan yang diajukan, ahli tafsir takbir mimpi itu menjawab demikian, "Oh, itu berarti bahwa tuan akan menjadi pemimpin yang besar di negara tuan".



Jawaban ahli tafsir takbir mimpi itu sangat mengherankan baginya. Sebab ia sadar bahwa dirinya bukan orang pandai, dan ia tidak pernah bercita-cita menjadi pemimpin, apalagi pemimpin yang besar. Memang benar bahwa dari kakek dan ayahnya serta pergaulannya ia telah memperoleh banyak pengertian tentang bermacam-macam masalah kemasyarakatan. Dan benarlah pula bahwa pada dirinya sudah ada kedambaan akan kemajuan serta kesejahteraan bangsanya. Tetapi ambisi menjadi pemimpin, sama sekali tidak ada padanya. Demikianlah pergolakan yang terdapat dalam pikiran dan perasaannya sesudah ia bermimpi di Jeddah.<sup>13)</sup>

Sementara itu ibadah Haji yang dilaksanakannya itu berlangsung dan berakhir menurut rencana. Pada tahun 1904 itu pula Wirjowikoro alias Haji Samanhudi pulang dari Tanah Suci.

Sesampai di rumah Haji Samanhudi masih teringat akan mimpinya yang ajaib di Jeddah. Dalam pada itu, pengalamannya beribadah haji di Mekkah, terutama pergaulannya dengan kaum pergerakan Islam di sana telah menyebabkan dia mendapat kesan-kesan yang mendalam dan terangsang untuk melakukan pergerakan di tanah air. Sebagai rintisan, pendahuluan atau latihan ia mendirikan perkumpulan kematian, *Mardhi Budhi*. Dalam perkumpulan ini ia menjadi ketua. Kemudian ia mendirikan *Sarekat Dagang Islam*. Perkumpulan ini, dalam perkembangan selanjutnya menjadi Sarekat Islam, kemudian menjadi *Partai Sarekat Islam* dan akhirnya menjadi *Partai Sarekat Islam Indonesia*.<sup>14)</sup>

Perkumpulan yang didirikan oleh Haji Samanhudi itu ternyata merupakan perkumpulan yang sudah lama dinanti-nantikan berdirinya oleh rakyat Hindia Belanda. Hal ini terbukti dari hangat-hangatnya sambutan rakyat terhadap perkumpulan tersebut, atau dari berduyun-duyunnya rakyat yang ingin menjadi anggotanya. Apa lagi sesudah perkumpulan diubah menjadi Sarekat Islam, yang berarti bahwa setiap orang Islam boleh masuk menjadi anggota, dalam waktu yang singkat saja telah mempunyai banyak sekali anggota yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sesuai dengan pribadi pendirinya. Sarekat Islam mempunyai sifat bertaqwa

pada Tuhan, menjunjung tinggi rasa pri-kemanusiaan, mencintai bangsa sendiri yaitu rakyat Hindia Belanda, demokratis, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.<sup>15)</sup>

H. Samanhudi adalah seorang muslim yang saleh. Sifat itu didapatnya dari keturunan, pendidikan, pergerakan dan pengalamannya. Segala rukun Islam ditaatinya benar-benar. Jika waktu shalat tiba, ia pasti dengan segera melakukan shalat. Jika waktu puasa tiba, ia pun pasti berpuasa. Demikian pula zakat dan fitrah yang senantiasa dilakukannya dengan sebaik mungkin.

Malahan dalam hal memberi sedekah kepada orang miskin, sukar dicari bandingnya. Tak pernah ada orang yang datang ke rumahnya untuk minta pertolongan, pulang dengan tangan hampa kecuali kalau orang itu tidak berjumpa dengan dia. Bahkan hampir dapat dipastikan, bahwa orang tersebut pulang dengan hati yang gembira sekali, sebab ia mendapat lebih banyak dari pada yang diharapkan. Misalnya, mengharapkan f. 1,00,— tetapi mendapat f. 2,50,—; atau mengharapkan f. 2,50,—, tetapi mendapat f. 3.00,—.

Dalam kenyataannya tidak hanya orang miskin saja yang mendapat bantuan dari padanya. Orang-orang yang tergolong mampu pun banyak juga yang pernah mendapat bantuan dari Haji yang saleh itu, terutama pada waktu orang-orang itu masing-masing sedang mempunyai keperluan, misalnya pernikahan atau menyunatkan anaknya.

Terhadap tetangga dekat Haji Samanhudi menunjukkan perhatian yang lebih besar. Setiap kali ada yang meninggal, sakit atau kesusahan di antara mereka, hampir dapat dipastikan bahwa ia datang menjenguk untuk memberi bantuan, menghibur atau menyatakan turut berduka citanya.

Terhadap para pekerjanya, ia juga bersikap baik sekali. Tidak hanya dalam hal pemberian gaji saja, tetapi dalam hal pemberian bantuan pengobatan, tunjangan Lebaran dan sebagainya ia dapat dikatakan sebagai pengusaha yang terbaik juga. Dilihat dari segi yang lain, ia tidak pernah bersikap sebagai tuan terhadap budaknya, atau sebagai bangsawan terhadap hambanya. Terhadap para

pekerja ia selalu bersikap sebagai saudara terhadap saudara atau sebagai bapak terhadap anak. Dengan demikian maka hubungan kerja yang terdapat dalam perusahaannya tidaklah kaku, tetapi luwes, dan diliputi rasa kekeluargaan yang mendalam. Suasana yang sedemikian itu ternyata malahan menimbulkan gairah kerja yang meluap dan prestasi yang tinggi sekali, dan hal inilah yang menyebabkan perusahaan Haji Samanhudi mendapat kemajuan secara cepat serta melebihi perusahaan-perusahaan yang lain..

Terhadap orang-orang Belanda saudagar Laweyan yang terkenal itu tidak mempunyai kebencian yang bersifat rasial. Tetapi terhadap penjajahan Belanda ia memang benci sekali. Kebenciannya itu sedemikian mendalamnya sehingga boleh dikatakan, bahwa ia bersedia berbuat apa saja asal perbuatannya itu dapat merugikan penjajahan tersebut. Sebagai contoh, kepada orang-orang yang melakukan aksi membakari gudang-gudang tembakau milik Belanda di Ceper, Delanggu dan tempat-tempat lain di daerah Surakarta, ia tidak hanya memberi restu atau memberikan persetujuan, tetapi juga memberi bantuan berupa uang untuk bekal dan membeli alat-alat yang diperlukan.

Terhadap orang-orang Cina ia juga tidak membenci secara rasial. Dengan orang Cina yang jujur, sopan atau baik hati ia suka bersahabat. Tetapi terhadap pedagang-pedagang Cina yang serakah dan yang dengan berkelompok melakukan persaingan yang tidak sehat terhadap pedagang-pedagang bumiputera, ia sama sekali tidak senang. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa ia lalu mendirikan Sarekat Dagang Islam.

Ke alamat Susuhunan, H. Samanhudi mempunyai kritik yang sehat dan beralasan. Ia berpendapat, bahwa raja Surakarta itu terlalu bersikap hormat terhadap residen Surakarta. Menurut hematnya Susuhunan adalah khalifah dan khalifah adalah wakil Nabi serta kepala umat Islam. Kalau mengingat umat Islam yang biasa saja tidak boleh menyembah siapa pun selain Tuhan Allah sendiri, maka Susuhunan sebagai khalifah lebih tidak pantas jika ia menyembah orang yang kebetulan menjadi residen pemerintah



Belanda.<sup>16)</sup>

Sebagai suami, H. Samanhudi sangat menaruh kasih kepada dua orang isterinya. Karena itu, kedua orang isterinya itu juga sangat cinta dan berbakti kepadanya. Demikian pula dalam kedudukannya sebagai ayah terhadap para putera-puterinya, H. Samanhudi adalah ayah yang sangat baik dan penuh rasa tanggungjawab. Para putera dan puterinya selalu dididik dengan baik agar mereka dapat menjadi orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan Allah, yang mencintai sesama, yang terpelajar dan yang suka bekerja. Menurut pendapatnya, menganggur adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi bekerja dan belajar adalah perbuatan yang terpuji dan sangat berguna. Karena itu, menurut H. Samanhudi semua orang harus selalu bekerja dan belajar, demikian pula para putera dan puterinya.<sup>17)</sup>

Sebagai pemimpin pergerakan, H. Samanhudi tidak termasuk orang yang pandai berpidato. Tetapi, ia dapat berbicara lancar dan jelas. Kecuali itu, ia tidak biasa berbicara panjang lebar serta muluk; pidatonya selalu singkat dan sederhana saja. Tetapi, meskipun sederhana, pidatonya berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan nyata, sehingga orang tidak dapat membantah kebenaran pernyataan-pernyataannya. Di samping itu, pidatonya selalu disampaikan dengan cara yang mantap dan bersemangat, sehingga para pendengarnya seolah-olah menjadi tidak berdaya dan hanya menyetujui serta melaksanakan gagasan-gagasannya. Dalam hal tulis-menulis, misalnya dalam majalah, rasanya ia tidak mempunyai keahlian. Tetapi oleh wartawan, misalnya oleh Sosro Koonio, yaitu wartawan redaktur *Sarotomo*, ia diakui sebagai sumber gagasan. Wartawan tersebut mengakui bahwa tulisan-tulisannya banyak yang bersumberkan gagasan-gagasan H. Samanhudi.

Dari dua kali pernikahannya Wirjowikoro atau H. Samanhudi memperoleh 9 orang anak, yaitu: Sawab Tjokrowiguno, Ny. Waginah Atmohartono, Sajid Atmosukanto, Sofjan, Sahlan Sastromartono, Slamet Samsulaman, Wagiyah Tjitrohartono, Warsinah



puspoatmodjo dan Samsu Zein (putera dari Marbingah). Jadi puteranya 6 orang dan puterinya 3 orang. Kemudian dari ke sembilan putera itu ia memperoleh 31 orang cucu, yaitu 21 cucu laki-laki dan 10 orang cucu perempuan.

---

## Catatan

- 1) Wawancara dengan:
  - a. Ibu Ny. Atmohartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
  - b. Bapak Sahlan Sastromartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
- 2) L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Panitia Penerbit, Jakarta, 1966, hal. 30–34.
- 3) *Ibid.*, hal. 46–48.
- 4) H.A.R. Gibb, *Islam Dalam Lintasan Sedjarah*, Bhratara, Djakarta, 1960, hal. 145.
- 5) *Ibid.*, *loc.cit.*
- 6) *Ibid.*, hal. 147.
- 7) *Ibid.*, hal. 144.
- 8) Wawancara dengan:
  - a. Bapak Sahlan Sastromartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
  - b. Ibu Atmohartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
- 9) Wawancara dengan:
  - a. Bapak Sahlan Sastrohartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
  - b. Ibu Atmohartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
- 10) Wawancara dengan:
  - a. Bapak Sahlan Sastromartono pada tanggal 29 Agustus 1978.
  - b. Bapak Martidjo tanggal 29 Agustus 1978.
- 11) Wawancara dengan:
  - a. Bapak Sahlan Sastromartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
  - b. Ibu Atmohartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
- 12) Wawancara dengan:
  - a. Bapak Sahlan Sastromartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
  - b. Tamar Djaja, *Orang-orang Besar Indonesia II*, Pustaka Antara, Djakarta, 1974, hal. 61.
- 13) Wawancara dengan:
  - a. Bapak Sahlan Sastromartono pada tanggal 29 Agustus 1978.
  - b. Bapak Martidjo pada tanggal 29 Agustus 1978.
- 14)
  - a. Wawancara dengan Bapak Martidjo pada tanggal 29 Agustus 1978.
  - b. Badan Pembina Pahlawan Pusat, *Pahlawan Pergerakan Nasional*, Departemen Sosial R.I., Djakarta, 1972, hal. 84.
- 15) Wawancara dengan:
  - a. Bapak Martidjo pada tanggal 29 Agustus 1978.
  - b. Bapak Ngadimin Reksowijono pada tanggal 10 Agustus 1978.
- 16) Wawancara dengan:
  - a. Bapak Ngadimin Reksowijono pada tanggal 10 Agustus 1978.
  - b. Bapak Sahlan Sastromartono pada tanggal 29 Agustus 1978.
- 17) Wawancara dengan:
  - a. Ibu Atmohartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
  - b. Sahlan Sastromartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
  - c. Ibu Sadat Atmosukanto pada tanggal 28 Agustus 1978.

### BAB III

## HAJI SAMANHUDI MENJADI SALAH SEORANG PELOPOR KEBANGKITAN POLITIK UMAT ISLAM INDONESIA DAN BANGSA INDONESIA

Kira-kira tahun 1911, di Surakarta ada sebuah perkumpulan dengan nama *Kong Sing*. Perkumpulan ini mempunyai anggota yang terdiri dari dua golongan, yaitu golongan bangsa Jawa dan golongan bangsa Cina. Perkumpulan yang bersifat koperasi ini mempunyai tujuan mengadakan kerjasama dalam bidang usaha, terutama untuk melakukan pembelian dan penjualan bahan-bahan batik, dan untuk melakukan kerukunan dalam urusan kematian. Semula kerukunan dan kerjasama dalam perkumpulan dapat berjalan dengan baik, tetapi kemudian terjadilah perpecahan, sebab anggota golongan Cina yang semula hanya 50 prosen naik menjadi kira-kira 60 prosen dari semua anggota, dan mereka kelihatan hendak menguasai sendiri perkumpulan itu serta kurang memperhatikan para anggota dari golongan bumiputera. Kecuali itu, yang merupakan sebab kedua tetapi tidak kalah pentingnya dengan sebab yang pertama adalah, sikap orang Cina yang menjadi sombong karena berhasilnya revolusi dan lahirnya pemerintahan republik di bawah pimpinan Dr. Sun Yat Sen pada tanggal 1 Januari 1912.

Secara ringkasnya, setelah perpecahan menjadi parah, para anggota yang terdiri dari orang-orang Jawa beranggapan, bahwa keluar dari *Kong Sing* adalah langkah yang paling tepat. Maka keluarlah mereka beramai-ramai untuk kemudian membentuk perkumpulan yang baru dengan nama Sarekat Dagang Islam.<sup>1)</sup>

Sarekat Dagang Islam ini didirikan oleh H. Samanhudi dengan bantuan R.M. Tirtodisurjo.<sup>2)</sup> Tokoh-tokoh lain yang ikut tercatat sebagai pendiri perkumpulan tersebut adalah Sumowardojo, Hardjosumarto, Martodikoro, Wirjotirto, Sukir, Suwandi, Suropranoto dan Djerman. Kecuali sebagai pendiri, delapan orang itu

juga sebagai pengurus angkatan pertama, yang dipimpin langsung oleh H Samanhudi sendiri.<sup>3)</sup>

Tetapi kapan Sarekat Dagang Islam berdiri, belum jelas benar; dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penulis sejarah. Sebagai contoh, menurut Tamar Djaja: tanggal 16 Oktober 1905<sup>4)</sup>, menurut Abu Hanifah M.D.: September 1906<sup>5)</sup>; menurut Deliar Noer: 11 Nopember 1911<sup>6)</sup>, dan menurut residen Surakarta van Wijk: pada awal tahun 1912.<sup>7)</sup> Sementara itu, yang rasanya sudah dapat dipastikan ialah, bahwa Sarekat Dagang Islam yang berdiri di Surakarta itu, semula adalah cabang organisasi sejenis yang berdiri di Bogor.<sup>8)</sup> Pada mulanya dalam tahun 1909 atas usaha R.M. Tirtoadisurjo, di Bogor didirikan sebuah perkumpulan yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), kemudian di Solo berdiri pula SDI, yang menerbitkan surat berkala *Sarotama*. Di samping SDI di Solo juga ada perkumpulan *Darmohatmoko* yang khusus mengurus soal perekonomian.<sup>9)</sup>

Selanjutnya, perlu rasanya kita perhatikan apa yang dilakukan oleh H. Samanhudi dalam proses kelahiran Sarekat Dagang Islam. Dalam rapat pembentukan Sarekat Dagang Islam H. Samanhudi mengucapkan pidato. Pidato ini dapat disebut pidato pengarahan, tetapi di samping itu, pidato ini dapat pula dipandang sebagai pernyataan pikiran dan perasaan, pernyataan jiwa, atau pernyataan cita-cita H. Samanhudi sendiri. Ketika itu ia menyatakan, bahwa di negeri kita ini penduduk dibuat ber-tingkat-tingkat, yang paling tinggi bangsa Belanda, di bawahnya terdapat bangsa Cina, sedang bangsa bumiputera berada di bawah bangsa Cina. Dengan kata lain, bangsa bumiputera adalah bangsa yang dipandang sebagai bangsa yang paling rendah derajatnya, atau bangsa kelas kambing, pada hal mereka hidup di tanah air sendiri. H. Samanhudi juga berkata, bahwa pihak penjajah telah menanamkan jiwa budak pada diri bangsa kita. Hal itu dilakukan dengan maksud, agar bangsa kita dapat dijajah terus. Oleh sebab itu, supaya dapat menjadi bangsa yang mulia, bangsa kita harus dapat membuang jiwa budak tersebut.<sup>10)</sup>

Pidato pengarah H. Samanhudi itu sederhana saja terdengar-



nya, tetapi dilihat dari waktunya mempunyai arti yang luar biasa. Sebab, pada masa itu, penduduk bumiputera tidak saja miskin dan terbelakang, tetapi juga tidak mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dan harga diri. Pidato tersebut, mencerminkan jiwa H. Samanhudi sendiri yang memberontak terhadap keadaan pada waktu itu, atau jiwa yang menghendaki perubahan keadaan sehingga bangsanya yang pada masa itu disebut *Inlander* dan diperbudak oleh bangsa-bangsa lain dapat menjadi tuan di tanah airnya sendiri. Jiwa yang penuh rasa cinta kepada bangsa dan tanah air itu, meskipun dinyatakan dengan cara dan bahasa yang sederhana, telah menimbulkan efek psikologis yang luar biasa. Rakyat bangkit untuk mengubah nasib; dan kebangkitan itu dilakukan oleh rakyat dengan keberanian serta kepercayaan pada diri sendiri yang mulai tumbuh. Para pedagang bumiputera beramai-ramai memasuki perkumpulan yang didirikan oleh H. Samanhudi.

Bertambah banyaknya anggota Sarekat Islam berlangsung secara cepat itu, di antaranya juga disebabkan oleh kegiatan para pengurusnya melebarkan sayap. Salah satu contoh kegiatan melebarkan sayap ini, adalah perjalanan rombongan utusan Sarekat Islam ke Jawa Timur dalam bulan Juni tahun 1912, berikut ini adalah ilustrasi mengenai perjalanan tersebut.

Utusan terdiri dari empat orang, yaitu: R. Atmosuhardjo, R. Sastrosupomo, H. Ismail dan Kasanmidjojo. Pukul 08.00 berangkatlah empat orang itu dengan kereta api cepat ke Surabaya. Pukul 14.00 sampailah mereka di setasiun Surabaya. Dari setasiun ini pergilah mereka ke Toko Saman di Pabean, yaitu tempat mereka menginap.

Sampai di Toko Saman, rombongan beristirahat sebentar. Ketika kelelahan sudah agak berkurang, berangkatlah mereka ke Jagalan. Di Jagalan ini mereka bertemu dengan R. Ng. Sastrodiwirjo, yaitu seorang pensiunan Jaksa, yang dulu pernah berdinasi di Ampenan, Bali. Dalam pertemuan tersebut utusan mengajukan permintaan agar R. Ng. Sastrodiwirjo bersedia meminjamkan rumahnya kepada Sarekat Islam. R. Ng. Sastrodiwirjo tidak

hanya mengabulkan permintaan tersebut, tetapi malahan menyatakan kesediaannya untuk mendirikan Sarekat Islam di Tulungagung dan di Bali.

Pukul 19.30 rombongan pulang, yaitu kembali ke Toko Saman. Perjalanan pulang ini ditemani oleh R. Ng. Sastrodiwirjo. Pukul 21.00 berlangsunglah pelantikan 33 orang anggota baru dalam gedung Toko Saman.

Tanggal 10 Juni 1912, para utusan berjiarah di makam Sunan Ampel untuk mohon restu bagi perkumpulan dan para anggotanya. Di situ para utusan berdoa bersama-sama. Sesaat kemudian datanglah H. Hasan Ali surati dan R. Ng. Sastrodiwirjo untuk menjemput para utusan. H. Hasan Ali Surati adalah direktur perkumpulan Taman Manikam. Maka berangkatlah ke enam orang itu bersama-sama dengan mobil H. Hasan Ali Surati ke gedung pertemuan Taman Manikam.

Dalam suatu pertemuan di gedung Taman Manikam itu para utusan menerima pertanyaan mengenai Sarekat Islam. Sesudah menerima penjelasan, para anggota Taman Manikam menyatakan kesediaan mereka, bahwa akan membantu Sarekat Islam. Pukul 13.00 para utusan pulang.

Pukul 18.30, para utusan dijemput oleh H. Hasan Ali Surati dan dibawa dengan mobilnya ke rumah R. M. Umar Said, yaitu ketua perkumpulan *Panti Harsoyo*. Pada waktu bertemu dengan para utusan, R. M. Umar Said mengajukan pertanyaan tentang tujuan Sarekat Islam. Atas pertanyaan itu para utusan memberikan penjelasan seperlunya dan menunjukkan kepadanya anggaran rumah tangga Sarekat Islam. Ternyata, setelah membaca, R. M. Umar Said segera menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota dan membantu Sarekat Islam. Sesudah pembicaraan dengan R. M. Umar Said selesai, para utusan pulang.

Keesokan harinya, yaitu hari Selasa tanggal 11 Juni 1912, para utusan berjiarah di makam Sunan Giri untuk mohon restu dari arwah wali tersebut. Sesudah itu mereka pulang, dan sampai di Pabean pukul 16.00.

Pukul 20.30 pergilah rombongan ke Plampitan. Di kampung ini berlangsunglah pelantikan anggota baru. Yang dilantik adalah: H. Hasan Ali Surati dan R. M. Said. Dalam pertemuan tersebut para utusan menunjukkan tanda-tanda pengenalan serta tujuan Sarekat Islam kepada: R. Tjokrosudarmo, Mas Suwongso, Mas Rujan, yaitu para pengurus perkumpulan *Panti Harsoyo* dan *Setiyo husodo*.

Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 1912, siang, rombongan mendapat undangan dari H. Hasan Ali Surati. Pukul 22.00 mereka diajak ke bioskop untuk melihat film perang Itali-Turki. Demikian permutaran film selesai, mereka kembali ke rumah Hasan Ali Surati.

Baru saja beristirahat, dari rumah H. Hasan Ali Surati para utusan pergi ke rumah R.M. Umar Said Tjokroaminoto. Di rumah ini mereka juga bertemu dengan pensiunan patih Magetan. Seperti biasanya kesempatan ini oleh para utusan dipergunakan untuk mempropagandakan Sarekat Islam. Ketika itu kelihatan sekali bahwa sebenarnya pensiunan patih tua itu tertarik juga kepada Sarekat Islam. Tetapi, karena usianya memang sudah lanjut, terpaksa ia tidak dapat memenuhi permintaan para utusan, agar ia menjadi anggota Sarekat Islam. Ia hanya dapat memberi restu saja.

Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 1912, rombongan dipedih menjadi dua. R. Atmosuhardjo dan R. Sastrosupomo pergi ke Pasuruan, untuk minta kepada Letnan orang-orang Arab di kota tersebut agar ia dan orang-orang Arab yang di bawah pimpinannya mau memberi bantuan kepada Sarekat Islam. Adapun H. Ismail dan Kasanmidjojo pergi ke Kediri dan Tulungagung.

Tetapi petugas yang ke Pasuruan itu, tidak dapat dengan segera bertemu dengan pihak yang dimaksudkan, sebab yang hendak ditemui masih pergi. Kedua orang tersebut diminta agar kembali pada malam harinya. Waktu menunggu yang terluang itu dipergunakan oleh kedua orang utusan menemui bupati setempat. Pertemuan dengan kepala daerah ini ternyata berlangsung dengan



asyiknya. Ketika itu bupati tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai Sarekat Islam. Kecuali itu ia juga menyatakan pendapatnya, bahwa setiap perkumpulan mempunyai tujuan yang tepat, dan bahwa jika salah satu anggotanya tidak pandai membawa diri maka mungkin seluruh perkumpulan tidak mendapat kepercayaan. Selanjutnya, ia memberi nasihat, supaya pengurus Sarekat Islam lebih dulu membereskan segala urusan yang menyangkut perkumpulan di Surakarta; supaya pengurus pandai-pandai memimpin para anggotanya, dan supaya pengurus segera mendirikan perkumpulan dagang. Jika segalanya itu sudah beres, maka tidak akan ada kesukaran mendirikan cabang di Pasuruan. Akhirnya, bupati itu memberi nasihat pula, agar para pengurus mengambil contoh dari perkumpulan orang Eropa yang berkembang.

Pada malam harinya, kedua anggota rombongan pergi ke rumah Letnan orang-orang Arab. Dalam pertemuan dengan kedua anggota rombongan itu menyatakan dengan segala sesuatu mengenai Sarekat Islam. Di antara pertanyaan yang diajukan ialah, apakah Sarekat Islam sudah mendapat pengakuan badan hukum, dan apakah presiden perkumpulan mengetahui hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab, bahwa Sarekat Islam Surakarta adalah cabang sebuah perkumpulan yang berkedudukan di Bogor, bahwa Sarekat Islam di Surakarta sudah mendapat ijin dari asisten Residen Surakarta, dan bahwa R. M. Tirtodisuryo mempunyai kedudukan sebagai penasehat dan selalu memberi nasihat jika diperlukan. Setelah pertemuan selesai, para utusan Sarekat Islam kembali ke penginapan.

Pada hari berikutnya, yaitu Sabtu tanggal 15 Juni 1912, para utusan menghadap patih. Patih ini ternyata menyetujui tujuan Sarekat Islam. Dari rumah patih mereka lalu pergi ke rumah bupati untuk minta diri. Dalam pertemuan ini bupati memberikan nasihat-nasihatnya lagi.

Keesokan harinya berangkatlah R. Atmosuhardjo dan R. Sastrosupomo ke Tulungagung untuk membantu serta berkumpul



lagi dengan H. Ismail dan Kasanmidjojo. Akhirnya, Senin tanggal 17 Juni 1912, pulanglah semua anggota rombongan bersama-sama ke Surabaya.

Contoh lain dari kegiatan Sarekat Islam memperbanyak anggota adalah apa yang dilakukan perkumpulan tersebut dalam bulan serta tahun tersebut tidak kurang dari 2.000 orang anggota baru diterima dan 'disumpah menjadi anggota baru'.<sup>11)</sup>

Pendek kata, Sarekat Islam yang dipimpin H. Samanhudi tumbuh dengan cepatnya menjadi perkumpulan yang besar dengan anggota yang banyak jumlahnya. Anggotanya tidak hanya terbatas pada para pedagang batik saja, tetapi meliputi segala jenis pedagang bumiputera, malahan juga rakyat pada umumnya. Sejalan dengan berkembangnya perkumpulan itu secara kuantitatif maupun kualitatif, kata "*dagang*" pada namanya berangsur-angsur kehilangan arti, sehingga nama Sarekat Dagang Islam disebut Sarekat Islam saja, padahal nama Sarekat Islam itu baru mendapat pengesahan dalam anggaran dasarnya pada tanggal 10 September 1912.

Tumbuhnya Sarekat Islam menjadi perkumpulan yang besar secara pesat itu dapat dipandang sebagai pertanda bangkitnya masyarakat bumiputera di Hindia Belanda yang ingin mendapat pembaharuan dalam segala lapangan. Hal itu adalah berkat jasa H. Samanhudi.

Tetapi pertumbuhan itu menimbulkan perasaan khawatir di kalangan orang Cina. Sebab, orang-orang Cina itu sadar dan ingat, bahwa lahirnya perkumpulan tersebut terutama sebagai reaksi terhadap para pedagang Cina yang selalu berusaha memegang monopoli dalam perdagangan. Dengan demikian suasana permusuhan di antara para anggota Sarekat Islam di satu pihak dan orang-orang Cina di pihak lain tidak dapat dihindari lagi, di mana sering terjadi perkelahian di antara orang-orang dari kedua pihak; malahan tidak jarang terjadi perkelahian antara kelompok dengan kelompok. Perkelahian-perkelahian itu di antaranya terjadi di Surakarta, Surabaya, Semarang dan Kudus.<sup>12)</sup> Di antara per-

kelahiran di Surakarta itu malahan ada juga yang sampai melibatkan serdadu Jawa dan Legiun Mangkunegaran, yang memihak pada anggota Sarekat Islam turut menghantam orang-orang Cina.<sup>13)</sup>

Sampai di sini lalu timbul dugaan pada kita bahwa Sarekat Islam adalah suatu gerakan rasialis yang semata-mata anti orang Cina. Penelitian lebih lanjut mengenai perkumpulan yang didirikan oleh H. Samanhudi itu akan memberikan bukti-bukti kepada kita bahwa perkumpulan tersebut tidak bersifat rasialis, tetapi bersifat nasionalis, demokratis, religius dan ekonomis. Sifat rasialis tidak sesuai dengan kepribadian pendiri yang sekaligus pemimpinnya, yaitu H. Samanhudi. Tokoh yang bijaksana ini mempunyai banyak kenalan orang-orang Cina.

Bahwa Sarekat Islam tidak anti Cina dapat diterangkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

*Pertama*, pada awal bulan Agustus 1912 terjadilah pemogokan buruh *onderneming* di Krapyak. Ini adalah pemogokan yang pertama di tanah air kita, dan ini adalah pertanda bangkitnya rasa kebangsaan dan harga diri di kalangan bangsa kita.<sup>14)</sup>

*Kedua*, di tempat dan pada waktu yang sama dengan apa yang sudah disebutkan di atas, orang-orang bumiputera yang sudah menjadi anggota Sarekat Islam berani memberi perlawanan perlakuan tidak adil dari Asisten Residen dan Wakil Sunan.<sup>15)</sup>

*Ketiga*, menjelang berlangsungnya pesta orang-orang Cina pada tanggal 28 dan 29 Mei 1912, H. Samanhudi sebagai Presiden Sarekat Islam mengeluarkan edaran yang isinya lebih kurang sebagai berikut:

1. Jika terjadi perlakuan yang tidak baik dari pihak orang-orang Cina, para anggota diwajibkan tetap tenang dan mengalah. Jika sikap mengalah para anggota itu menyebabkan orang-orang Cina malah menjadi congkak, hal itu wajib melapor kepada polisi.
2. Selama berlangsungnya pesta itu dipandang perlu adanya kegiatan perondaan yang dilakukan oleh para anggota di bawah pimpinan para anggota pengurus Sarekat Islam.<sup>17)</sup>

Berkat kebijaksanaan pengurus Sarekat Islam di bawah pimpinan H. Samanhudi seperti yang sudah diterangkan di muka, maka pesta orang-orang Cina dapat berjalan dengan meriah dan aman.<sup>18)</sup>

Tetapi, mungkin karena khawatir kalau bentrokan-bentrokan di antara para anggota Sarekat Islam dengan orang-orang Cina itu bertambah besar dan akhirnya melibat serta membahayakan kedudukan pemerintah kolonial, Residen Surakarta mengundang Pemerintah Kasunanan dan Presiden Sarekat Islam H. Samanhudi untuk berapat. Dalam rapat itu Residen menyatakan, bahwa Sarekat Islam dilarang menerima anggota baru dan dilarang mengadakan rapat. Pendek kata, Sarekat Islam diskors. Hal itu terjadi pada tanggal 10 Agustus pukul 11.00 tahun 1912.<sup>19)</sup> Residen Surakarta van Wijk menganggap "pemberontakan" SI terhadap Cina itu sangat berbahaya, oleh karena itu ia memerintahkan Mangkubumi supaya melarang aktivitas SDI.

Sesudah melakukan penyekorsan terhadap Sarekat Islam, Residen segera memberi perintah kepada pejabat-pejabat bawahannya untuk melakukan penyelidikan mengenai kegiatan-kegiatan perkumpulan tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi penyelidikan yang dilakukan oleh Asisten Residen Surakarta dengan bantuan pejabat-pejabat lainnya.

Pada tanggal 10 Agustus 1912, atas perintah Residen Surakarta van Wijk, maka Asisten Residen Hartvelt, bersama dengan Komisarisi Polisi, Bupati Polisi, Kliwon Polisi, Penewu dan Camat Laweyan telah melakukan pengeledahan terhadap rumah-rumah anggota pengurus Sarekat Islam untuk menemukan surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan perkumpulan. Pengeledahan tersebut disaksikan oleh Presiden H. Samanhudi, Sekretaris Pertama R. Ng. Djojomargoso, dan oleh pengurus yang lain, jika hal itu menyangkut rumah mereka masing-masing.

Mula-mula, para petugas pergi ke rumah H. Samanhudi di Laweyan. Di rumah itu ditemukan beberapa helai kertas yang berisi peraturan perkumpulan dan surat undangan rapat.



Sesudah itu, para petugas pergi ke kantor perkumpulan di Purwosari, yang juga berkedudukan sebagai kantor majalah *Sarotomo*, yaitu majalah yang dikeluarkan oleh Sarekat Islam yang dicetak oleh firma Bunning, Jogyakarta sebagai majalah Sarekat Islam. Di situ diketemukan peraturan-peraturan yang dicetak, daftar anggota perkumpulan, buku catatan nama-nama langganan majalah *Sarotomo*, surat selebaran yang dicetak, blanko surat permintaan menjadi anggota, surat permintaan pinjam uang dari Sarekat Islam, permintaan tempat-tempat lain untuk menjadi anggota dan kertas-kertas lain yang kurang penting, misalnya: rekening alat tulis-menulis yang sudah terbayar, daftar harga dan sebagainya.

Penyelidikan berikutnya dilakukan di sebuah rumah bambu yang terletak di dekat kantor, yaitu rumah sekretaris kedua Hardjosumarto, seorang penganggur yang cukup miskin. Di situ ditemukan sebuah meja persegi rendah yang di atasnya terdapat surat-surat yang berhubungan dengan perkumpulan dalam keadaan kacau. Di atas meja tersebut terdapat pula barang-barang yang kurang penting, misalnya: kertas-kertas berisi peraturan, buku tulis yang tak bergaris dan sebagainya..

Dari rumah Hardjosumarto para petugas melanjutkan penyelidikan di sebuah rumah bambu sederhana yang terletak jauh dari jalan besar di Sayangan kulon. Rumah tersebut adalah rumah Kartowiharjo bendahara perkumpulan. Orang ini hidup dari perdagangan kecil-kecilan kain cap. Pada waktu diadakan penggeledahan di rumahnya, hanya dapat ditemukan buku kas yang dikerjakan secara sederhana dan selalu dibawa ke mana-mana. Dalam buku kas tersebut terdapat catatan adanya uang perkumpulan paling sedikit f. 2.500,— berasal dari 35.000 orang anggota dalam karesidenan Surakarta.

Selanjutnya para pembesar Belanda yang sedang bertugas itu menuju sebuah kantor milik seorang haji kaya di dekat Coyudan. Haji tersebut adalah calon bendahara kedua dan calon pengurus usaha dagang perkumpulan yang hasilnya untuk perkumpulan. (Hal yang kedua itu dapat terlaksana jika perkumpulan dapat



memberi modal sebesar f. 500.000,—) Di rumah haji itu tidak diketemukan surat-surat yang ada kaitannya dengan Sarekat Islam.

Penyelidikan juga dilakukan di sebuah rumah orang bumi-putera yang terletak di tepi jalan dalam kampung Laweyan, tempat penyumpahan orang-orang yang hendak menjadi anggota Sarekat Islam pada hari-hari tertentu pada malam hari. Tetapi di tempat itu tidak ditemukan apa pun juga.

Akhirnya diadakan pengeledahan di rumah penulis pertama perkumpulan, R. Ng. Djojomarsogo, seorang mantri Kalang yang bertempat tinggal di Sorogenen Keparakan Tengen. Di situ hanya ditemukan blanko obligasi dan saham yang akan dikeluarkan.

Setelah penyelidikan berakhir, para petugas menarik kesimpulan, bahwa Sarekat Islam adalah suatu perkumpulan yang tidak mempunyai maksud-maksud yang dirahasiakan. Kesimpulan itu didasarkan kenyataan, bahwa selama penyelidikan atau pengeledahan dilakukan, segala sesuatunya telah ditunjukkan oleh para pengurus dengan cara ikhlas dan tidak terlihat tanda-tanda adanya percobaan untuk menyembunyikan surat-surat rahasia-rahasia lain. Hasil penyelidikan itu, sesudah dipelajari dan disusun, lalu dilaporkan kepada Residen Surakarta dengan surat yang tertanggal 22 Agustus 1912.<sup>20)</sup>

Laporan tersebut disertai lampiran-lampiran yang berupa surat-surat penting, yang dapat menggambarkan bagaimana cara kerja Sarekat Islam. Lampiran-lampiran tersebut adalah:

1. Sebuah surat edaran yang memuat aturan-aturan perkumpulan, yang harus ditaati oleh para anggota selama pesta orang-orang Cina.
2. Sebuah surat dari Wirjaprajoga, seorang presiden kelompok, kepada pengurus Sarekat Islam mengenai usaha pemerasan uang oleh orang Cina.
3. Sebuah laporan perjalanan utusan yang terdiri dari anggota Sarekat Islam ke Surabaya, dan tempat-tempat lain di Jawa Timur. (Isi laporan ini sudah disampaikan di bagian muka sebagai ilustrasi).

Kecuali ketiga buah surat itu disertakan juga surat-surat lain, misalnya Surat yang berisi usul untuk mengadakan dana penguburan, permintaan keterangan mengenai masalah sipil yang sukar dan sebagainya.<sup>21)</sup>

Anggapan bahwa Sarekat Islam bukan perkumpulan yang berbahaya, tidak hanya ada pada Residen Surakarta, tetapi juga pada Patih Kraton Surakarta. Oleh sebab itu, pada tanggal 17 Agustus 1912 pembesar kraton tersebut mengajukan permohonan kepada residen agar penskorsan terhadap perkumpulan tersebut segera dicabut.<sup>22)</sup>

Sementara itu, H. Samanhudi sebagai Presiden Sarekat Islam selalu berusaha agar pencabutan sekorsan dapat dipercepat. Dalam hubungan ini, H. Samanhudi memberi keterangan kepada para pengurus, bahwa perubahan anggaran dasar perlu diadakan, agar hambatan yang datang dari pihak pemerintah dapat diatasi dan perkumpulan segera dapat bekerja kembali. Sesuai dengan kemauan pemerintah, dalam anggaran dasar baru yang akan dibuat itu harus dinyatakan, antara lain, bahwa yang dapat menjadi anggota Sarekat Islam hanyalah penduduk Surakarta, bahwa penerimaan anggota harus bersifat selektif, dan bahwa pengawasan keuangan harus dilakukan secara ketat.<sup>23)</sup>

Sikap H. Samanhudi yang demikian itu tidak dapat kita nilai sebagai sikap yang lemah atau kompromis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tetapi sikap itu lebih tepat rasanya jika dinilai sebagai sikap yang realistik, yaitu sikap yang berpijak pada kenyataan yang ada pada masa itu. Sikap itu timbul dari kesadaran, bahwa ia, yaitu H. Samanhudi, hidup dalam tahap permulaan pergerakan bangsanya. Pemimpin pergerakan yang hidup dalam tahap permulaan proses pergerakan bangsa seperti H. Samanhudi itu harus menyadari, bahwa masalah terpenting yang dihadapi dan harus dipecahkan terutama adalah: bagaimana caranya membuat bangsanya menyadari betapa pentingnya menyatukan diri dalam satu organisasi dan kemudian berjuang bersama-sama untuk memperbaiki nasib bersama. Kalau dalam tahap permulaan itu "sikap

keras dan kaku" yang diambilnya, maka pergerakan yang dipimpinnya akan mengalami nasib "mati muda". Alangkah besar kerugian bangsa bumiputera jika Sarekat Islam mengalami nasib mati muda! Demikian pertimbangan pemimpin dan pendiri Sarekat Islam, H. Samanhudi.

Dalam pada itu, pada tanggal 26 Agustus 1912 sampailah di tangan Patih Surakarta sebuah surat yang berasal dari para ketua Kelompok Sarekat Islam Surakarta.

Isi surat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sejak berdirinya Sarekat Islam, keamanan di kampung-kampung bertambah baik sebab pencurian, kejahatan atau pelanggaran, seperti perzinahan dan lain-lain tidak ada lagi. Kecuali itu, penduduk kelihatan bersatu dan selalu bekerja sama dengan polisi.
2. Pada waktu rencana mendirikan sebuah persatuan toko baru saja akan berhasil, datanglah keterangan dari pengurus Sarekat Islam, bahwa mulai tanggal 10 Agustus 1912 Sarekat Islam tidak boleh menerima anggota baru.
3. Pada awal Puasa para anggota Sarekat Islam mendapat keterangan dari polisi, bahwa Sarekat Islam sudah dibubarkan oleh Patih Surakarta, dan para penduduk dilarang berapat. Larangan itu seolah-olah dengan tujuan untuk meningkatkan ketenangan, ketertiban dan perdagangan. Kecuali itu, dalam larangan tersebut terdapat penegasan, bahwa jika sampai terjadi pelanggaran, para ketua kelompok harus mempertanggungjawabkan kepada polisi.
4. Tidak lama sesudah adanya pengumuman dari polisi mengenai pembubaran Sarekat Islam, dalam 2 hari di 3 tempat, yaitu Laweyan, Pasar Kliwon dan Serengan ada orang-orang Jawa yang disiksa orang-orang Cina.
5. Sarekat Islam telah banyak melakukan hal-hal yang menguntungkan pemerintah atau kraton, antara lain berupa pembelian alat-alat untuk memberi bantuan jika



terjadi kebakaran, misalnya: ember, kain-kain pel, kait-kait dan sebagainya, yang sudah terkumpul cukup banyak; malahan untuk pembelian lebih lanjut, masih tersedia uang di kas perkumpulan.

Surat tersebut diakhiri dengan pengharapan, agar Sarekat Islam boleh bekerja kembali, dan agar penduduk dapat menikmati kesejahteraan terutama keamanan yang lebih banyak.

Segera setelah menerima surat tersebut, Patih kraton Surakarta melakukan perundingan dengan Residen Surakarta. Dalam perundingan itu kedua belah pihak setuju jika sekorsan terhadap Sarekat Islam segera dicabut. Demikianlah, pada hari itu juga, yaitu tanggal 26 Agustus 1912, Sarekat Islam dinyatakan boleh aktif kembali dengan persyaratan seperti yang sudah disebutkan di muka, yaitu, anggaran dasar harus diubah, hanya orang Surakarta yang boleh menjadi anggota dan keuangan perkumpulan supaya diurus lebih baik.<sup>24)</sup>

Jelaslah bahwa persyaratan tersebut merupakan hambatan. Tetapi hambatan itu tidak melemahkan semangat para anggota Sarekat Islam yang sudah digembleng oleh H. Samanhudi, sebaliknya malahan menjadi pendorong bagi mereka untuk menyusun organisasi yang lebih baik lagi.

Haji Samanhudi segera mengadakan konsolidasi. Dalam usahanya ini, ia berhasil menemukan tokoh yang tepat untuk disertai memimpin perjuangan selanjutnya. Tokoh ini adalah Umar Said Tjokroaminoto. Di bawah pimpinannya SDI kelak mengalami perubahan, yang tadinya hanya bergerak di bidang perdagangan sekarang diperluas lagi dengan nama Sarekat Islam.<sup>24 a)</sup>

Dalam hubungan itu, khususnya dalam penyusunan anggaran dasar, H. Samanhudi menugaskan U.S. Tjokroaminoto untuk melaksanakannya. Ketika itu, dengan alasan agar perkumpulan tidak hanya terbatas pada kaum pedagang saja, U.S. Tjokroaminoto mengusulkan agar kata "Dagang" yang terdapat pada nama perkumpulan dihilangkan, dan dengan demikian perkumpulan hanya bernama Sarekat Islam saja.<sup>25)</sup>



Maka, pada tanggal 10 September 1912, dengan akte Notaris B. ter Kuile, ditetapkanlah anggaran dasar Sarekat Islam. Dalam akte tersebut disebutkan pula, bahwa U.S. Tjokroaminoto menjadi wakil 11 orang yang tinggal di Surakarta yang di antaranya bernama H. Samanhudi.<sup>26)</sup>

Menurut anggaran dasar tersebut, tujuan Sarekat Islam sebagai berikut:

1. Memajukan perdagangan.
2. Memberikan pertolongan kepada para anggota yang mendapat kesukaran.
3. Memajukan kepentingan jasmani dan rokhani kaum bumi-putera.
4. Memajukan kehidupan agama Islam.<sup>27)</sup>

Selanjutnya Sarekat Islam juga bertujuan:

- a. Menyusun masyarakat Islam, agar bisa hidup berkumpul menjadi saudara.
- b. Menggerakkan hati umat Islam supaya bersatu dan bertolong-tolongan.
- c. Di dalam lingkungan dan batas undang-undang negara, melakukan segala daya upaya untuk mengangkat derajat rakyat, guna kesentausaan dan kemakmuran tumpah darahnya.<sup>28)</sup>

Dari tujuan di atas jelas bahwa Sarekat Islam merupakan gerakan sosial non politik. Tindakan ini diambil karena adanya *Regerings Reglement* artikel 111 yang melarang keras organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulannya yang bersifat politik.<sup>29)</sup>

Pada tanggal 14 Septem 1912, anggaran dasar tersebut dimintakan pengesahan dari pemerintah. Permintaan ini ternyata tidak segera dikabulkan oleh pemerintah, sebab Gubernur Jendral membutuhkan waktu kira-kira enam bulan sebelum mengambil putusan. Waktu yang sekian lamanya ini menurut Gubernur Jendral akan dipakai untuk mendengarkan nasehat dari para

pejabat bawahannya.<sup>30)</sup>

Sementara itu Sarekat Islam terus mengadakan propaganda yang mendapat sambutan rakyat, karena Sarekat Islam menggunakan daya penarik yaitu agama Islam dan memperjuangkan nasib rakyat. Sarekat Islam membela persoalan yang menjadi tekanan dan penderitaan rakyat waktu itu ialah soal gaji buruh, sewa-menyewa tanah dan perdagangan.

Dengan jalan ini Sarekat Islam berkembang sangat cepat. Dalam waktu yang singkat Sarekat Islam Batavia saja telah mempunyai anggota sebanyak 12.000 orang.<sup>31)</sup>

Meskipun pada waktu itu (1912) perkumpulan politik masih dilarang oleh undang-undang, tetapi Sarekat Islam dapat maju dengan cepat dan mengembangkan sayapnya ke seluruh Indonesia. Beratus-ratus ribu rakyat dari segala golongan datang berlindung di bawah panji Sarekat Islam, seolah-olah perserikatan ini suatu pondok umum, tempat segala orang mengadukan keluh-kesahnya dan penderitaannya.

Sekarang, timbul pertanyaan pada kita, bagaimana cara Sarekat Islam mengatur komunikasi di dalam dirinya. Mengingat kurangnya anggota yang tahu membaca dan menulis, komunikasi di dalam Sarekat Islam diatur secara unik tetapi efektif sekali. Hubungan langsung dengan surat edaran, sudah barang tentu, tidak mungkin. Oleh karena itu, para anggota terbagi-bagi dalam beberapa kelompok, yang kebanyakan menurut kampung, dan masing-masing kelompok itu mempunyai ketua atau presiden yang dapat berhubungan langsung dengan pengurus. Jika ketua kelompok bermaksud memberi informasi kepada para anggota, maka ditempelkan kertas-kertas berwarna di berbagai tempat, misalnya di pohon, di rumah dan sebagainya. Kertas hitam berarti bahwa salah seorang anggota telah kecurian dan memerlukan bantuan polisi. Kertas kuning berarti bahwa salah seorang anggota berada dalam kesukaran. Kertas biru berarti bahwa ada orang yang perlu diboikot. Kertas merah berarti ada dua orang anggota yang berselisih dan perlu dibantu menyelesaikan perselisihan mereka.

Jika terlihat ada kertas berwarna ditempelkan, biasanya para anggota lalu pergi ke rumah ketua kelompok untuk minta keterangan atau memberi laporan.<sup>32)</sup> Dengan sistem komunikasi yang sedemikian itu Sarekat Islam di bawah pimpinan H. Samanhudi dapat bekerja dengan lancar.

Adapun faktor pengikut yang dapat menyatukan para anggota Sarekat Islam sehingga mereka selalu merupakan kesatuan gerak dan langkah adalah, pertama: agama Islam, yaitu agama yang dipeluk oleh semua anggotanya, dan kedua: adanya pimpinan yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat kebanyakan, yaitu golongan yang besar dalam keanggotannya.

Pada masa itu para pemimpin Sarekat Islam selalu berjuang untuk kenaikan upah bekerja, membela para petani penguasa tanah dari cekikan sewa tanah yang terlampau tinggi, membela rakyat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari kepala desa dan sebagainya. Karena langkah-langkah yang sedemikian itu maka Sarekat Islam yang dipimpin H. Samanhudi senantiasa dalam kekompakan gerak dan memperoleh popularitas di kalangan rakyat.<sup>33)</sup>

Demikianlah organisasi dan perjuangan Sarekat Islam di bawah pimpinan H. Samanhudi. Mudah difahami bahwa gerak dan langkah Sarekat Islam tersebut, telah membangkitkan kesadaran politik umat Islam dan bangsa Indonesia seluruhnya pada awal abad ke-20 ini. Itu berarti bahwa Sarekat Islam, khususnya H. Samanhudi, telah menjadi salah satu pelopor kebangkitan politik di kalangan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia.

## Catatan

- 1) a. Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto, *Hidup dan Perdjoangannya*. Bulan Bintang, Jakarta, 1952, hal. 91.  
b. Wawancara dengan Bapak Reso Ramli pada tanggal 24 Agustus 1978.
- 2) Amelz, *op.cit.*, hal. 89.  
Sartono Kartodirdjo dkk., *Sarekat Islam lokal*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber Sejarah no. 7, Jakarta, 1975, hal. 127 dan 330.
- 3) Taman Djaja, *Orang-orang Besar Indonesia, II*, Pustaka Antara, Jakarta, 1974, hal. 61–62.
- 4) *Ibid.*, hal. 61.
- 5) Abu Hanifah, *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang*, Yayasan Idayu, 1978, hal. 19.
- 6) *Budaya Jaya*, Mei 1978, hal. 310.
- 7) Sartono Kartodirdjo dkk., *op.cit.*, hal. 330.
- 8) *Ibid.*, hal. 337.
- 9) L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Panitia Penerbit, Jakarta, 1966, hal. 327–332.
- 10) Tamar Djaja, *op.cit.*, hal. 62.
- 11) *Ibid.*, hal. 327.
- 12) *Ibid.*, hal. IX.
- 13) Amelz, *op.cit.*, hal. 92.
- 14) *Ibid.*, hal. 94.
- 15) Sartono Kartodirdjo dkk., *op.cit.*, hal. 327.
- 16) *Ibid.*, hal. 329.
- 17) *Ibid.*, hal. 334–335.
- 18) *Ibid.*, hal. 327.
- 19) *Ibid.*, *loc.cit.*,
- 20) *Ibid.*, hal. 332–333.
- 21) *Ibid.*, hal. 328.
- 22) *Ibid.*, hal. 327.
- 23) *Ibid.*, *loc.cit.*
- 24) *Ibid.*, hal. 337 dan 332.
- 24a) Jahja Dimjati, "Peranan Sarekat Islam dalam menanamkan kesadaran Nasional di Indonesia", Kertas kerja dalam Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970, hal. 14–24.
- 25) Wawancara dengan Bapak Reso Ramli pada tanggal 24 Agustus 1978.
- 26) Amelz, *op.cit.*, hal. 88.
- 27) Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia* P.T. Pembangoenan Jakarta, 1070, hal. 27.



- 28) K.H. Sapari, *Naskah Setengah Abad Perjuangan PSII*.
- 29) George Mc. Turman Kahin, *op.cit*, p. 29.
- 30) D.M.G. Koch, *Menoedjoe Kemerdekaan*, terjemahan Abdoel Moeis, Jajasan Pembangunan, Djakarta.
- 31) *Ibid.*, hal. 28.
- 32) Sartono Kartodirdjo dkk., *op.cit.*, hal. 331–332.
- 33) D.M.G. Koch, *op.cit.*, hal. 27.

## BAB IV

### HAJI SAMANHUDI MEMANTAPKAN ORGANISASI SAREKAT ISLAM

Sebagaimana kita ketahui, sejak berdirinya, Sarekat Islam selalu tumbuh dan makin lama makin besar. Tetapi, khususnya pada waktu terjadi pengeledahan di rumah-rumah para pengurus oleh para pembesar Belanda, tampaklah pada kita betapa lebarnya jurang yang terletak di antara kebesaran dan kualitas organisasi perkumpulan tersebut. Di samping itu kita lihat pula adanya hambatan-hambatan yang kalau tidak segera diatasi, dapat mengganggu perkembangan perkumpulan. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka pada tanggal 25-26 Januari 1913, Sarekat Islam mengadakan rapat besar atau kongres di Surabaya untuk memantapkan organisasi guna memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Berikut ini adalah ilustrasi mengenai kongres tersebut:

Pada tanggal 25 Januari 1913, pukul 13.30, sampailah di Surabaya para utusan Sarekat Islam Ngawi, Madiun, Ponorogo, dan utusan Rekso Soengkowo, Nganjuk. Dari setasiun para utusan ini dibawa untuk dipertemukan dengan U.S. Tjokroaminoto di kantor surat kabar *oetoesan Hindia*.

Pukul 15.30 tibalah pula dengan kereta api cepat NIS utusan cabang Semarang. Mereka juga dibawa dan kemudian dipertemukan dengan U.S. Tjokroaminoto.

Pukul 18.30 banyak anggota Sarekat Islam yang pergi ke setasiun untuk menjemput para utusan yang lain, terutama H. Samanhudi yaitu Pendiri dan Ketua Sarekat Islam. Pukul 19.00 penjemput yang terdapat di dalam dan di luar stasiun mencapai jumlah kira-kira 5.000 orang.

Di peron terdapat korps musik. Ketika kereta api kilat dari Surakarta masuk, pukul 20.00, korps musik itu memainkan sebuah

lagu untuk menghormati tamu yang datang. Sementara itu, terdengarlah sorak-sorai suara para penjemput sebagai pertanda kegembiraan mereka atas kedatangan para utusan, terutama kedatangan tokoh yang sangat mereka hormati dan cintai, H. Samanhudi. Kemudian, ketika tokoh yang sangat mereka nantikan kedatangannya itu tampak, dengan serta merta para penjemput pun segera berjalan menghampiri tokoh-tokoh tersebut sambil berdesak antara yang satu dengan yang lain. Hal itu hampir-hampir menyebabkan, sejak dari kereta api sampai di mobil yang tersedia, H. Samanhudi lebih menyerupai orang yang sedang didukung dari pada orang yang sedang berjalan.<sup>1)</sup>

Begitulah kecintaan rakyat kepada H. Samanhudi. Jelaslah bahwa kecintaan itu tidak timbul dari hubungan pribadi yang akrab, sebab nyatanya sebagian besar dari mereka tidak mengenal H. Samanhudi secara pribadi. Kecintaan itu timbul, dan kemudian menjadi mendalam, karena H. Samanhudi, yang selalu memberikan pikiran, tenaga dan hartanya kepada Sarekat Islam itu, oleh mereka dipandang sebagai perwujudan perjuangan untuk mencintai cita-cita mereka, yaitu tercapainya masyarakat yang dapat memberikan kebahagiaan lahir batin kepada mereka.

Selanjutnya, H. Samanhudi, bersama dengan para utusan Sarekat Islam yang lain-lain, bersama pula dengan utusan Muhammadiyah Yogyakarta, diikuti oleh para utusan Sarekat Islam Surabaya, dengan kendaraan 15 buah mobil dan 30 buah kereta dibawa menuju gedung pertemuan Taman Manikam. Ketika itu, di sepanjang jalan, dari setasiun sampai di gedung pertemuan Taman Manikam, terdapat banyak orang yang melihat arak-arakan itu.

Sesampai di gedung Taman Manikam, para utusan yang datang dari luar kota itu disambut oleh para utusan Surabaya yang diwakili oleh U.S. Tjokroaminoto. Setelah makan sekedarnya, semua utusan itu pergi ke kantor Oetoesan Hindia untuk menghadiri kongres.

Kongres tersebut berlangsung mulai pukul 21.30 dan berakhir pukul 11.30. Pimpinan sidang dipegang oleh U.S. Tjokroaminoto.

Pada awal sidang dibacakan telegram yang berasal dari Kartosudirdjo, Bondowoso. Telegram ini berisi pemberitahuan, bahwa pengirim tidak dapat hadir, dan bahwa ia hanya mengirimkan do'anya yang keluar dari hati yang tulus. Kemudian dibacakan pula telegram, yang dikirimkan oleh Wignjadisastra, Bandung. Sesudah itu, dibacakan surat yang berasal dari pengurus besar Budi Utomo, Yogyakarta. Dalam surat ini Budi Utomo menerangkan, bahwa pihaknya tidak dapat mengirimkan utusan. Sementara itu, para utusan Muhammadiyah dan Reksosoengkowo minta diri dari sidang, sebab menurut pendapat mereka, sidang tersebut hanya akan membicarakan masalah intern Sarekat Islam, sehingga pihak lain tidak patut menghadirinya.

Adapun hasil yang dicapai oleh sidang tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Sarekat Islam menetapkan peraturan yang sama bagi semua cabang.<sup>2)</sup>
2. Sarekat Islam menetapkan organisasinya demikian: Perhimpunan Sarekat Islam ialah suatu organisasi yang mempunyai wilayah segenap Hindia Timur (sebutan untuk Indonesia); yang boleh menjadi anggota yaitu sekalian orang Islam yang terkenal baik adat perlakuan-nya.

Di tiap tempat yang jumlah anggotanya sudah dianggap cukup, bolehlah didirikan suatu cabang (*afdeeling*), yang memilih pengurusnya masing-masing. Setiap cabang dibagi menjadi beberapa ranting (*kring*). Setiap ranting dibagi menjadi beberapa anak ranting atau kelompok (*groep*). Sekalian cabang di Jawa Barat dan di pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil dekat Sumatera, mendirikan suatu Departemen (*Hoofdafdeeling*) yang diberi nama Departemen Sarekat Islam Jawa Barat. Ini dipimpin oleh pengurus besar (*Hoofdbestuur*) Sarekat Islam Jawa Barat.

Sekalian cabang di Jawa Tengah dan di pulau Kalimantan (*Borneo*) mendirikan Departemen Sarekat Islam Jawa Tengah. Departemen (*Hoofdafdeeling*) ini dipimpin oleh Pengurus Besar



Sarekat Islam Jawa Tengah, yang berkedudukan di Surakarta. Sekalian cabang di Jawa Timur dan di pulau Sulawesi (*Celebes*), Bali, Lombok, Sumbawa dan seterusnya ke arah timur mendirikan Departemen Sarekat Islam Jawa Timur. Ini dipimpin Pengurus Besar Jawa Timur, yang berkedudukan di Surabaya.

Segenap organisasi Sarekat Islam Hindia Timur itu dikendalikan oleh suatu komite yang bernama Centraal Comite Sarekat Islam Hindia Timur, berkedudukan di Surakarta. Dengan susunan demikian dimaksudkan bahwa Centraal Comite adalah badan yang tertinggi dalam Sarekat Islam dan bertanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar. Anggota Centraal Comite dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh cabang-cabang.

Yang mula-mula ditetapkan menjadi Ketua (*Voorziter*) Centraal Comite adalah H. Samanhudi, dan yang ditetapkan menjadi wakil ketua (*Ondervoorzitter*) adalah U.S. Tjokroaminoto. Kecuali itu U.S. Tjokroaminoto ditetapkan pula menjadi Ketua Pengurus Besar Departemen Sarekat Islam Jawa Timur.

Berhubung dengan perubahan Struktur Organisasi tersebut, anggaran dasar yang sudah diajukan kepada pemerintah akan ditarik kembali untuk diubah, sedang perubahan tersebut mulai berlaku sesudah kongres di Surakarta.<sup>3)</sup>

3. U.S. Tjokroaminoto ditunjuk agar membentuk anggaran dasar baru dan peraturan umum untuk semua cabang.
4. U.S. Tjokroaminoto ditugaskan untuk memimpin rapat umum yang berlangsung keesokan harinya, yaitu tanggal 26 Januari 1913.<sup>4)</sup>

Benarlah, pada tanggal 26 Januari mulai pukul 09.00 berlangsung sebuah rapat umum di Kebun Kota (*Stadstuin*), di bawah pimpinan U.S. Tjokroaminoto. Rapat ini dikunjungi oleh 8.000 sampai 10.000 orang bumiputera. Anehnya meskipun pengunjungnya demikian banyak, rapat ini dapat berjalan dengan tertib.

Di kemah musik duduklah para anggota pengurus Centraal Comite, para utusan, Patih Surabaya, para asisten wedono, para

mantri polisi, para kepala sekolah dan pegawai lainnya. Di antara para pendengar terdapat beberapa orang Eropa dan Cina, beberapa orang Arab, dan 20 orang bumiputera yang bukan orang Jawa.

Ketika saat yang sudah ditentukan tiba, ketua mengucapkan pidato dalam bahasa Melayu (Indonesia). Dikatakan oleh pembicara dalam rapat yang besar itu pendiri perkumpulan, yaitu H. Samanhudi juga hadir. Maka berdirilah pendiri Sarekat Islam itu di atas meja dengan mendapat sambutan yang gemuruh dari para hadirin.

Dalam pidatonya dalam bahasa Jawa Kromo yang disampaikan secara singkat, H. Samanhudi mengucapkan selamat datang kepada para hadirin. Kecuali itu ia minta kepada hadirin, agar mereka benar-benar memperhatikan tujuan Sarekat Islam, yaitu terlaksananya segala sesuatu yang sesuai dengan kepentingan kaum bumiputera. Kemudian pendiri Sarekat Islam itu mengatakan harapannya, agar Sarekat Islam dapat berkembang menjadi perkumpulan yang kuat.<sup>5)</sup>

Sesudah itu U.S. Tjokroaminoto berbicara lagi secara panjang lebar, yang dalam garis besarnya sebagai berikut:

1. Cabang-cabang yang mengirimkan wakil dan jumlah wakilnya adalah:
  - a. Semarang, 1027 orang.
  - b. Kudus, 2035 orang.
  - c. Malang, 457 orang.
  - d. Sepanjang, 250 orang.
  - e. Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Jombang, 1060 orang.
  - f. Parakan, 3760 orang.
  - g. Solo, 64000 orang.
  - i. Surabaya, 6000 orang.
2. Jumlah anggota Sarekat Islam seluruhnya pada masa itu kira-kira 80.000 orang.
3. Sarekat Islam bukan partai politik, apalagi partai politik yang menghendaki revolusi seperti yang disangka oleh banyak orang. Oleh sebab itu, orang tidak perlu merasa khawatir

jika hendak menjadi anggota Sarekat Islam.

4. Sarekat Islam hanya bertujuan baik, sehingga tidak seorang pun boleh ditindas hanya karena keanggotannya dalam perkumpulan tersebut.
5. Pasal 55 Peraturan Pemerintah berbunyi sebagai berikut:  
Perlindungan terhadap penduduk bumiputera dari perlakuan sewenang-wenang oleh siapa pun menjadi salah satu kewajiban terpenting Gubernur Jendral. Hali itu berarti bahwa, jika anggota Sarekat Islam sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik di bawah panji Nederland tetapi masih ditindas juga, dapat minta bantuan kepada Gubernur Jendral.
6. Sarekat Islam bersifat legal dan merasa puas terhadap pemerintah Nederland. Di samping itu Sarekat Islam tidak hendak berbuat keributan atau berkelahi. Hanya orang yang tidak waras otaknya yang mengira bahwa Sarekat Islam hendak berbuat demikian itu. Oleh sebab itu, jika Sarekat Islam minta bantuan kepada pemerintah, tentu dikabulkan.
7. Sarekat Islam berkedudukan di Surakarta, dan didirikan untuk jangka waktu 29 tahun sejak anggaran dasarnya disetujui oleh Gubernur Jendral.
8. Tujuan Sarekat Islam adalah sebagai berikut:
  - a. Memajukan jiwa dagang orang-orang bumiputera.
  - b. Mengusahakan pemberian bantuan kepada para anggota yang mendapat kesukaran, jika kesukaran itu bukan sebagai akibat kesalahan atau perbuatan yang disengaja oleh anggota bersangkutan.
  - c. Memajukan perkembangan kerokhanian serta kebendaan kaum bumiputera dan mengangkat derajat mereka.
  - d. Memberantas pengertian-pengertian salah yang ada tentang agama Islam dan meningkatkan kehidupan agama di antara orang-orang bumiputera menurut hukum dan tradisi agama Islam.
9. Tujuan tersebut dicapai dengan cara-cara yang diijinkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan



yang baik.

10. Iuran anggota yang banyaknya 30 sen perlu dijadikan 50 sen; uang ini akan dipakai untuk menutup biaya rapat dan sebagainya.
11. Polisi menyebarkan berita bahwa anggota Sarekat Islam mencuri uang dan polisi juga telah menyita buku-buku Sarekat Islam. Para anggota harus menentang perbuatan polisi yang sedemikian itu dengan cara-cara yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sebab pemerintah menghendaki agar kaum bumiputera tidak diinjak-injak.
12. Anggota yang memerlukan bantuan pada dasarnya harus dibantu. Tetapi, sebelum bantuan diberikan, lebih dulu diselidiki secara teliti, jika sudah diputuskan bahwa bantuan berupa uang perlu diberikan, para anggota lainnya harus memberi bantuan sebesar satu sampai sepuluh sen setiap hari. Yang tidak dapat membantu dengan uang, harus membantu dengan jasa, misalnya dengan jalan bertindak sebagai pengusung pada waktu ada jenazah hendak dibawa ke kubur.<sup>1)</sup>
13. Jika anggaran dasar yang sudah diajukan kepada Gubernur Jendral mendapat persetujuan, Sarekat Islam akan terbagi atas tiga departemen (*hoofdafdeeling*), yaitu:
  - a. Jawa Timur dengan tempat kedudukan Surabaya.
  - b. Jawa Tengah dengan tempat kedudukan Surakarta.
  - c. Jawa Barat dengan tempat kedudukan Betawi (Jakarta).Oleh karena ketiga departemen itu akan dipilih komite pusat dengan tempat kedudukan Surakarta.<sup>7)</sup>
14. Menurut rencana, pada tanggal 22 Maret 1913 akan diselenggarakan sebuah rapat di Surakarta yang akan dihadiri pula oleh para anggota yang berasal dari luar Jawa, sehingga di dalamnya dapat dirundingkan pendirian cabang-cabang di luar Jawa.
15. Para anggota hendaknya bertingkah laku baik dan taat pada undang-undang. Para anggota jangan melakukan perbuatan



yang bersifat menentang pemerintah. Desas-desus yang menyatakan bahwa Sarekat Islam akan mengadakan revolusi adalah omong kosong. Kaum bumiputera merasa senang di bawah bendera tiga warna. Tetapi sayang ada beberapa orang pegawai pamong praja yang menentang Sarekat Islam.<sup>8)</sup>

16. Di dalam Sarekat Islam tidak ada perbedaan tingkatan dan kedudukan. Setiap orang berkelakuan baik, yang usianya paling sedikit 18 tahun dan yang beragama Islam dapat menjadi anggota Sarekat Islam. Semua anggota adalah saudara. Tetapi, itu tidak berarti bahwa orang boleh menggandeng tangan seorang bupati. Jadi sopan santun harus diperhatikan.
17. Setiap rakyat yang bangkit tidak dapat ditahan. Demikian pula orang Jawa yang mulai bangkit tidak dapat ditahan oleh kekuatan apa pun.
18. Pihak polisi telah menerima surat kaleng dari seseorang yang menyatakan, bahwa U.S. Tjokroaminoto telah menjual senjata kepada para anggota. Kepada penulis kaleng itu diminta agar ia bersikap terang-terangan.  
(Ketika pembicaraan sampai di sini, diadakan istirahat sebentar yang diisi dengan pembagian surat selebaran tentang perkumpulan kepada para hadirin.<sup>9)</sup>

Segera sesudah rapat dimulai lagi, kesempatan berbicara diberikan kepada Mas Wignjadarmadja, pemegang buku N.V. Setia Usaha penerbit *Oetoesan Hindia*.

Mula-mula diucapkannya terimakasih kepada U.S. Tjokroaminoto atas jasa-jasa tokoh ini bagi Sarekat Islam. Selanjutnya, dengan kata-kata yang membara dianjurkannya, agar orang-orang yang belum menjadi anggota Sarekat Islam segera menjadi anggota. Sebab perkumpulan tersebut bertujuan mencari keadilan dan berjalan di atas jalan yang menuju kemajuan. Kemudian oleh pembicara diserahkanlah sebuah tempat bunga lengkap dengan bunganya yang diterima U.S. Tjokroaminoto dengan sorak yang nyaring. Pihak yang menerima pemberian ini pun segera mengucapkan terimakasihnya, dan mengatakan, bahwa ia menyetujui

kata-kata yang diucapkan Darmadja.

Kesempatan berbicara berikutnya diberikan kepada Hasan Ali Surati, direktur N.V. Setia Usaha. Pembicara ini dengan pidatonya yang lancar mengatakan antara lain, bahwa setiap partai harus mempunyai surat kabar, dan bahwa sejak berhentinya penerbitan *Medan Prijaji*, tidak ada lagi surat kabar yang khusus untuk kaum bumiputera. Sesudah itu dikatakan oleh pembicara, bahwa *Oetoesan Hindia* akan ditambah dengan penerbitan khusus yang memakai huruf Arab bagi para anggota Sarekat Islam, dan bahwa para anggota dapat mempergunakannya sebagai saluran untuk menyatakan apa yang terkandung di dalam hati mereka masing-masing. Kemudian pembicara kembali kepada pernyataannya mengenai pentingnya setiap partai mempunyai surat kabar sendiri. Diberikannya contoh-contoh, misalnya, partai *Sociaal Democratie* di Nederland mempunyai "*Het Volk*", para pegawai pemerintahan Nederland mempunyai surat kabar sendiri, dan *Indische Partij* juga mempunyai "*De Expres*". Adapun penerbitan *Oetoesan Hindia*, menurut pembicara, bukanlah untuk mengambil untung bagi perusahaan, tetapi untuk kas Sarekat Islam. Oleh karena itu, kata pembicara, sebaiknya para anggota Sarekat Islam berlangganan *Oetoesan Hindia* atau *Sarotomo* yang keduanya berfungsi sebagai saluran suara perkumpulan.

Sesudah Hasan Ali Surati, hadirin yang mendapat giliran berbicara adalah orang Arab. Pembicara ini hanya berpidato secara singkat saja. Ia atas nama masyarakat orang Arab di Surabaya menyatakan harapannya, agar Sarekat Islam dapat berkembang secara pesat.<sup>10)</sup>

Kemudian tampil Patih Surabaya, yang menyatakan bahwa ia telah menerima pengaduan dari U.S. Tjokroaminoto yang berkaitan dengan gangguan fihak polisi terhadap para anggota Sarekat Islam, dan tentang tindakan penyitaan buku-buku perkumpulan oleh polisi di sebuah tempat. Menanggapi pengaduan tersebut patih mengatakan bahwa perkara-perkara yang dilakukan itu tidak terjadi di Surabaya. Polisi bawahannya tidak pernah

mengganggu para anggota Sarekat Islam, dan Bupati Surabaya juga tidak pernah mengeluarkan perintah agar polisi berbuat demikian, kata patih, sesudah itu pembicara menegaskan, bahwa ia, sebagai patih, selalu berusaha untuk dapat membantu rakyat jelata. Oleh karena itu, ia merasa senang kepada Sarekat Islam yang bertujuan baik itu. Hanya saja sebagai pejabat pemerintah, ia berkewajiban melakukan penyelidikan apakah di dalam Sarekat Islam terdapat kejahatan. Akhirnya dianjurkan agar Sarekat Islam mendirikan persatuan dagang bumiputera. Sementara itu ia mengingatkan pada hadirin akan kekacauan yang terjadi dalam bulan Februari (1912), ketika orang-orang Cina menutup toko-toko mereka, dan harga beras meningkat menjadi f. 0,25 setiap kati. Kekacauan yang semacam itu tidak akan terjadi, jika rakyat jelata mendirikan toko persatuan dagang bumiputera.

Ketika patih sudah mengakhiri sambutannya, U.S. Tjokroaminoto tampil lagi dan segera berbicara. Ia menyatakan terima-kasihnya kepada patih atas sambutan yang sudah diberikannya. Ia merasa senang karena ada seorang pegawai pemerintah yang mempunyai kedudukan yang demikian tinggi menaruh simpati kepada usaha Sarekat Islam. Selanjutnya pembicara menerangkan, bahwa polisi yang dimaksudkan dalam pemberitaannya bukanlah polisi di Surabaya, dan patih yang telah memerintahkan agar polisi menangkapi para anggota Sarekat Islam juga bukan patih Surabaya. Bahwa yang dimaksudkan dalam pemberitahuannya itu tidak terjadi di Surabaya, terbukti dari kenyataan bahwa pemerintah di Surabaya telah mengizinkan dilangsungkannya pertemuan di kota ini (Surabaya).

Akhirnya tampil lagi H. Samanhudi untuk memberi hormat kepada para hadirin. Sesudah itu para hadirin bubar dengan cara yang tertib sekali.

Hanya sekedar sebagai catatan, pada waktu Sarekat Islam berkongres itu, *Indische Partij* juga mengirimkan telegram ucapan selamat.<sup>11)</sup>

Menurut Amelz, sesudah Kongres I di Surabaya itu, Sarekat



Islam mulai terlepas dari jaring fitnahan, dan dalam gerak langkahnya makin memperhatikan agama serta kepentingan rakyat.

Penduduk Surabaya yang sebelumnya senantiasa diliputi suasana permusuhan antara kampung yang satu dengan kampung yang lain, antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lain, telah berubah ke suasana kerukunan. Demikian pula, rakyat jelata yang sebelumnya tidak boleh memakai sandal, selop, sepatu, pantalon dan sebagainya, pokoknya tidak boleh berpakaian seperti yang biasa dipakai oleh kaum menak atau priyayi, sesudah Sarekat Islam berdiri, khususnya sesudah kongres tersebut, mereka dapat berpakaian menurut selera masing-masing. Dengan demikian tampaklah di Surabaya pada masa itu perubahan lahir, yang terjadinya secara serentak seperti diatur dengan musyawarah sebelumnya. Malahan yang terjadi sebenarnya bukan hanya perubahan lahir saja, tetapi perubahan batin juga. Artinya, kehidupan beragama dan kebebasan jiwa makin meresap di kalangan penduduk bumiputera.<sup>12)</sup>

Kejadian itu, jika dilihat dengan ukuran masyarakat pada masa kini, kelihatan biasa saja. Tetapi, jika hal itu kita lihat dengan kaca mata sejarah, maka tampaklah pada kita bahwa hal itu penting sekali.

Sekarang baiklah kita kembali kepada masalah permintaan pengesahan anggaran dasar yang diajukan oleh Sarekat Islam kepada Gubernur Jendral. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 14 September 1912 U.S. Tjokroaminoto mendapat tugas dari H. Samanhudi agar mengusahakan pengesahan anggaran dasar perkumpulan oleh Gubernur Jendral. Kecuali itu, kita tahu pula, bahwa di dalam kongres di Surabaya ada suatu keputusan mengenai struktur organisasi, yang menyebabkan perlunya anggaran dasar yang sudah diajukan kepada pemerintah ditarik kembali untuk diganti dengan anggaran dasar baru yang sesuai dengan keperluan kongres tersebut. Mengenai hal yang kedua itu, khususnya apakah hal itu dilakukan oleh para pemimpin Sarekat Islam, kita belum mendapat informasi yang meyakinkan. Tetapi, lepas



dari masalah itu, baiklah kita melihat hasil usaha untuk dapat pengesahan anggaran dasar tersebut.

Sebenarnya Gubernur Jendral Idenburg tidak menolak kehadiran Sarekat Islam, tetapi timbulnya perkumpulan tersebut dengan sekonyong-konyong telah menyebabkan hatinya menjadi terkejut dan bimbang. Pada tanggal 7 Maret 1913 ia menulis surat kepada Menteri Jajahan yang berbunyi sebagai berikut:

"... Saya tidak mempunyai alasan untuk mencurigai Sarekat Islam secara resmi. Tingkah lakunya baik, semua yang diucapkannya berdasar kesetiaan dan perkembangannya tidak bercorak revolusioner. Meskipun demikian, saya terpaksa berkata, bahwa saya tidak dapat menaruh kepercayaan penuh kepada Sarekat Islam, terutama karena saya belum memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkannya. Perkumpulan ini sangat baru, sangat luar biasa, sangat cepat merebut tempat di dalam masyarakat, sehingga pada saya timbul pertanyaan: dari mana dan akan ke mana? Yang sudah jelas bagi saya, ialah, bahwa perkumpulan ini tidak semata-mata anti Cina, dan tidak pula akan menghambat kegiatan para kerokhaniawan Kristen. Tetapi, sesungguhnya perkumpulan ini perkumpulan semacam apa, saya belum tahu..."

Dengan keras Gubernur Jendral Idenburg membantah dugaan orang bahwa timbulnya Sarekat Islam adalah karena para pemimpin pemerintahan membawa orang bumiputera ke arah agama Kristen.

Pada tanggal 16 Maret 1913 Idenburg menulis surat ke negeri Belanda sebagai berikut:

"... Ocehan orang, bahwa *kerstenings politiek* yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan telah dijadikan alat untuk membangun Sarekat Islam, tidaklah benar. Dulu saya telah menulis surat kepada Yang Mulia sebagai berikut: Semua ocehan Bogaerdt, Scheurer dan Kuyper, yang menyatakan bahwa orang bumiputera tidak taat pada agama Islam mereka, sangat salah. Orang bumiputera akan tetap orang Islam. Itulah dunia mereka. Dan kalau ada orang yang mengatakan, bahwa dunia itu terancam, maka para pemimpin pergerakan dengan mudah saja membakar hati rakyat..."<sup>13)</sup>

Dengan mengingat Idenburg sebagai seorang tokoh kolonialis, kita merasa heran melihat sikapnya yang tampak demikian sabar

itu. Padahal, ketika baru saja kongres Sarekat Islam di Surabaya berakhir, sudah terjadi gelombang pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum tani dan pemogokan yang dilakukan oleh kaum buruh. Cabang-cabang Sarekat Islam yang meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur meluas menjadi organisasi massa yang mencerminkan jiwa revolusioner rakyat yang menggetarkan hati semua penduduk bangsa Eropa. Dalam gerakan Sarekat Islam segala macam penduduk bumiputera berkumpul menjadi satu dan bertujuan mencapai kemerdekaan tanah air dan bangsa.<sup>14)</sup>

Sudah barang tentu orang-orang berkebangsaan Eropa yang tidak dapat menyabarkan diri, menganggap Idenburg terlalu sabar dan bersikap menanti.

Sementara itu Dr. Ringkes, yaitu penasehat mengenai urusan pemerintahan, memberi nasehat, agar pemerintah tidak menindas dengan kekerasan segala usaha rakyat yang menuju ke arah perbaikan nasib, dan agar pemerintah mengesahkan anggaran dasar Sarekat Islam tanpa syarat yang bersifat menekan, supaya di kalangan Sarekat Islam tidak timbul dugaan, bahwa sebenarnya pemerintah tidak menyukai kehadiran perkumpulan tersebut.

Kemudian, penasehat yang lain yaitu Dr. Moresco memberi pertimbangan, bahwa anggaran dasar yang hanya satu untuk seluruh organisasi Sarekat Islam di Hindia Belanda sebaiknya tidak diterima oleh pemerintah. Tetapi, Sarekat Islam setempat-setempat atau Sarekat Islam lokal demi lokal, menurut pendapatnya dapat diberi izin untuk berdiri. Malahan kalau perlu masing-masing perkumpulan yang bersifat lokal itu dapat diberi pengakuan sebagai badan hukum.

Pada masa itu, kecuali yang disebutkan itu masih ada beberapa penasehat yang lain. Tetapi di antara penasehat itu hanya Dr. Ringkes dan Residen Gonggrijp yang nasehatnya bersifat positif bagi Sarekat Islam. Residen Gonggrijp dan Dr. Ringkes memberi nasehat, agar pemerintah mengesahkan anggaran dasar Sarekat Islam.

Maka sesudah mendengarkan bermacam-macam nasehat dari berbagai fihak, akhirnya Gubernur Jenderal mengambil keputusan, bahwa anggaran dasar yang dimintakan pengesahan itu ditolak. Keputusan tersebut disampaikan kepada pucuk pimpinan Sarekat Islam yang menghadap pada tanggal 29 Maret 1913.

Dalam surat keputusan yang berisi penolakan itu terdapat kalimat yang isinya sebagai berikut:

"...Hendaknya perkumpulan dapat berdiri teguh, dan keuangannya teratur baik. Kami belum yakin bahwa pucuk pimpinan Sarekat Islam cukup dan sanggup mengendalikan kegiatan perkumpulan yang terdiri atas cabang-cabang dan meliputi daerah yang luas, sehingga kegiatan tersebut tetap dalam batas-batas yang dikehendaki oleh pusat pimpinan sesuai dengan isi anggaran dasar..."

Pemerintah berpendapat, bahwa mengakui perkumpulan yang besar seperti Sarekat Islam itu dapat bertentangan dengan kepentingan umum. Perkembangan Sarekat Islam yang cepat ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda, karena kenyataannya pengurus-pengurus Sarekat Islam ini mendapat pengaruh yang besar dari rakyat, sehingga mengurangi wibawa alat-alat pemerintahan terutama Pangreh Praja. Tetapi, perkumpulan-perkumpulan yang bersifat lokal yang berdiri di daerah-daerah, mungkin dapat diakui sebagai badan hukum. Perkumpulan-perkumpulan lokal itu dapat saja mengadakan kerja sama dengan jalan membentuk badan sentral. Masing-masing perkumpulan lokal itu, begitu pula badan sentral tersebut, hendaknya membuat anggaran-anggaran dasarnya sendiri dengan persetujuan pemerintah.

Menurut kehendak pemerintah, dalam setiap anggaran dasar perkumpulan lokal itu hendaknya disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan menurut jalan yang tidak melanggar Undang-undang Negara, hukum adat, kesopanan, serta tidak mengancam keamanan umum, perkumpulan bermaksud akan:

- a. Memajukan kepentingan rakyat bumiputera di dalam perkara pengusahaan tanahnya, perniagaannya, kerajinan-



nya, kesehatan tubuhnya, pendidikannya, dan memperbaiki pelajaran sekolahnya untuk mencapai cita-cita tersebut.

- b. Memperbaiki segala faham yang salah tentang agama Islam dan menyempurnakan kehidupan rakyat bumi-putera yang beragama Islam dalam pemenuhan kewajibannya sebagai orang yang beragama dan ber-Tuhan.
- c. Mempersatukan para anggota dengan ikatan yang teguh dan membangun hati mereka agar tolong-menolong dalam segala kesusahan. Selain dari pada itu, perkumpulan akan memberi bantuan kepada semua anggota, yang mendapat kesusahan bukan karena kesalahannya atau perbuatannya yang disengaja. Perkumpulan akan berusaha melakukan kerjasama dengan semua perkumpulan sesaudara dan setujuan.<sup>15)</sup>

Jelaslah bagi kita, bahwa sikap Gubernur Jendral Idenburg itu adalah sikap "politik kewalian". Terhadap sikap politik yang sedemikian itu Dr. Craemer menulis sebagai berikut,

"... Kaum nasionalis Indonesia, juga yang masuk golongan terbaik, paling-paling hanya dipandang sebagai perkumpulan murid sekolah, yang sebentar-sebentar boleh ditepuk bahunya, karena mereka telah berjasa turut melaksanakan segala maksud guru yang baik..."<sup>16)</sup>

Pendapat tersebut kemudian dilengkapi oleh D.M.G. Koch sebagai berikut,

"...Hatinya (yaitu hati pemerintah kolonial) tetaplah hendak memegang teguh tali kendali gerakan itu. Barang siapa hendak menyimpang ke luar garis, pastilah akan merasa keteguhan tangannya..."

Sedangkan Gubernur Jendral Idenburg sendiri akhirnya setelah ia mengikuti perkembangan Sarekat Islam, mengambil kesimpulan dan pendapat, bahwa perkembangan Sarekat Islam itu sangat membahayakan Pemerintah Belanda, sebagaimana yang tersimpul dalam isi suratnya kepada pemerintah Belanda tanggal 19 Mei 1913 yang antara lain berbunyi,



"...bahwa gerakan Sarekat Islam terlebih dahulu akan menentang pemerintahan Bumiputera. Jika keinsyafannya atas harga diri sendiri telah mendalam, maka ia hendak menentang, sekurang-kurangnya mengambil kedudukan di samping pemerintahan Bumiputera yang memang mencurigai Sarekat Islam. Dan jiwa merdeka yang sulit menyihkannya dari jiwa berontak atau mogok, lambat laun akan menentang pemerintahan bangsa Eropa, bukan oleh karena pemerintahan itu di tangan orang Eropa atau Belanda, melainkan semata-mata oleh karena ia adalah pemerintahan".<sup>17)</sup>

Dari kesimpulannya ini Idenburg memutuskan tidak mengakui Sarekat Islam sebagai satu pergerakan dan tidak mau mengesahkan sebagai badan hukum. Akan tetapi ia mengakui tiap-tiap cabang Sarekat Islam sebagai badan hukum. Tindakan Idenburg ini adalah salah satu manifestasi dari sifat politik pemerintah kolonial yang lazim disebut politik *divide et impera*. Dengan cara demikian ia berharap akan dapat menghancurkan benteng persatuan rakyat yang didirikan oleh Sarekat Islam.

Dalam kenyataannya, bagi pimpinan Sarekat Islam hal itu tidak menjadi soal, karena diakui atau tidak sebagai badan hukum, Sarekat Islam akan jalan terus sesuai dengan tujuannya.

Hal ini ditandaskan oleh Umar Said Tjokroaminoto dalam rapat umum Sarekat Islam di Semarang,

"... kaum anti Sarekat Islam berdaya upaya akan menjatuhkan Sarekat Islam, tetapi kita tidak akan berhenti-henti mencari jalan buat memajukan bangsa kita dalam segala hal yang berguna bagi kehidupan. Saudara-saudara pun sudah tahu, bahwa perkumpulan Sarekat Islam *afdeeling* Pekalongan dan Kediri telah diberi *rechtspersoonlijkheid*. Sebetulnya bagi Sarekat Islam tidak perlu mendapat *rechtspersoonlijkheid* sebagai perkumpulan kamar bola dan sebagainya. Kita mohonkan *rechtspersoonlijkheid* buat Sarekat Islam hanyalah menurut *vorm* saja, tetapi pemberian *rechtspersoonlijkheid* itu tentu memberi kegirangan yang besar pada kita.

Karena pemberian hak itu menjadi satu tanda bahwa pemerintah sudah setuju dengan maksudnya Sarekat Islam yang mulia itu. Lantaran di antara bangsa kita banyaklah kaum yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri dengan menindas kaum yang bodoh. Maka kesatria kaum yang begitu sudah menjadi hilang dan kesatriannya

sudah terbalik menjadi penjilat pantat. Meskipun kaum anti Sarekat Islam makin lama makin besar, dan seolah-olah membikin rintangan pada pergerakan kita, maka kita tidak akan berkeputusan berdaya upaya dengan sekeras-kerasnya akan memajukan dan menjunjung nasibnya kaum bumiputera, dan senantiasa kita akan memegang kesatriaian kita, buat mendapatkan apa-apa yang kita tuju..."<sup>18)</sup>

Di samping itu digambarkan pula bahwa tindakan Gubernur Jendral Idenburg dalam menghalang-halangi gerakan Sarekat Islam itu mendapat dukungan dari golongan Pangreh Praja. Inilah yang menjadi sebab mengapa Sarekat Islam menentang golongan Pangreh Praja, sebagaimana digambarkan oleh Fromberg dari hasil observasinya,

"...Ciri khas dari gerakan Sarekat Islam adalah sangat mencela tindakan pemerintahan bumiputera (pangreh praja) yang menambah kesengsaraan rakyat. Dan bangsa asing lainnya mendapat keuntungan besar dari Indonesia, sedangkan pemerintahan bumiputera tidak bertindak sebagai pelindung rakyat, malahan rakyat ditekannya dan ditambah dengan berbagai-bagai pajak. Sebaliknya setiap usaha untuk mengangkat derajat rakyat, golongan pangreh praja tidak memperhatikannya dan bahkan menolak usaha tersebut."<sup>19)</sup>

Di luar Jawa perkembangan Sarekat Islam juga ternyata sangat pesat sekali, yang dimulai dari pulau Sumatera kemudian diikuti Kalimantan. Di Banjarmasin saja tercatat 7000 orang anggota Dalam perkembangan di Kalimantan dan Sulawesi, masyarakat mengharapkan pembentukan Sarekat Islam itu sebagai langkah untuk mengadakan "Perang Suci" (Jihad).<sup>20)</sup> Dari fakta-fakta tersebut dapatlah dikatakan bahwa Sarekat Islam adalah pelopor dalam "perjuangan menanamkan kesadaran Nasional.

Untuk memperkuat pendapat tersebut, harian *Oetoesan Hindia* menjelaskan maksud dan tujuan perjuangan Sarekat Islam sebagai berikut,

"... maksud dan tujuan Sarekat Islam itu boleh dikatakan ada dua macam yaitu maksud yang batin dan maksud yang lahir. Maksud dan tujuan yang batin yaitu akan menyempurnakan keadaan kita yang rokhani (*Ziel*) buat mengenal dan mencintai Tuhan menurut jalan yang sudah disya'ra agama kita. Maksud dan tujuan yang lahir yaitu akan menyempurnakan keadaan kita yang jasmani (badan kita, *wadag*

ini) supaya derajat kita bersamaan dengan derajatnya lain-lain manusia, baik dari pada kaum kita sendiri, maupun dari pada kaum yang lain-lainnya, supaya kita dapat hak kemanusiaan kita yang sempurna, pendek kata yaitu tidak mencari kemajuan buat diri sendiri sahaja, tetapi kita mencari kemajuan buat orang lain juga, yang kita maksudkan buat orang lain ialah baik oleh karena campur agama maupun sebab bercampur tanah kelahiran. Oleh sebab itulah, maka sudah tentu sahaja kehendaknya pergerakan Sarekat Islam menuju maksud akan membangunkan kebangsaan juga..."<sup>21)</sup>

Dari maksud dan tujuan Sarekat Islam tersebut nyata<sup>22)</sup> bahwa gerakan Sarekat Islam adalah perintis pergerakan Nasional dalam arti kata yang luas. Sebagai perintis dalam politik nasional sekalipun Sarekat Islam tidak terang-terangan sebagai partai politik, akibat adanya *Regerings Reglement 111*.

Sementara itu, di fihak Sarekat Islam sendiri, mulai dari para pengurus sampai kepada para anggota, sebenarnya hanya menghendaki kebebasan bergerak, tidak menghendaki campur tangan dari siapa pun. Tetapi, karena sadar akan kelemahan yang ada pada organisasi mereka, campur tangan dari fihak pemerintah terpaksa diterima saja.<sup>22)</sup>

Dengan sikap yang sedemikian itu para pemimpin Sarekat Islam tetap bekerja keras membangun dan memantapkan organisasi mereka. Pada tahun 1915 mereka mengubah Centraal Comité Sarekat Islam menjadi Centraal Sarekat Islam. Pimpinan Centraal Sarekat Islam (CSI) tersebut berada di tangan U.S. Tjokroaminoto, dibantu Abdul Muis, W. Wondoamiseno, Haji Agus Salim, Sasrokardono, Soerjopranoto, Alimin Prawirodirdjo dan lain-lain. H. Samanhudi diangkat menjadi ketua kehormatan, sementara itu anggaran dasar yang diajukan kepada pemerintah mendapat pernyataan "*goedgekeurd*" atau "baik" dengan surat putusan tertanggal 18 Maret 1916.<sup>23)</sup>

Demikianlah, sesudah bertahun-tahun berusaha, akhirnya Sarekat Islam mendapat pengakuan juga dari pemerintah. Meskipun Sarekat Islam meninggalkan bentuk organisasi seperti yang sudah diputuskan dalam kongres di Surabaya (1913), organisasi dengan bentuk federasi yang diakui pemerintah ternyata dapat dipakai sebagai alat berjuang yang sehat.



## Catatan

- 1) Sartono Kartodirdjo dkk., *Sarekat Islam Lokal*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber Sejarah No. 7, Jakarta, 1975, hal. 271–272.
- 2) *Ibid.*, hal. 2.
- 3) a. *Ibid.*, hal. 273.  
b. Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto, *Hidup dan Perjuangannya*, Bulan Bintang, Djakarta, 1952, hal. 99–100.
- 4) Sartono Kartodirdjo dkk., *op.cit.*, hal. 273.
- 5) a. *Ibid.*, hal. 273–274.  
b. Amelz, *op.cit.*, hal. 98–99.
- 6) Sartono Kartodirdjo, dkk., *op.cit.*, hal. 274–275.
- 7) *Ibid.*, hal. 275.
- 8) *Ibid.*, hal. 275–276.
- 9) *Ibid.*, hal. 276.
- 10) *Ibid.*, hal. 276–277.
- 11) *Ibid.*, hal. 277.
- 12) a. Amelz, *op.cit.*, hal. 102.  
b. Wawancara dengan Reso Ramli pada tanggal 24 Agustus 1978.
- 13) D.M.G. Koch, *Menudju Kemerdekaan*, terjemahan Abdoel Moeis, Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1951, hal. 28–29.
- 14) S.J. Rutgers, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Penerbit c.v. Hayam Wuruk, Surabaya, 1951, hal. 6.
- 15) D.M.G Koch, *op.cit.*, hal. 33–34.
- 16) *Ibid.*, hal. 34.
- 17) K.H. Sapari, *op.cit.*, p.9.
- 18) K.H. Sapari, *op.cit.*, p. 12.
- 19) Fromberg, *De Inlandsche Beweging op Java*, p. 557.
- 20) Surat kabar *Oetoesan Hindia*, No. 125/tahun yang ke 2, hari Kamis, 2 Juli 1914–8 Sya'ban 1332/1844.
- 21) Surat kabar *Oetoesan Hindia*, No. 125/tahun yang ke 2, Hari Kamis, 2 Juli 1914–8 Sya'ban 1332/1844.
- 22) *Ibid.*, *loc.cit.*
- 23) a. Amelz, *op.cit.*, hal. 105–106.  
b. Susanto, *Sejarah Pergerakan Nasional*, PT. Pembangunan.



## BAB V

### GEMA PERJUANGAN H. SAMANHUDI

Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Belanda dengan surat keputusannya yang tertanggal 18 Maret 1916 telah menyatakan pengakuannya, bahwa Centraal Sarekat Islam adalah sebuah badan hukum. Dalam pada itu, telah kita ketahui pula, bahwa terbentuknya Centraal Sarekat Islam itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak H. Samanhudi beserta pengurus lainnya, tetapi hanya sebagai taktik atau kebijaksanaan yang terpaksa dijalankan, agar hambatan dapat diatasi dan eksistensi Sarekat Islam sebagai organisasi yang mempersatukan umat Islam (baca kaum bumi-putera) dapat berlangsung terus.

Hasil taktik atau kebijaksanaan yang sedemikian itu dapat dilihat di antaranya dari sukses yang dicapai oleh Sarekat Islam dengan kongresnya yang berlangsung di Bandung, pada tanggal 17-24 Juni 1916, yaitu kongres yang diberi nama Kongres Nasional Pertama Centraal Sarekat Islam, atau *Nationaal Indische Congress*, disingkat *Natico*.<sup>1)</sup>

Kongres tersebut dihadiri oleh para utusan dari 80 buah Sarekat Islam lokal yang tersebar di seluruh Hindia Belanda yaitu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Sulawesi,<sup>2)</sup> serta mendapat dukungan dari para anggotanya yang pada masa itu sudah mencapai jumlah tidak kurang dari 360.000 orang.<sup>3)</sup> Jelaslah menurut ukuran pada masa itu, kongres tersebut tidak hanya dapat dinilai sebagai kongres yang besar, tetapi juga sebagai kongres yang mempunyai arti penting dalam pergerakan rakyat Indonesia.

Bahasa pengantar yang dipakai dalam kongres tersebut adalah bahasa Indonesia yang pada masa itu masih disebut bahasa Melayu.<sup>4)</sup> Dilihat dari kenyataan ini dapatlah dikatakan bahwa

Sarekat Islam yang didirikan dan dijiwai oleh H. Samanhudi itu adalah pelopor penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu adalah jasa yang sangat besar, mengingat bahwa persatuan adalah syarat mutlak yang harus ada pada suatu bangsa yang ingin mencapai kemenangan dalam perjuangannya.

Sebenarnya, pada tahun 1916 itu masih ada larangan berpolitik bagi rakyat Hindia Belanda. Larangan tersebut tercantum dalam fasal 111 *Regeringsreglement voor Nederlandsch Indie* (R.R.) yang sudah ada sejak tahun 1854. R.R. adalah *wet* atau undang-undang yang dibuat bersama-sama oleh raja dengan parlemen di Nederland dan yang di Hindia Belanda berlaku sebagai Undang-undang Dasar. Benarlah sejak tahun 1903 fasal 111 R.R. itu sudah diperlemah, artinya orang bumiputera sudah mulai berpolitik. Tetapi ijin berpolitik itu hanya terbatas dalam dewan-dewan perwakilan, sedang menjalankan politik umum yang meliputi seluruh Hindia Belanda masih dilarang. Meskipun demikian, Kongres Sarekat Islam di Bandung itu sudah menjalankan politik yang bercorak nasional. Pidato U.S. Tjokroaminoto yang akan diuraikan di belakang nanti dapatlah dipakai sebagai bukti kenasionalan kongres tersebut. Malahan kata "nasional" yang dipakai untuk menamai kongres itu adalah satu bukti pula bahwa rapat besar tersebut bercorak nasional.<sup>5)</sup> Masalah hangat atau tema yang menjadi pembahasan kongres ialah masalah sosialisme dan demokrasi dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi pendorong bagi U.S. Tjokroaminoto untuk menulis buku *Islam dan Sosialisme*.<sup>5a)</sup>

Kongres Nasional Pertama Centraal Sarekat Islam itu terdiri atas tiga macam rapat, yaitu:

1. Rapat pendahuluan dan rapat-rapat tertutup. Rapat-rapat ini berlangsung pada tanggal 17 Juni 1916 dan hanya dihadiri oleh para anggota *Centraal Bestuur* (Pengurus Pusat).
2. Rapat umum terbuka di alun-alun, pada hari Minggu dan Senen, atau tanggal 18 dan 19 Juni 1916.

3. Enam kali rapat dalam salah satu bangsal *Societeit Concordia* yang hanya dapat dihadiri oleh para utusan dari Sarekat Islam sendiri, para tamu, para utusan organisasi pergerakan sahabat dan pers.<sup>6)</sup>

Pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 1916, ketika hari masih pagi benar, tampaklah di kota Bandung rakyat yang berduyun-duyun menuju alun-alun. Di alun-alun itu, di salah satu sudut, berdirilah sebuah podium. Ketika saat yang sudah ditentukan tiba, tampaklah para pengurus Centraal Sarekat Islam datang ke tempat tersebut dan kemudian naik ke podium. Mereka kelihatan memakai *rok*, yaitu celana hitam, jas buka hitam yang bagian belakangnya panjang sampai di lutut dan dasi putih. Ini berarti bahwa pada masa itu protokol masih dijunjung tinggi.<sup>7)</sup>

Dalam rapat umum tersebut U.S. Tjokroaminoto mengucapkan pidatonya yang penting. Menurut S.J. Rutgers, U.S. Tjokroaminoto memang menganjurkan kepada para anggota, agar mereka memperhatikan semua undang-undang dan peraturan-peraturan dengan jalan yang sah, tetapi yang menonjol ke depan dalam pidatonya itu adalah tuntutan kepada pemerintah, agar Hindia Belanda diberi *zelf-bestuur* (pemerintah sendiri), agar rakyat bumiputera diberi kesempatan dalam pemerintahan dan agar diadakan peraturan-peraturan mengenai desentralisasi serta otonomi untuk beberapa bagian wilayah Hindia Belanda.<sup>8)</sup>

Agar kita mempunyai gambaran yang agak lengkap mengenai pidato yang diucapkan selama kira-kira dua jam itu, baiklah kita kutip beberapa bagian dari padanya yang bunyinya sebagai berikut,

"... Kita cinta bangsa sendiri dan dengan kekuatan ajaran agama kita, agama Islam, kita berusaha untuk mempersatukan seluruh bangsa kita, atau sebagian besar dari bangsa kita. Kita cinta tanah air, di mana kita dilahirkan, dan kita cinta pemerintah yang melindungi kita. Karena itu, kita tidak takut untuk minta perhatian atas segala sesuatu, yang kita anggap baik, dan menuntut apa saja, yang dapat memperbaiki bangsa kita, tanah air kita dan pemerintah kita.

Untuk mencapai tujuan dan untuk memudahkan cara kerja kita, demi pelaksanaan rencana raksasa itu, maka perlulah, dan kita harap dengan sangat agar diadakan peraturan, yang memberi kita penduduk



bumiputera hak untuk ikut serta dalam mengadakan bermacam-macam peraturan, yang sekarang sedang kita pikirkan. Tidak boleh terjadi lagi, bahwa dibuat undang-undang untuk kita, bahwa kita diperintah tanpa kita, dan tanpa mengikutsertakan kita.

Meskipun jiwa kita penuh dengan harapan dan keinginan yang besar, kita tidak pernah bermimpi tentang datangnya Ratu Adil, atau kejadian yang bukan-bukan, yang kenyataannya memang tidak akan terjadi. Akan tetapi kita akan terus mengharapkan dengan ikhlas dan jujur datangnya status berdiri sendiri bagi Hindia Belanda, atau paling sedikit Dewan Jajahan, agar kita dapat ikut berbicara dalam urusan pemerintahan. Tuan-tuan jangan takut, bahwa kita dalam rapat ini berani mengucapkan "pemerintahan sendiri". Dengan sendirinya kita tidak takut untuk memakai perkataan itu, karena ada undang-undang (*wet*) yang harus dibaca oleh tiap-tiap penduduk, yang juga penggunaan perkataan "pemerintahan sendiri", yaitu Undang-undang 23 Juli 1903, tentang "Desentralisasi dari Pemerintahan Hindia Belanda", yang memuat keputusan Sri Ratu Wilhelmina, di mana Sri Ratu memandang perlu, agar tiap-tiap keresidenan atau bagian-bagian daerah membuka kemungkinan untuk mencapai "pemerintahan sendiri".

Tidak dapat diragukan, bahwa Ratu kita adalah bijaksana. Semakin lama, semakin tambah kesadaran orang, baik di Nederland maupun di Hindia, bahwa pemerintah sendiri adalah perlu. Lebih lama lebih dirasakan, bahwa tidak patut lagi memandang Hindia sebagai sapi perahan, yang hanya dapat memakan karena susunya, tidak pantas lagi untuk memandang negeri ini sebagai tempat untuk didatangi dengan maksud mencari untung, dan sekarang sudah tidak patut lagi, bahwa penduduknya, terutama puterabuminya, tidak punya hak untuk ikut berbicara dalam urusan pemerintahan, yang mengatur nasibnya.

Segala puji kepada Allah, Tuhan Maha Adil. Tuhan mendengar keinginan hambaNya. Ratu kita dan pemerintah bijaksana. Perubahan besar fasal 111 R.R. yang melarang mengadakan rapat politik sudah dicabut, dan meskipun belum sama sekali dikubur, tetapi tidak dijalankan lagi. Meskipun menjadikan kongres jatuh di bawah fasal 111 tersebut, kita berbesar hati, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bandung memberi izin untuk mengadakan rapat-rapat ini.

Kita menyadari dan benar-benar mengerti, bahwa mengadakan "pemerintahan sendiri" adalah satu hal yang sangat sulit, dan bagi kita hal itu laksana suatu impian. Akan tetapi bukan impian dalam waktu tidur, tetapi harapan yang tertentu, yang dapat dilaksanakan, jika kita berusaha dengan segala kekuatan yang ada pada kita, dan dengan



memakai segala daya upaya melalui jalan yang benar dan menurut hukum.

Kita sama sekali tidak berteriak: "Persetan Pemerintah!" Kita malah berseru: "Dengan Pemerintah, bersama dengan Pemerintah dan untuk membantu Pemerintah menuju ke arah yang benar". Tujuan kita ialah bersatunya Hindia dan Nederland, dan untuk menjadi warga-negara "Negara Hindia", yang mempunyai pemerintahan sendiri..."<sup>9)</sup>

Demikianlah pidato U.S. Tjokroaminoto, penerus perjuangan H. Samanhudi. Kemudian pada bagian penutup pidatonya ia berkata,

"... Kongres yang terhormat, bangsaku dan kawan-kawan separtai yang saya cintai. Maka perlu sekali kita bekerja keras. Meskipun pemerintah yang maju (progresip) mampu tentu bersedia mendidik anak buahnya, dan membangkitkan energi anak buahnya, agar mereka semakin maju dalam kehidupannya, hak-hak dan kebebasan politik baru diberikan kepada satu rakyat, kalau rakyat itu menerima sendiri dengan memaksa, jarang sekali terjadi bahwa hak dan kebebasan semacam itu diberikan sebagai hadiah oleh pemerintah. Di bawah pemerintah yang tiranik dan zalim hak-hak dan kebebasan itu dicapai dengan revolusi, sedang dari suatu pemerintah yang bijaksana dengan evolusi, gerakan yang patut. Kita mengharap, bahwa gerakan evolusi ini senantiasa akan berlangsung di bawah naungan Sang Tri Warna. Tetapi bagaimana pun juga "rakyat harus bekerja untuk menentukan nasibnya sendiri".<sup>10)</sup>

Menurut D.M.G. Koch, sidang kongres yang sebenarnya dibuka pada tanggal 21 Juni 1916. Dalam sidang itu tampak wakil-wakil dari 80 buah cabang, sedang yang memegang pimpinan sidang adalah U.S. Tjokroaminoto, Abdul Muis dan Sosrokardono.

Ketika membuka sidang U.S. Tjokroaminoto berkata,

"... Tidak sekali-kali kita hendak berseru: Hilangkan Gubernemen! Sebaliknya! Kita berkata: Di samping Gubernemen, kita hendak membesarkan haluan ke arah yang baik!"<sup>11)</sup>

Jelaslah bagi kita bahwa apa yang diucapkan U.S. Tjokroaminoto dalam sidang tersebut sama dengan yang diucapkan dalam rapat terbuka di alun-alun pada tanggal 18 Juni 1916, yaitu bahwa Sarekat Islam tidak anti Gubernemen atau Pemerintah Hindia Belanda. Itulah kata-kata yang bersifat taktis atau diplomatis dari

seorang pemimpin pergerakan rakyat yang bersifat realistik dan berpandangan jauh. Teranglah bahwa di balik kata-kata yang diucapkan itu U.S. Tjokroaminoto mempunyai perhitungan yang matang atau strategi yang sudah tersusun secara rapi mengenai bagaimana caranya menumbangkan pemerintahan kolonial Belanda agar kemerdekaan bangsa kita segera menjadi kenyataan. Kemantapan organisasi dan kesadaran politik rakyat harus dicapai lebih dulu oleh Sarekat Islam sebelum organisasi yang didirikan H. Samanhudi ini mengajak rakyat untuk memaksa bangsa asing meninggalkan kekuasaannya di tanah air kita. Begitulah pendapat U.S. Tjokroaminoto yang juga pendapat pendiri Sarekat Islam, H. Samanhudi.

Lebih lanjut berkatalah U.S. Tjokroaminoto di dalam sidang tersebut,

"... Kita berharap agar pergerakan ini dapat dilangsungkan di bawah perlindungan si tiga warna. Tetapi bagaimanapun, rakyat harus bekerja sendiri menetapkan nasibnya.<sup>12)</sup>

Sesudah itu U.S. Tjokroaminoto menyatakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai maksudnya, yaitu pemerintahan sendiri, pembentukan dewan jajahan, perlunya ada wakil rakyat dalam dewan-dewan lokal dan perlunya ada hak pilih aktif pada rakyat, jadi seperti yang dikatakannya dalam rapat umum. Diterangkannya bahwa pada masa itu rakyat bumiputera belum mempunyai wakil di dalam dewan perwakilan rakyat tingkat daerah keresidenan atau *Gewestelijke Raad* kecuali para bupati, sedang hak memilih para anggota dewan perwakilan rakyat tingkat kotapraja atau *Gemeente Raad* hanya diberikan kepada mereka yang berpenghasilan sekurang-kurangnya f. 600,— setahun.<sup>13)</sup>

Sebagaimana kita ketahui, dengan keluarnya Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) pada tanggal 23 Juli 1903, maka fasal 68 *Regeringsreglement* ditambah dengan 3 fasal baru yaitu fasal 68a, fasal 68b dan fasal 68c yang membuka kemungkinan untuk terwujudnya dewan perwakilan rakyat lokal yaitu *Locale Raad* yang terdiri dari *Gewestelijke Raad* (untuk tingkat

keresidenan), *Plaatselijke Raad* (untuk tingkat kabupaten) dan *Gemeente Raad* (untuk tingkat kotapraja).<sup>14)</sup>

Selanjutnya, dalam pidato pembukaannya itu U.S. Tjokroaminoto juga menguraikan pendapat Sarekat Islam mengenai adanya hubungan kolonial yang tidak adil, yang harus diperbaiki lebih dulu, agar kepincangan dalam kehidupan masyarakat dapat dihilangkan dengan hak-hak politik sebagai alat berjuang.

Ternyata, Kongres Nasional Pertama Sarekat Islam itu dapat menjadi saluran yang baik sekali bagi masyarakat untuk menyatakan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Sebagai contoh, di dalam kongres itu dibicarakan masalah yang berkaitan dengan adanya tanah-tanah partikelir, yang nasib penduduknya tergantung sepenuhnya pada para tuan tanah, padahal para tuan tanah itu dapat saja berbuat sewenang-wenang. Dalam kaitan masalah tersebut kesediaan pemerintah mengeluarkan uang sebesar f. 2.000.000,— untuk membeli tanah-tanah partikelir oleh rapat dipandang tidak cukup. Contoh lain, adalah adanya pengaduan dari daerah pabrik gula. Oleh fihak pengadu dinyatakan bahwa ada sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh suatu dewan perwakilan rakyat tingkat keresidenan atau *Gewestelijke Raad* yang menetapkan, bahwa jika ada kebun tebu yang terbakar dan sudah dipadamkan apinya, maka semua penduduk bumiputera yang sudah dewasa diwajibkan menjaga tempat bekas kebakaran itu lima hari dan lima malam lamanya. Kecuali itu, ada pula pengaduan yang lain, yaitu dari Jember. Dikatakan dalam pengaduan itu, bahwa jika di daerah tersebut ada gudang tembakau yang terbakar, maka penduduk desa diwajibkan menjaga secara cuma-cuma; dan jika di antara mereka yang tidak memenuhi kewajiban, disuruh membayar denda yang amat berat.<sup>15)</sup>

Kesewenang-wenangan aturan pemerintah, nasib kaum pekerja di *onderneming-onderneming*, pajak dan rodi yang dikenakan kepada rakyat sesuka hati para pejabat, pekerjaan desa yang sangat berat secara cuma-cuma, juga penghinaan-penghinaan yang diterima para pegawai pegadaian dari atasan mereka, semuanya dilontarkan di dalam kongres tersebut. Kecuali itu dibicarakan



pula di situ kelakuan orang-orang pencari tenaga untuk dijadikan kuli kontrak di Deli.

Di dalam kongres tersebut juga diterima sebuah mosi yang menghendaki tambahan di sekolah desa dengan pengetahuan mengenai pertukangan, cocok tanam dan perniagaan. Mosi itu diterima oleh kongres karena dorongan para pengusaha dan pedagang kecil yang sedang berlomba-lomba mempertinggi derajat kehidupan mereka masing-masing.<sup>16)</sup>

Pada tanggal 20–27 Oktober 1917 berlangsung lagi kongres Sarekat Islam, yaitu Kongres Nasional Kedua Sarekat Islam di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 16 Desember 1916 parlemen Belanda telah menerima rancangan tentang pembentukan *Volksraad* yang dikemukakan oleh Menteri Jajahan Pleyte. Oleh sebab itu, dibanding dengan kongres pertama, kongres kedua ini lebih banyak berbicara tentang masalah pemerintahan dan badan-badannya. Di dalam kongres tersebut terdengar secara jelas suara-suara yang cenderung kepada pemerintahan nasional di Indonesia.<sup>17)</sup> Terbentuknya *Volksraad* oleh kongres dipandang tidak memuaskan, sebab di dalamnya tidak terdapat dasar-dasar perwakilan rakyat yang sebenarnya. Sementara itu kongres menuntut adanya desentralisasi dan adanya hak pilih pasif dan aktif pada kaum bumiputera dalam pemilihan tingkat daerah maupun nasional. Kongres juga menuntut hapusnya surat-surat jalan, penyempurnaan pendidikan dan pengajaran, persamaan hak antara orang bumiputera dan orang Eropa, penghapusan tanah-tanah partikelir dan lain-lain.<sup>18)</sup>

Di dalam Kongres Nasional SI ke dua juga dipersoalkan bermacam-macam masalah pembelaan terhadap rakyat, seperti masalah tanah partikelir, *raad agama*, penyewaan tanah, keadaan pabrik gula, urusan pengadilan, perbaikan perumahan, keadaan tanah kerajaan, nasionalisme, pendeknya segala persoalan yang menyangkut masalah perbaikan kedudukan politik anak negeri, dan *Volksraad* atau Dewan Rakyat. SI mempersoalkan Dewan ini, dan ramailah pembicaraan antara yang pro dan kontra ikut sertanya SI dalam Dewan buatan kolonial itu. Tetapi ketika *Volksraad*

dengan resmi dibuka, oleh pemerintah kolonial pada tahun 1918, terlihat wakil SI di dalam Dewan, yaitu A. Muis dengan jalan pemilihan dan Tjokroaminoto dengan jalan penunjukan. Tetapi SI terus berjuang, baik di dalam maupun di luar Dewan Rakyat itu.

Pendek kata, dibanding dengan kongres pertama kongres kedua itu memperdengarkan suara-suara yang lebih keras. Contoh yang jelas adalah ucapan Abdul Muis yang menyatakan, bahwa Centraal Sarekat Islam memang mengutamakan aksi parlementer, tetapi jika kemudian ternyata bahwa segala usaha tetap sia-sia, Sarekat Islam harus bersedia membalas kekerasan dengan kekerasan, dan para anggota harus bersedia berkorban bagi bangsa dan tanah air. Demikian pula ketika kongres membicarakan hal-hal yang terdapat di dalam perkebunan U.S. Tjokroaminoto berkata,

"... Jika semua *onderneming* masih bertindak seperti yang sudah-sudah kita akan mempertahankan hak kita sampai titik darah yang penghabisan. Sekiranya kita damai tak dapat diperoleh, salah satu haruslah lebur..."<sup>19)</sup>

Sementara itu dalam bulan Juni 1917 telah didirikan apa yang disebut Panitia Nasional atau National Comite, yang di dalamnya duduk wakil Sarekat Islam dan wakil-wakil perkumpulan lain. Dalam bulan Juli 1917 panitia tersebut bersidang dan menerima baik rencana anggaran dasar yang dikemukakan oleh Budi Utomo. Di dalam anggaran dasar itu disebutkan bahwa National Comite bermaksud mengusahakan berdirinya suatu pemerintahan parlementer yang bersifat nasional. Dalam kaitan ini badan tersebut hendak minta diadakannya Undang-undang Pemilihan, minta persamaan hukum bagi semua bangsa yang hidup di Hindia Belanda, dan memperjuangkan adanya undang-undang nasional untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang menghambat kemajuan hidup bersama dalam masyarakat. Berkenaan dengan masalah pembentukan *Volksraad* Comite menghendaki adanya kerjasama.<sup>20)</sup> Kongres Nasional Kedua Sarekat Islam menetapkan U.S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis sebagai calon anggota *Volksraad*.<sup>21)</sup>

Tanggal 18 Mei 1918 dilangsungkan pembukaan sidang *Volksraad* yang baru dibentuk. Ketika itu Gubernur Jendral van Limburg Stirum dalam pidato pembukaannya berkata bahwa *Volksraad* diharapkan dapat menjadi pengumpul baginya untuk mengangkat derajat Hindia Belanda, sehingga tanah ini menjadi bagian tanah Nederland yang demokratis dan di bawah pemerintahan sendiri. Gubernur Jendral itu juga menyatakan bahwa pada masa lampau memang telah terjadi kesalah-fahaman antara Nederland dengan Hindia Belanda yang disebabkan oleh kekhilafan dua belah pihak. Tetapi pada pihak Nederland sebenarnya ada kemauan yang tetap untuk berbuat apa saja yang dapat menguntungkan Hindia Belanda dan sekaligus memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak. Apa yang hendak dilakukan Nederland berdasarkan rasa prikemanusiaan dan bersifat pengorbanan yang tidak menguntungkan diri sendiri.

Dalam pada itu, van Limburg Stirum mengakui, bahwa susunan *Volksraad* masih belum sempurna. Jumlah anggotanya hanya 39 orang; yang 20 orang terdiri dari 10 orang bangsa Indonesia, 9 orang bangsa Eropa dan seorang bangsa Timur Asing; sedang yang 19 orang terdiri dari 5 orang bangsa Indonesia; dan 14 orang bangsa Eropa serta bangsa Timur Asing, semuanya (19 orang itu) hasil penunjukan pemerintah.<sup>22)</sup>

Kemudian, atas usaha van Limburg Stirum, pada tanggal 11 Oktober 1920 keluarlah surat keputusan raja Nederland yang menyatakan bahwa jumlah *Volksraad* dapat ditambah sehingga menjadi 48 orang. Jumlah itu diperinci sebagai berikut: 20 orang anggota bangsa Indonesia, terdiri dari 12 orang anggota hasil pemilihan dan 8 orang anggota hasil pengangkatan dan 28 orang anggota bangsa Eropa serta bangsa Timur Asing, terdiri dari 12 orang anggota hasil pemilihan dan 12 orang hasil pengangkatan.<sup>23)</sup>

Sidang *Volksraad* yang pertama dibuka tanggal 21 Mei 1918. Sejak itu U.S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis, bersama dengan para anggota dari golongan bumiputera yang lain menempatkan diri sebagai golongan oposisi terhadap pemerintah Hindia Belanda. U.S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis sebagai juru bicara Sarekat



Islam duduk di dalam *Volksraad* itu dengan tujuan politik yang tegas dan jelas, yaitu berusaha agar *Volksraad* secara berangsur-angsur memperoleh hak seperti yang dimiliki oleh Dewan Rakyat yang sebenarnya dan para anggotanya adalah hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Tentang sikap U.S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis serta para anggota golongan bumiputera itu telah diterangkan oleh J.E. Stokvis dalam majalah *De Taak* pada tanggal 29 Juli 1918 sebagai berikut,

"... Pokok dari pada keberatan-keberatan yang umum dilahirkan oleh anggota-anggota bangsa bumiputera, ialah jurang lebar dan berbahaya yang menjadi batas antara rakyat dan pemerintah..."<sup>24)</sup>

Lebih lanjut Stokvis menulis,

"... Fihak oposisi meminta perhatian dan telah menggemparkan pula, karena ia merupakan suatu golongan yang bersatu padu, dan tidak membungkus-bungkus segala yang terkandung dalam hatinya. Hampir tak ada orang yang menyangka, bahwa golongan orang bumiputera ini dalam *Volksraad*, yang nyata telah mengambil pimpinan, akan tampil secara itu ke muka; bersatu serta serentak dan teratur mencurahkan segala kata hatinya. Kabut yang meliputi perkembangan badan pemerintah, yang menjadi tabir dan meliputi makdir itu dari mata khalayak umum, sehingga dari pemandangan pemerintah sendiri ia tertinggal terlindung, telah diturih, lalu nampaklah segala yang disembunyikannya dengan nyata. Itu suatu keuntungan..."<sup>25)</sup>

Pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober 1918 Centraal Sarekat Islam mengadakan kongres lagi, yaitu Kongres Nasional Ketiga Sarekat Islam di Surabaya, dikunjungi 87 SI lokal dengan jumlah anggota 450.000 orang. Dalam kongres itu terdengarlah suara-suara mendesak, kecewa dan berisi rasa dendam, sebab, kesukuran hidup rakyat telah memuncak. Kongres juga menuntut hilangnya kerja rodi dan sejenis kerja paksa lain, menuntut turunnya pajak, memperluas pengajaran rakyat, menghapuskan tanah partikelir untuk kepentingan rakyat jelata.

Kesukaran itu timbul, karena (1) hasil bumi Hindia Belanda tidak dapat dikeluarkan dan tetap bertumpuk di gudang, (2) perusahaan-perusahaan Eropa terpaksa memperkecil usahanya supaya

tidak menderita kerugian, dan (3) beras impor hampir tidak dapat masuk ke Hindia Belanda oleh kurangnya kapal pengangkut.<sup>26)</sup>

Sementara itu, karena pengaruh golongan Semaun maka kongres ketiga itu menegaskan, bahwa di Hindia Belanda pada masa itu terdapat dua macam pertentangan, yaitu pertentangan antara penjajah kontra yang terjajah dan pertentangan antara kaum kapitalis melawan kaum buruh.

Karena penegasan mengenai adanya pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh itu maka dalam kongres tersebut terpikirlah perlunya menyusun kekuatan kaum buruh dan kaum tani. Tetapi dalam perjuangannya untuk dua golongan tersebut Sarekat Islam akan tetap menempuh jalan parlementer.

Sarekat Islam menegaskan sikapnya, bahwa akan tetap menuntut perluasan pengajaran dan penghapusan *herendiens-ten*.<sup>27)</sup>

Di samping itu, Sarekat Islam mengulangi desakannya, agar Hindia Belanda diberi pemerintahan sendiri dan agar setiap penduduk laki-laki yang sudah berumur 21 tahun dan pandai menulis dengan salah satu dari tiga abjad Latin, Jawa atau Arab diberi hak pilih aktif.

Sarekat Islam juga minta, agar *Gewestelijke Raad* dihapuskan agar semua anggota *Volksraad* diberi hak untuk melakukan pemeriksaan serta hak untuk meminta keterangan guna keperluan *Volksraad* dan agar perbandingan dalam susunan anggota *Volksraad* disesuaikan dengan perbandingan jumlah penduduk dalam masyarakat. Semua tuntutan atau permintaan Sarekat Islam itu disertai kata-kata yang keluar dari mulut ketuanya, "Jika pemerintah tidak mengindahkan segala tuntutan itu selama lima tahun maka Sarekat Islam sendirilah yang akan melaksanakan."

Selanjutnya, Sarekat Islam juga minta, agar dibentuk suatu panitia yang terdiri dari pegawai negeri dan orang-orang partikelir yang bertugas meneliti keberatan-keberatan rakyat berkaitan dengan peraturan perpajakan yang ada. Dalam kongres ketiga itu dibicarakan juga rancangan undang-undang kewajiban milisi bumi-

putera. Malahan ketika itu pembicaraan kelihatan hangat sekali. Setelah sampai pada pemungutan suara ternyatalah, bahwa dari 41 suara, 34 suara menolak, 3 suara menyetujui dan 4 suara blanko. Karena itu kongres menuntut agar pemerintah mencabut rancangan undang-undang tersebut. Kemudian oleh kongres dibicarakan juga masalah tanah partikelir. Dalam kaitan ini kongres menuntut agar *Poenale Sanctie* dihapuskan.<sup>28)</sup>

Demikianlah kehebatan perkumpulan yang didirikan H. Samanhudi. Pada masa itu anggota Sarekat Islam sudah mencapai jumlah 450.000 orang dan tersebar dalam 87 Sarekat Islam lokal. Ini berarti bahwa pengaruh Sarekat Islam di dalam masyarakat sudah sangat besar.<sup>29)</sup>

Di samping itu, perlu kita ketahui pula, bahwa pada masa itu Sarekat Islam bersama-sama dengan *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV), Budi Utomo (BO) dan *Nationale Indische Partij* (NIP) tergabung dalam apa yang disebut *Radicale Concentratie*, yaitu sebuah fraksi yang berhaluan radikal menurut ukuran pada masa itu.<sup>30)</sup> Fraksi tersebut bertujuan mengadakan Parlemen sendiri, tetapi ikhtiar ini belum berhasil.

Sebagai contoh bagaimana sikap politik *Radicale Concentratie* itu, adalah pernyataan fraksi tersebut terhadap amanat pemerintah yang dibacakan Mr. Dr. D. Talma dalam sidang *Volksraad* pada tanggal 18 Nopember 1918.

Amanat tersebut antaranya berbunyi sebagai berikut,

"... Segala aturan yang kurang baik, sebagaimana ia telah dilahirkan di muka sidang *Volksraad*, akan ditiadakan. Guna usaha itu hendaklah dibentuk suatu panitia, yang akan melakukan pemeriksaan, tentang keadaan dan perhubungan-perhubungan di dunia gula. Kepada Menteri Jajahan telah disampaikan permintaan, supaya bunyi fasal 111 *Regeringsreglement* yang membatasi hak berkumpul dan bersidang, ditinjau kembali. Aturan memberi makan kepada tentara, hal ikhwal di dalam tangsi tentara yang tidak memuaskan, dan hal hukum tentara yang pincang, akan diperbaiki.<sup>31)</sup>

Para anggota *Radicale Concentratie* menganggap bahwa janji yang terdapat dalam amanat tersebut agak kurang terang dan tidak



nyata batas-batas lingkungannya. Oleh karena itu, Tjipto Mangunkusumo, Craemer, Dwidjosewojo, Abdul Muis, dan Tjokroaminoto memasukkan nota yang isinya suatu permintaan agar ada kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Membentuk suatu dewan kerajaan (*Rijksraad*), yang memberi tempat kepada semua negara yang termasuk kerajaan Nederland menjadi anggota dengan hak dan suara yang sama.
2. Mengubah *Volksraad* menjadi suatu dewan perwakilan rakyat yang berhak mengeluarkan undang-undang, terdiri atas anggota-anggota yang dipilih, serta menambah jumlah anggotanya.
3. Mengubah *Raad van Indie* menjadi *Raad van State*, terdiri atas anggota-anggota yang tidak dilihat dari kebangsaannya, sedang untuk orang yang bukan pegawai negeri disediakan tempat secukupnya.
4. Mengganti kepala-kepala departemen dengan menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada *Volksraad*, sedang aturan membagi-bagi tempat kedudukan departemen diubah.
5. Menyerahkan penetapan anggaran belanja kepada dewan perwakilan rakyat yang berhak mengeluarkan Undang-undang, dan memberi hak kepada Gubernur Jendral untuk minta pertimbangan dewan kerajaan atas keputusan dewan perwakilan rakyat, jika dalam keputusan tersebut satu dan lain perkara yang tidak berkenaan di hatinya; jika dewan kerajaan belum dibentuk, ia dapat minta pertimbangan badan pemerintahan di Nederland yang berhak mengeluarkan undang-undang.
6. Menambah susunan pemerintahan menuju ke arah desentralisasi, terutama dengan membentuk dewan-dewan untuk desa-desa dan kabupaten termasuk yang terletak di luar pulau Jawa.<sup>32)</sup>

Pada tanggal 17 Desember 1918, panitia seperti yang dijanjikan pemerintah dalam amanatnya di muka sidang *Volksraad* pada tanggal 18 November 1918, dilantik. Panitia itu bernama *Herzieningscommissie* dan dipimpin oleh Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting. Panitia ini merupakan alat penahan fihak pemerintah terhadap tiap-tiap desakan di dalam dan di luar *Volksraad*, yang menuntut agar apa yang diminta oleh mosi U.S. Tjokroaminoto cs. dan mosi Achmad Djajadiningrat cs. segera dilaksanakan. Terhadap tuntutan tersebut pemerintah selalu mengulur-ulur waktu dan berkata, "Tunggulah rencana yang disusun *Herzieningscommissie*."

Pekerjaan panitia Carpentier Alting selesai dalam pertengahan tahun 1920, dan pada tanggal 30 Juni 1920 dikirimkan ke negeri Belanda. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan mosi U.S. Tjokroaminoto atau pendirian Sarekat Islam. Hal itu telah menyebabkan secara berangsur-angsur kepercayaan umum khususnya Sarekat Islam kepada *Volksraad* lenyap. Sementara itu kedudukan U.S. Tjokroaminoto dan Abdul Muis sebagai anggota digantikan oleh H. Agus Salim. Tokoh baru ini juga melaksanakan tugasnya sebagai wakil Sarekat Islam dengan baik. Ia selalu melakukan oposisi secara tegas dan prinsipial.<sup>33)</sup> Demikianlah perkembangan Sarekat Islam yang didirikan H. Samanhudi sampai pertengahan tahun 1920.

Sekarang baiklah kita bicarakan bagaimana sikap Sarekat Islam terhadap *Poenale Sanctie*.

Seperti yang sudah disinggung di bagian muka, terhadap apa yang disebut *Poenale Sanctie* Sarekat Islam yang didirikan H. Samanhudi itu tidak bersikap diam saja, tetapi selalu dengan aktif agar hal itu dihapuskan.

Sebagai contoh adalah berlangsungnya rapat Sarekat Islam di Medan pada tanggal 17 Februari 1918. Rapat itu diselenggarakan oleh Sarekat Islam Cabang Medan, tetapi dihadiri juga oleh para wakil Cabang Sarekat Islam sewilayah Sumatera Timur. Malahan hadir pula dalam rapat itu para wakil perkumpulan lain, wakil pers dan para wakil majikan perkebunan. Dengan demikian tempat

rapat tersebut yaitu gedung *Oranje Bioscoop* penuh dengan manusia yang tidak kurang dari 700 orang jumlahnya. Pembicara utama dalam rapat tersebut adalah Mohammad Samin, sedang yang menjadi topik pembicaraannya adalah *Poenale Sanctie*.<sup>34)</sup>

Pembicara menguraikan dengan panjang lebar sejarah tanah Deli dan perkembangan perkebunan yang telah mencapai hasil yang besar berkat penggunaan tenaga para imigran dari Jawa dalam ikatan *Koelie Ordonnantie*. Di situ dibeberkan adanya penipuan sejak kegiatan mencari tenaga sampai kepada penggunaan tenaga, penderitaan pahit yang dialami oleh para pekerja, hukuman berat yang selalu diterima oleh para pekerja kalau mereka lalai atau lari, juga tendangan dan pukulan yang selalu mereka terima sehari-hari. Sesudah mendengarkan uraian Mohammad Samin tersebut, rapat mengambil putusan, bahwa Sarekat Islam Medan mengutuk apa yang disebut *Poenale Sanctie*.<sup>35)</sup>

Kemudian ketika berlangsungnya Kongres Nasional Sarekat Islam II pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober 1918 di Surabaya, Mohammad Samin mengusulkan agar keputusan Sarekat Islam Medan tersebut didukung dan diteguhkan. Usul itu dapat diterima baik oleh kongres, dan dengan demikian lahirlah keputusan kongres yang dalam garis besarnya sebagai berikut:

1. *Poenale Sanctie* harus dihapuskan.
2. Gaji kuli sekurang-kurangnya 60 sen sehari.
3. Lama bekerja sehari maksimum 8 jam.
4. Pihak kuli dapat memutuskan kontrak.
5. Kuli yang sudah bekerja 15 tahun mempunyai hak pensiun.
6. Kuli yang ingin menetap di Sumatera Timur berhak mendapat tanah dengan hak guna usaha (*erfelijk individueel bezit*).
7. Segala perkara kuli diadili oleh hakim pengadilan negeri (*landrechter*).
8. Wanita sejak mengandung 7 bulan sampai 40 hari sesudah melahirkan berhak cuti dan tetap berhak menerima gaji.



Kecuali itu wanita tidak boleh diberi pekerjaan mencangkul.

9. Anak-anak kuli harus dididik di sekolah-sekolah.
10. Perjudian di kebun dilarang.

Pada tanggal 3 Februari berlangsung pula konperensi Sarekat Islam Wilayah I Sumatera Timur di Tebing Tinggi (Deli). Konperensi itu mendapat perhatian penuh dari segala fihak. Yang hadir sebagai utusan Centraal Sarekat Islam adalah Abdul Muis, yang ketika itu sudah menjadi anggota *Volksraad*. Abdul Muis memberi penjelasan mengenai apa sebabnya maka Sarekat Islam menentang *Poenale Sanctie*. Menurut tokoh tersebut, *Poenale Sanctie* adalah perbudakan yang terselubung, padahal jika fihak majikan mau memberi santunan yang wajar kepada para karyawan hasil mereka tentu lebih baik. Berkenaan dengan adanya serangan-serangan dari fihak karyawan terhadap tuan-tuan kebun, Abdul Muis mengatakan pendapatnya, bahwa hal itu tidak lain hanyalah disebabkan oleh kekurangajaran tuan-tuan kebun tersebut.<sup>36)</sup>

Kemudian pada akhir kunjungannya ke Medan itu Abdul Muis memberi ceramah atas permintaan masyarakat Belanda. Ceramah berlangsung di ruang tamu Medan Hotel dan dihadiri juga oleh pejabat-pejabat penting, misalnya Asisten Residen, Bupati, Walikota, Komisaris Polisi dan para anggota dewan lokal.

Dalam ceramahnya yang bertalian dengan sikap dan tujuan Sarekat Islam, Abdul Muis menerangkan, bahwa organisasi tersebut dan khususnya dirinya sendiri bertujuan memerdekakan Hindia dengan cara parlementer, mengusahakan pendidikan atau peningkatan kecerdasan rakyat, dan memperjuangkan hapusnya *Poenale Sanctie*.<sup>37)</sup>

Dalam pada itu, dalam kegiatannya Sarekat Islam juga mempunyai beberapa surat kabar. *Oetoesan Hindia* terbit sesudah Sarekat Islam mengadakan kongresnya yang pertama pada akhir bulan Januari 1913. Surat kabar itu diasuh oleh U.S. Tjokroaminoto. Karangan-karangan Tirtodanudirdjo dan karangan-karangan Samsi dari Semarang sangat tajam dan menarik perhatian umum.

Dua orang penulis itu sering berurusan dengan pengadilan karena tulisan-tulisan mereka dalam surat kabar. Tulisan-tulisan U.S. Tjokroaminoto bersifat terang dan bermutu tinggi.

Singkatan nama-nama penulis muncul silih berganti di dalam surat kabar tersebut. Singkatan nama-nama itu adalah: O.S.Tj (Oemar Said Tjokroaminoto), Tj.Mk. (Tjipto Mangunkusumo), A.P. (Alimin Prawirohardjo), A.H.W. (Wignjadisastra). Kecuali nama-nama yang sudah disebutkan itu, nama Surjapranoto perlu disebut pula, sebab tulisan ini sering muncul dan baik pula.

Yang dimuat di dalam Oetoesan Hindia meliputi dunia pergerakan politik, ekonomi dan perburuhan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan Sarekat Islam. Kelemahan yang terdapat di dalam surat kabar Oetoesan Hindia adalah kurangnya pemasangan iklan. Hal itu menyebabkan surat kabar tersebut sukar dapat bertahan. Faktor ini bersama-sama dengan faktor-faktor lain, yaitu banyaknya perkara yang dihadapi Sarekat Islam, perpecahan yang terjadi di dalam perkumpulan ini dan dihukumnya U.S. Tjokroaminoto telah menyebabkan Oetoesan Hindia mulai triwulan pertama tahun 1923 tidak dapat terbit lagi.

Di samping Oetoesan Hindia, ada juga surat kabar lain yang diterbitkan oleh Sarekat Islam. Di Semarang: *Sinar Jawa*, di Betawi, *Pantjaran Warta* dan di Surakarta terbit *Sarotomo*. Mula-mula surat kabar yang disebut terakhir itu kurang berarti, tetapi kemudian karena pengaruh Oetoesan Hindia menjadi lebih bermutu. Demikian pula karena munculnya Mas Marco Dikromo, yang masih berusia 23 tahun dan karangan-karangannya mempunyai gaya tulis yang khas, perkembangan *Sarotomo* makin baik.<sup>38)</sup>

Jelaslah bahwa Sarekat Islam mempunyai kegiatan yang baik dalam penerbitan surat kabar. Dengan demikian tampaklah bahwa para pemimpinnya sudah menyadari betapa pentingnya arti surat kabar bagi perjuangan bangsa. Kecuali dalam bidang penerbitan surat kabar, sebenarnya Sarekat Islam juga mempunyai kegiatan dalam bidang lain, misalnya pergerakan Sarekat Islam Sekerja,

kewanitaan, kepramukaan, pendidikan dan lain-lain yang belum dibicarakan dalam penulisan buku ini. Semua kegiatan itu merupakan gema perjuangan H. Samanhudi. Gema tersebut adalah gema yang membangunkan, mempersatukan, mengarahkan, dan mengobarkan semangat perjuangan umat Islam Indonesia khususnya, serta bangsa Indonesia umumnya, demi terdapatnya masyarakat yang sejahtera lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kongres Nasional keempat, di Surabaya, 26 Oktober – 2 Nopember 1919, melahirkan semangat yang berkobar-kobar menentang penjajahan asing, dalam bentuknya yang kapitalistis dan mengadakan pembelaan gigih terhadap perjuangan rakyat jelata supaya memperoleh kedudukan lebih baik. Semangat perjuangan ini, akhirnya membanjiri daerah-daerah yang malahan mengakibatkan kerusuhan-kerusuhan di mana-mana, sehingga pada tanggal 5 Juni 1919, terjadi pembunuhan di Toli-Toli, selanjutnya perkara yang biasa disebut *Tjimoreme Affair*, (Garut), sehingga dapat dipakai sebagai alasan oleh Pemerintah Hindia Belanda, untuk mencabut hak badan hukum dari beberapa lokal SI, yang pada waktu itu sudah mencatat anggota 2.250.000 orang, dan oleh karena itu sangat ditakuti oleh Pemerintah Belanda.

Situasi yang menghangat itu mendorong SI menyelenggarakan *Natiko* atau kongres Nasional yang kelima pada tahun itu juga, di situ diputuskan, untuk membangun beberapa Komite bekerja, seperti Komite Politik, Komite Agama, Komite Adat, Komite Pergerakan Kaum Buruh, dan Komite Kooperasi. Kesemuanya itu harus berhubungan dengan *Komite Tentara Kanjeng Nabi Muhammad* dan *Komite Jawa Dwipa* yang menjadi motor pergerakan. Ajaran Islam mengenai sosialisme benar-benar dipraktekkan oleh SI, sehingga semua anggota harus berbicara dengan bahasa biasa, (*ngoko*) tidak membedakan apakah ia berasal bangsawan atau bukan. Tujuannya, ialah menghilangkan jiwa feodal yang masih kuat di kalangan bangsa Indonesia di waktu itu.

Tahun 1920 kekuatan baru menghembus dari luar ke dalam SI, beberapa kekuatan ingin membelokkan SI dari semula, yakni dari ajaran Islam, misalnya Darsono, yang hendak menjadikan SI



menjadi Sarekat Internasional, dan ada pula yang hendak mengubahnya dengan nama Sarekat Hindia. Penyelewengan ini tidak sampai terjadi, karena keteguhan pendirian pemimpin-pemimpinnya, yang duduk dalam pucuk pimpinan, bahwa asas Islam harus dipegang teguh untuk seterusnya, tidak mungkin SI kemudian mengikuti gerakan Komunis Internasional. Tetapi aliran Komunis mengadakan perlawanan yang hebat kepada SI Komite Sentral. Pertentangan faham ini kelihatan nyata, ketika *Natiko* (Kongres Nasional) berlangsung di Yogyakarta, pada bulan Maret 1921, di situ mereka minta diperbincangkan masalah disiplin Partai. Dalam *Natiko* kali inilah SI memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai Partai Politik, dengan nama PSI atau *Partai Sarekat Islam*. Kemudian dalam Kongresnya di Surabaya, Tjokroaminoto tidak dapat memimpin sendiri, karena ditahan oleh pemerintah kolonial, maka pimpinan kongres dipegang H.A. Salim dan Abdul Muis. Serangan pihak Komunis makin bertambah hebat, dan dalam gerakannya itu, banyaklah sarekat-sarekat sekerjanya yang diambil, juga beberapa lokal SI yang kemudian memisahkan diri, terkenal sebagai SI Merah.

Arus baru terjadi, ketika pada tahun 1922, dilangsungkan untuk pertama kalinya "Al-Islam Kongres", yang menghasilkan semangat kebangkitan umat Islam, yang ada di luar maupun di dalam PSI. Dalam *Natiko* yang ke tujuh, pada tanggal 17-22 Pebruari 1925, di Madiun, terjadi lagi pertengkaran sengit antara penganut prinsip SI lama dengan kaum Komunis SI, yang kemudian memisahkan diri dari Sarekat Islam Hindia Timur. SI Merah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia). Di sinilah Partai disiplin diperkuat, sehingga pemimpin Partai yang beraliran Komunis dikeluarkan dari Partai; gerakan pembersihan ini terus-menerus disempurnakan. Dalam pada itu, wanita PSI juga mendapat perhatian khusus, ternyata dengan dibentuknya seksi *Wanita Wandoyo*, yang aktif bertindak dalam bidangnya. Al-Islam Kongres yang berlangsung di Garut membahas secara ilmiah dan terbuka, Marxisme dan Sosialisme dalam Islam. Di sini orang diinsvafkan untuk kembali kepada kehidupan dan cara hidup Nabi

Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya, yang mempraktekkan sosialisme sebenarnya dalam garis ajaran Islam. Umat Islam sadar dan bangkit kembali, serta melihat bahaya kolonialisme Belanda, yang telah lama berkuasa di bumi Indonesia. Karena itulah pada tahun 1924, PSI memutuskan politik berhijrah, tidak lagi mau koperasi dengan pemerintah Belanda, tidak mengirimkan wakil-wakilnya lagi dalam Dewan Perwakilan Rakyat buatan kolonial atas nama Partai. Al-Islam Kongres yang diadakan tahun itu, membenarkan sikap PSI yang demikian itu, dan memutuskan untuk mengirimkan perutusan ke *Pan Islamical Conference* di Kairo.

Politik Internasional PSI kini mulai menonjol, dalam al-Islam Kongres gabungan, yang dilangsungkan di Yogyakarta, pada tahun 1925, dengan keputusan Kongresnya pada tahun 1926, mengirimkan H.O.S. Tjokroaminoto dari PSI dan H.M. Mansur dari Muhammadiyah untuk menghadiri *Muktamar Alamil Islami* di Mekkah, yang melahirkan cabangnya di Indonesia MAIHIS. Secara maraton, kemudian pada tahun 1926 dan 1927 di Bogor dan Pekalongan, dibuahkan hasil berdirinya *Majlis Kerja-Sama Alim Ulama*, yang mencari hubungan dengan Liga Melawan Imperialisme dan Kapitalisme di luar negeri, memutuskan tekad bulatnya untuk menuju kepada kemerdekaan Indonesia, menuju Indonesia merdeka.

Dalam pada itu timbul dalam lingkungan kegiatan Partai, *Sarekat Islam Afdeeling Advinder* di Yogyakarta. Kongres-kongres PSI pada tahun 1928 dan 1929 di Pekalongan dan Jakarta, pada dasarnya membicarakan pelaksanaan cita-cita PSI, misalnya mengenai apa yang disebut riba, pendirian tentang bank dan sejenisnya. Kongres di tahun 1931, mengubah nama PSI menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Ini mempertegas program perjuangan Partai untuk mencapai kemerdekaan seluruh wilayah Indonesia bebas dari pada penjajahan.<sup>39)</sup>

Kegiatan Sarekat Islam sepanjang masa itu merupakan gema perjuangan yang telah dirintis oleh H. Samanhudi.

## Catatan

- 1) a. Mohammad Roem, *Tiga peristiwa Bersedjarah*, p.t. Sinar Hudaya, Djakarta, 1971, hal. 9.  
b. Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto, *Hidup dan Perjuangannya*, Bulan Bintang, Djakarta, 1952, hal. 105.
- 2) Mohammad Roem, *op.cit.*, hal. 11.
- 3) a. Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*.  
b. Amelz, *op.cit.*, hal. 106.
- 4) Mohammad Roem, *op.cit.*, hal. 14.
- 5) *Ibid.*, hal. 13.
- 5a) L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, hal. 327-332.
- 6) *Ibid.*, hal. 11.
- 7) *Ibid.*, hal. 14.
- 8) S.J. Rutgers, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, c.v. Hajam Wuruk, Surabaya hal. 8.
- 9) Mohammad Roem, *op.cit.*, hal. 14-16.
- 10) *Ibid.*, hal. 16.
- 11) D.M.G Koch, *Menuju Kemerdekaan*, terjemahan Abdoel Moeis, Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1951, hal. 59.
- 12) *Ibid.*, *loc. cit.*
- 13) *Ibid.*, hal. 59-60.
- 14) G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Djakarta, 1960, hal. 269.
- 15) D.M.G Koch, *op.cit.*, hal. 60.
- 16) *Ibid.*, *loc.cit.*
- 17) Amelz, *op.cit.*, hal. 106.
- 18) S.J. Rutgers, *op.cit.*, hal. 10.
- 19) D.M.G Koch, *op.cit.*, hal. 61-62.
- 20) *Ibid.*, hal. 62.
- 21) *Ibid.*, *loc. cit.*
- 22) *Ibid.*, hal. 65-66.
- 23) *Ibid.*, hal. 66.
- 24) Amelz, *op.cit.* hal. 108.
- 25) D.M.G Koch, *op.cit.*, hal. 66-67.
- 26) *Ibid.*, hal. 68.
- 27) Susanto Tirtoprodjo, *op.cit.*, hal. 31.



- 28) D.M.G Koch, *op.cit.*, hal.69.
- 29) Susanto Tirtoprodjo, *op.cit.*, hal. 31.
- 30) a. A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1978, hal. 8.  
b. Susanto Tirtoprodjo, *op.cit.*, hal. 15.
- 31) D.M.G Koch, *op.cit.*, hal. 72.
- 32) *Ibid.*, hal. 73–74
- 33) Amelz, *op.cit.*, hal. 110.
- 34) H. Mohammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe*, Percetakan Waspada, Medan, 1977, hal. 120.
- 35) *Ibid.*, hal. 120–121. .
- 36) a. Amelz, *op.cit.*, hal. 108–109.  
b. H. Mohammad Said, *op.cit.*, hal. 121.
- 37) *Ibid.*, hal. 123–124.
- 38) Sartono Kartodirdjo dkk., *Sejarah Nasional Indonesia, V*, Balai Pustaka, 1977. hal. 305–307.
- 39) L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, hal. 327–332.

## PENUTUP

Jelaslah bahwa H. Samanhudi adalah pelopor kebangkitan politik umat Islam Indonesia dan bangsa Indonesia seluruhnya. Dalam kedudukannya sebagai pelopor tersebut, ia telah memberikan hampir seluruh pikiran, tenaga dan hartanya kepada perjuangan untuk mencapai kesejahteraan lahir batin bangsa Indonesia. Meskipun seorang pengusaha, dalam perjuangan untuk memperbaiki nasib bangsanya ia tidak mengenal untung rugi, sebab keuntungan yang hendak dicapainya adalah keuntungan bagi bangsanya. Menurut H. Samanhudi, jika bangsanya sudah menjadi lebih baik keadaannya, itu adalah keuntungan baginya.

Sikap demikianlah yang menyebabkan Sarekat Dagang Islam yang semula kecil dan anggotanya hanya terdiri dari para pedagang bumiputera penduduk karesidenan Surakarta saja, segera menjadi perkumpulan yang besar. Apalagi sesudah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam (resminya mulai tanggal 10 September 1912) perkumpulan tersebut dengan cepat menjadi perkumpulan yang sangat besar.

Pada awal tahun 1913 anggotanya sudah berjumlah tidak kurang dari 80.000. Pada pertengahan tahun 1916 jumlah tersebut sudah meningkat menjadi kira-kira 360.000 orang, sedang organisasinya sudah berkembang meliputi daerah-daerah di luar pulau Jawa. Pada tahun 1918 jumlah anggotanya meningkat menjadi 450.000 orang,<sup>1)</sup> sedang Sarekat Islam lokal yang tergabung di dalamnya sudah mencapai jumlah 87 buah. Kemudian pada tahun 1919 jumlah Sarekat Islam terus berkembang menjadi organisasi pergerakan rakyat Indonesia yang sangat besar.

Seiring dengan kebesaran organisasinya yang makin lama makin meningkat itu, peranan yang dimainkan oleh Sarekat Islam

bagi perkembangan masyarakat bangsa Indonesia makin lama makin berarti. Karena jasa Sarekat Islam, maka secara berangsur-angsur rakyat Indonesia yang pada masa itu disebut *Inlanders* dan dihina oleh bangsa-bangsa Asing, memperoleh nilai sebagai manusia yang sebenarnya. Karena jasa Sarekat Islam pula, maka rakyat Indonesia mempunyai kesadaran berpolitik dan bertekad untuk lepas dari kungkungan penjajahan. Demikian pula karena jasa Sarekat Islam, maka rakyat Indonesia yang tinggal di berbagai pulau dan terdiri atas berbagai suku, adat, serta bahasa, dapat bersatu padu untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan lahir batin dalam wadah kemerdekaan.

Sehubungan dengan hal itu kita kutip pendapat S. Surya Ningrat sebagai berikut,

"... Tetapi selama cita-cita yang tidak bisa disangkal lagi dari organisasi itu (SI) ialah mengakhiri perlakuan tidak adil dan tidak sah terhadap rakyat bumiputera begitu jelas terutama pada permulaan ciri kerokhaniaan Sarekat Islam tetap demokratis dan sangat siap untuk berjuang.

Apabila oleh karena keadaan yang luar biasa aksinya kelak seolah-olah berubah, hal ini segera akan jelas hanyalah merupakan ketrampilan taktis pimpinannya.

Perkumpulan itu hanya menerima orang Muslim, tidak karena Sarekat Islam itu menjadi suatu partai agama, tetapi karena pertimbangan bahwa hanyalah Islam dapat dipergunakan dengan berhasil sebagai alat pengikat bagi penduduk Hindia yang heterogen itu. Yang berada di luarnya dengan itu akan terbatas pada bagian kecil yang tidak berarti. Bahwa Sarekat Islam bersifat nasionalis Hindia, ternyata dari anggaran dasarnya, di mana terdapat ketentuan, bahwa orang Islam berkebangsaan asing tidak boleh menduduki tempat-tempat yang penting di dalam pimpinan partai, sedangkan hanya mereka yang telah membuktikan dirinya berguna bagi masyarakat bumiputera dengan tindak-perbuatan, boleh diterima di dalam pengurus lokal sebagai anggota pendengar..."<sup>2</sup>)

Begitulah kebesaran dan jasa Sarekat Islam yang berarti pula kebesaran dan jasa H. Samanhudi. Dengan demikian jelaslah bahwa H. Samanhudi adalah seorang tokoh yang sangat berprestasi atau seorang pahlawan bangsa Indonesia yang sangat berjasa.

Hanya berbeda dengan namanya yang harum semerbak dan



meliputi bumi Nusantara itu, kehidupan pribadi H. Samanhudi makin lama makin merosot. Karena ia selalu mencurahkan tenaga dan pikiran kepada pergerakan saja, maka perusahaannya tidak lagi terurus dan makin lama makin mundur. Apalagi sesudah anaknya yang ke dua (Ny. Atmohartono) menikah pada tahun 1922 dan karenanya tidak ada lagi yang mengurus, maka perusahaannya bangkrut sama sekali.<sup>3</sup>) Dengan demikian jadilah H. Samanhudi seorang yang tidak lagi kaya raya tetapi biasa saja. Ia hidup dengan bantuan putera dan puterinya berganti-ganti, padahal hampir semua putera dan puterinya, kecuali Ny. Atmohartono, tidak tergolong orang berada. Dengan demikian ia pernah tinggal di Nganjuk, Mojokerto dan Klaten karena ikut puteranya, yaitu Sawab Tjokrowiguno selama kira-kira tiga tahun di Laweyan.

Sementara itu rumahnya dan gedung-gedung yang semula dipakai sebagai kantor Sarekat Islam terpaksa dijual karena keadaan. Dalam kaitan dengan uraian mengenai nasib H. Samanhudi itu baiklah kita baca tulisan Tamar Djaja sebagai berikut,

"... H. Samanhudi telah memelopori Sarekat Islam. Ia telah berusaha sekuat tenaganya dalam gerakan itu. Kekayaannya pun sampai habis, dan ia jadi bangkrut. Yang lebih menyedihkan setelah pimpinan dilepaskannya, ia seakan-akan tidak memperdulikan lagi. Berapa rumah dan fabriknya telah habis. Ia hidup di kota Solo sebagai orang yang dilupakan. Ia telah miskin dan menderita, tak punya apa-apa lagi. Kaum sepergerakan tak ada yang menengok. Apalagi memberi bantuan. Rupanya begitu nasib seorang pemimpin di Indonesia ini. Kebanyakan dilupakan setelah tidak aktif lagi. Kurang menghargai jasa."

Parada Harahap menulis dalam *Tjahaya Timur* di tahun 1940, menceritakan nasib H. Samanhudi. Hidup melarat dan menderita. Tinggal di sebuah gubuk tua. Kawan-kawannya tak seorang pun yang mengindahkan. Padahal ia adalah pelopor pergerakan Islam.

Kalau tidak ia yang membangun SDI, entah siapa yang akan memulainya. Entah kapan dapat dimulai. Sayang sekali, kata Parada, orang Indonesia cepat menerima jasa, tetapi lupa membalasnya. Tahun 1955, barulah pemerintah Republik Indonesia mengenalnya. Ia diberi bantuan merupakan pensiun setiap bulan.

Ia disebutkan "Perintis Kemerdekaan" yang perlu dihormati.

Bersama H. Samanhudi, diberi pula Abdul Muis juga dari Sarekat Islam. Ki Hajar Dewantara dari Taman Siswa, dan beribu-ribu Perintis kemerdekaan lainnya yang telah berjasa tapi masih hidup. Sekitar 7000 orang Perintis Kemerdekaan Indonesia, diberi tunjangan oleh Pemerintah. Bantuan apa pun tunjangan itu sebenarnya terlalu sedikit, jika dibanding dengan pengorbanan dan penderitaan yang mereka derita selama berjuang melawan kolonialis Belanda.

H. Samanhudi telah meninggal dunia 28 Desember 1956 di Klaten Solo dalam usia cukup tua.<sup>4)</sup>



*Foto H. Samanhudi  
pada hari tuanya*

## Catatan

- 1) Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, P.T. Pembangunan Jakarta, 1970, hal. 31.
- 2) S. Surya Ningrat, "Aliran Dan Partai Di Hindia Timur", Saduran Abdurrachman Surjomihardjo, *Budaya Jaya*, Mei 1978, hal. 302-304.
- 3) Wawancara dengan Ibu Atmohartono dan Bapak Sahlan Sastromartono pada tanggal 15 Oktober 1978.
- 4) Tamar Djaja, *Orang-orang Besar Indonesia II*, Pustaka Antara, Jakarta, 1974, hal. 65-66.



*Foto bersama para Pengurus Sarekat Islam*





*Foto keluarga H. Samanhudi*

**STATUTEN**  
**PERHIMPOENAN "CENTRAAL SAREKAT ISLAM"**  
**BERDOEKDOEK DI SOERAKARTA**

**Nama, tempat dan lamanja**

**Fatzal 1**

Perhimpoean itu memakai nama "Centraal Sarekat Islam", berdoekdoek di Soerakarta, residentie Soerakarta, dan didirikan boeat lamanja doea poeloeh sembilan taoen moelai pada hari statuten ini diperkenankan oleh Seri Padoeka Jang Dipertoean Besar Gouverneur Generaal Hindia Belanda.

**Maksoed dan pekerdjaannja**

**Fatzal 2**

Maksoednja perhimpoean jaitoe:

a. memadjoekan pendiriannja perhimpoean-perhimpoean jang bermaksoed akan menaikkan peri hal ingatan dan derajat peri kehidoepannja orang-orang pendoeckdoek Boemi-poetera, dan jang statuennja bersamaan dengan jang ditentoekan diatas perkara itoe pada fatzal tiga;

b. memberi nasehat dan pertolongan kepada perhimpoean-perhimpoean jang seroeпа itoe didalam toedjoeannja akan menjampaiakan maksoednja;

c. mendjadikan dan memeliharaakan pergaoelan dan sepakat bantoe membantoe kerdja diantara perhimpoean-perhimpoean jang seroeпа itoe.

Maksoed ini akan disampaikanja dengan segala daja oepaja, jang tiada melanggar wet-wet Negeri, adat-istiadat jang baik dan ketertiban oemoem.

**Lid - Lid**

**Fatzal 3**

Jang boleh menjadi lidnja perhimpoean itoe hanja per-

himpoean-perhimpoean jang ada rechtspersoonlijkheid, jang statutennja bersamaan dengan isinja lampiran jang dipersertakan pada statuten ini.

#### Fatzal 4

Penerimaan lid ada bergantoeng dari pada kepoatoesan soera jang didjadikan oleh Bestuurnja perhimpoean, serta dengan diperiksa adakah candidate itoe mentjoekoepi ketentoean-ketentoean terseboet dalam fatzal tiga, dan adakah dia tiada berboeat kelakoean jang melanggar wet atau statutennja.

Permintaan boeat mendjadi lid disampaikan dengan soerat atau bitjara oleh perhimpoean-candidate itoe serta memberikan selebar statuten dan huishoudelijk reglementnja.

#### Fatzal 5

Pangkat lid dari pada perhimpoean itoe terhentilah:

- 1e. oleh karena lepas dari maoenja sendiri.
- 2e. oleh karena dilepas dari pada pangkal lid.

Kelepasan ini didjadikan oleh Bestuur, apabila ternjata, bahwa soeatu lid kelakoeannja tiada menoeroet dia poenja statuten atau bikin chawatir atas keamanan dan ketertiban oemoem.

Kelepasan itoe boleh didoega didjadikan atas soerat voorstelnja sekoerang-koerangnja doea poeloeh lid perhimpoean, dengan diterangkan sebab-sebab jang soedah menjadi lantaran membikin voorstel itoe dalam soeatoe vergaderingnja Bestuur diterima sah dengan ketentoean setjara lebih banjak.

Kelepasan itoe boleh joega didjadikan djikalau ada soeatoe lid jang tiada soeka membajar oeang menjadi tanggoengannja bagi perhimpoean, dengan mengingati atoeran-atoeran diatas perkara itoe jang akan ditentoean dalam huishoudelijk reglement.

#### Fatzal 6

Lagi poela perhimpoean itoe terdiri dari pada eereleden



(lid-lid kehormatan) dan donateur-donateur.

Eere lid jaitu baik manoesia sedjati baik perhimpoean jang ada hak rechtspersoonlijkheid, jang soedah diangkatnja oleh algemeene vergaderingnja lid-lid atas voorstelnja Bestuur perhimpoean, jaitoe lantaran dari djasanja jang besar bagi perhimpoean.

Donateur jaitoe baik manoesia sedjati maoepoen perhimpoean jang ada hak rechtspersoonlijkheid, jang memberi sekali sahadja oeang f. 500 kepada perhimpoean, atau saban boelan memberi oeroenan sedikitnja f. 10 kepada kasnja perhimpoean.

## B e s t u u r

### Fatzal 7

Bestuurnja perhimpoean itoe terdiri dari pada:  
satoe voorzitter.

satoe onder voorzitter.

satoe secretaris dan satoe sampai tiga onder secretaris.

satoe penningmeester atau lebih.

sekoerang-koerangnja empat commisaris, dan satoe adviseur atau lebih.

Bestuur ini ditetapkan dalam algemeene vergadering jang diperboeat fatzal tiga belas.

Kadang-kadang ada djadi pangkat terboeka, ialah apabila ada satoe lid bestuur jang minta lepas atau dapat lepas dalam algemeene vergadering.

Bestuur mendjadi wakilnja perhimpoean baik didalam atau diloeuar hoekoem.

Voorzitter dan secretaris baik bersama-sama atau masing-masing dengan diri sendiri dengan ini dikoeasakan akan berlakce boeat dan atas namanja Bestuur didalam semoea perkara civil, jang berkenaan dengan perhimpoean, baik dalam hal mendjalankan atau melawan dakwa, menghadap boeat keperloeian itoe kepada semoea hakim-hakim, madjelis-madjelis hoekoem dan pembesar

koeasa lain-lain dan memboeboeh tanda tangan diatas semoea soerat-soerat pertanda dan soerat-soerat permohonan, soerat-soerat peringatan dan lain-lain soerat bagaimana joega roepa maksoednja, jang bergoena atas perkara itoe.

### Fatzal 8

Lid-/lidnja Bestuur dipilih boeat lamanja tiga tahoen, tetapi mereka itoe kalaoe soedah berhenti laloe boleh dipilih lagi.

Dalam Bestuur tiada boleh ada lebih dari pada doea orang, jang tiada termasuk bangsa jang terseboet Boemi-poetra sedjati boeat ampoenja hak kedoedoekan disitoe, dan mereka itoe hanja boleh mendjadi comisaris atau adviseur sahadja.

### Fatzal 9

Bestuur ada koeasa mengoeroes dan memerintah atas hal ihwal perkaranja perhimpoean. Bestuur dikoeasakan mendjalankan perboeatan dari pada hal oeroesan dan barang kepoenjaan.

Tetapi Bestuur tiada boleh memboeat perdjandjian hoetang oeang atau menjoeal atau menggadaikan barang-barang tetap, kepoenjaan perhimpoean djikalau tiada dengan sah kebenarannja lid-lid lebih doeloe, jang diberikan dalam soeatoe algemeene vergadering dengan ketentoean setjara lebih banjak.

### Fatzal 10

Bagian kerdja dan batasan pekerdjaannja tiap-tiap satoe lid dari pada Bestuur diatoer sendiri-sendiri dalam huishoudelijk reglement.

### Fatzal 11

Bestuur senantiasa mendjalankan pendjagaan mengawaskan kelakoeannja lid-lid.

Apabila seorang bestuurder dari pada soeatoe perhimpoean lid kesalahan dari pada sebab oeroesan tiada baik, kelakoean,

djahat atau perboeatan jang mendjadikan chawatir atas keamanan dan ketertiban oemoem, maka Bestuur barang bila telah mengetahoeinja atas hal itoe, wajiblah memintakan lepasnja bestuurder jang seroeпа itoe.

Djikalaoe ada djadi perkara seperti demikian diatas soeatoe lidnja Bestuur sendiri, maka diperboeatlah algemeene vergadering akan menentoekan lepasnja orang jang berboeat salah, dan memilih gantinja.

## Fatzal 12

Atas permintaannya Bestuur maka didalam algemeene vergaderingnja lid-lid dengan ketentoean soera lebih banjak bolehlah diangkat seorang atau soeatoe perhimpoean jang pada hak rechts-persoonlijkheid boeat mendjadi beschermheer dari pada perhimpoean ini; djoega dengan lakoe jang seroeпа itu bolehlah diangkatnja mendjadi eere-voorzitter salah seorang diantara lid-lidnja salah satoe perhimpoean lid.

## Vergadering-vergadering

### Fatzal 13

Setiap taoen adalah diperboeat soeatoe algemeene vergadering pada waktoe jang lagi akan ditentoekan dalam huishoudelijk reglement; dalam vergadering itoe Bestuur memboeka rekening dan verantwoording dari pada hal oeroesan oeang jang telah diperdjalan kannja, dan kasih verslag dari pada barang pekerdjaannya perhimpoean dalam taoen jang laloe.

Apabila algemeene bergadering tiada boleh memberi sah kebenaran diatas rekening dan verantwoording itoe, maka oleh algemeene vergadering diangkatnja soeatoe commissie dari pada tiga orang, akan memeriksai dan boekoe-boekoe serta soerat-soerat jang berhubungan dengan rekening itoe.

Apabila commissie tiada soeka memberi sah kebenaran atas rekening itoe, maka Bestuur boleh minta kepoetoesannya al-



meene vergadering.

Djikalaoe rekening kedapatan betoel, maka Bestuur poen terlepaslah dengan selamat dari pada perkara oeroesan jang soedah didjalankannja.

Di dalam huishoudelijk reglement ada dimoeatkan anggaran ketentoean boeat mengatoer dengan baik djalannja oeroesan sehari-hari, sehingga lid-lid mengawaskannja.

Lid-lid dalam algemeene vergadering diwakili oleh dia poenja Bestuurder-bestuurder atas djalan sebagaimana lagi akan ditentoean dalam huishoudelijk reglement.

Bestuur ada koeasa, djikalaoe ditimbangnja perloe, boeat mengadakan algemeene vergadering lebih dari satoe kali dalam satoean, dan wadjiblah berboeat begitoe djikalaoe ada permintaannja lid-lid sekoerang-koerang seperpoeloeh dari pada banjakknja lid-lid semoea, dan djikalaoe ada hal seperti terseboet pada alinea penghabisan dari pada fatzal - sebelas.

### **Hak memberi soeara**

#### **Fatzal 14**

### **Hak perhimpoean**

#### **Fatzal 15**

Besarnja oeang pemberian dan oeroesan, jang haroes dibajar oleh lid-lid biasa, dan djoega lakoenja pembajaran oeang itoe ada diatoer di dalam huishoudelijk reglement.

Tiap-tiap lidnja perhimpoean ada ampoenja hak boeat memberi soeara.

Eere-lid dan donateur tiada ada hak boeat memberi soeara.

Atoeran jang menentoeakan bagaimana lakoenja mempergoenakan hak soeara itoe, ditentoeakan dalam huishoudelijk reglement.

## **Perobahan Statuten**

### **Fatzal 16**

Boeat mengobah statuten ini hanja boleh ditentoean didalam algemeene vergadering jang soedah sengadja diadakan boeat hal itoe, dimana haroes ada mengirimkan wakil sedikitnja  $\frac{2}{3}$  bahagian dari semoea lid dan dengan secara kebanyakan sedikitnja  $\frac{2}{3}$  bahagian dari semoea jang soedah dikeloearkan.

Kalau didalam soeatoe algemeene vergadering jang soedah terpanggil tiada mengirimkan wakil sebanjak lid jang mesti ada, sebagaimana soedah ditentoean itoe, maka didalam tiga boelan haroeslah diadakan algemeene vergadering jang kedoea, jang mana akan memoetoeskannja dengan seoara kebanyakan jang biasa, dengan taida memandang banjakkja lid jang mengirimkan wakil.

## **Boebarnja perhimpoean**

### **Fatzal 17**

Boeat memboebarkan perhimpoean hanja boleh ditentoean didalam algemeene vergadering jang soedah sengadja diadakan boeat hal itoe, dimana haroes mengirimkan wakil sedikitnja  $\frac{3}{4}$  bahagian dari banjakkja lid semoea, dan ketentoean boebar itoe didjadikan oleh sedikitnja  $\frac{3}{4}$  bahagian dari soeara-soeara jang soedah dikeloearkan. Djikalaoe didalam, vergadering jang seroepea itoe tiada mengirimkan wakil sebanjak lid jang mesti ada, sebagaimana soedah ditentoean itoe, maka didalam empat boelan haroeslah diadakan algemeene vergadering jang kedoea, dimana orang akan dapat menentoean hal boebarnja perhimpoean dengan secara kebanyakan jang biasa, dengan tiada memandang banjakkja lid jang mengirimkan wakil.

Apabila soedah ditentoean hal boebarnja perhimpoean, maka didalam vergadering itoe diangkatnja soeatoe commissie van liquidatie dari pada seorang atau lebih, jang akan mengoeroes segala perkaranja perhimpoean.

## Houishoudelijk reglement

### Fatzal 18

Di dalam semoea perkaraja perhimpoean jang tiada diatoer oleh statuten ini, diadakannja atoeran di dalam huishoudelijk reglement, jang mana berlawanan dengan statuten ini.

### Bestuur jang sekarang

#### Fatzal 19

Dengan menjimpang dari apa jang soedah ditentoean di dalam statuten ini tentang pilihan Bestuur, maka boeat pertama kali jang menjadi lid-lid bestuur jaitoe:

Voorzitter	:	O.S.Tjokroaminoto, orang dagang.
Onder-voorzitter	:	Goenawan, orang dagang.
Penningmeester	:	D.K. Ardiwinata, hoofd-redakteur h/b Volkslectuur.
Commissaris	:	Hadji Achmad Sjadzili, orang dagang. Sajid Hasan bin Abdurrachman bin Semit, orang dagang. R.M. Arjo Soerjodipoetro, hoofd djaksa. R.P. Sosrokardono, particulier. R. Djojosoediro, particulier. Hadji A. Hisamzajni, orang dagang. R. Tjokrosoedarmo, particulier. R. Mohammad Joesoef, particulier. R.M. Pandji Soerjopranoto, inl. land-bouwleraar Abdoel Moes, particulier. Hadji Mohammad Arip, orang dagang.
Adviseur	:	Hadji Achmad Dachlan, goeroe agama.

#### Fatzal 20

Voorzitter O.S. Tjokroaminoto dengan ini dikoeasakan boeat mohon idzinkannja Seri Padoeka Yang Dipertoean Besar



Gouverneur General Hindia Belanda atas statuten ini, dan mengadakan segala perobahan didalamnja, sebagaimana ditimbangnja perloe boeat mendapat idzin itoe.

### Pemberitaan

Diatas inilah statutenja perhimpoean "Centraal Sarekat Islam" jang soedah diperkenankan oleh algemeene vergadering di Soerabaja, pada hari Senen tanggal 28 Juni j.l. jang terpandang menjadi oprichternja perhimpoean "Centraal S.I." jaitoe perhimpoean-perhimpoean locale S.I. jang soedah mendapat hak rechtspersoonlijkheid. Sekarang Statuten ini lagi dikelilingkan boeat ditandai oleh Bestuurnja beberapa locale S.I. sebagai oprichter, setelah mana kira-kira pada penghabisannja boelan Augustus dimoea ini laloe akan dipersembahkan kepada Pemerintah Agoeng boeat diperkenankannja, dan soepaja perhimpoean "Centraal S.I." diakoenja sebagai rechtspersoon.

Soerabaja, 26 Juli 1915.  
Voorzitter Centraal S.I.

O.S. Tjokroaminoto

## SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, hari Senin tanggal duabelas Agustus seribu sembilan ratus enampuluhtiga, kami jang bertanda tangan dibawah ini :

### SUKANTO SAMANHUDI

bertempat tinggal di Mlindjon, Klaten, putra pria jang tertua dari dan penerima anugrah bintang mahaputra setjara anumerta untuk almarhum ajah kami Kijai Hadji Samanhudi dan atas surat kuasa jang sah tertanggal satu Agustus seribu sembilanratus enampuluhtiga dari saudara-saudara kami kesemuanja putra-putra pria dan wanita almarhum ajah kami dan atas nama seluruh ahliwaris keturunan jang sah dari almarhum Pahlawan Kemerdekaan Nasional KYAI HADJI SAMANHUDI, dengan ini menjatakan :

#### Pertama:

Dengan perasaan terharu dan tulus ichlas menghaturkan terima kasih kami kepada Bapak Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno, atas anugerah beliau jang pada hari ini dengan perantaraan Bapak Wampa Koordinator Kesejahteraan Rakyat *Hadji Muhammad Muljadi Djojomartono* dilimpahkan kepada almarhum ajah kami dan kami sekalian sebagai ahliwaris, dalam wujud sebuah rumah tinggal dan dibangun diatas tanah pemberian hadiah dari pemerintah Kotapradja Surakarta di Lawejan ini.

Kepada Bapak Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno, kami selurush waris keturunan ajah kami, berdjandji, bahwa berdasar hikmah dalam kebidjaksanaan musjawarah akan memelihara dan mendjaga anugerah rumah tersebut dengan sebaik-baiknja dan:

1. Rumah Pahlawan tersebut semata-mata akan digunakan untuk rumah tinggal ahliwaris keturunannja beserta keluarganja.
2. Rumah Pahlawan tersebut sebagian maupun seluruhnja, dengan alasan apapun juga, tidak akan kami sewakan atau

pergunakan perusahaan dalam bentuk apapun juga.

3. Rumah Pahlawan tersebut tidak akan kami jual, gadaikan, beratkan dengan hutang, atau digunakan sebagai tanggungan (djaminan) sesuatu pihutang.
4. Rumah Pahlawan tersebut, tidak akan dipindjamkan untuk waktu lama sehingga tudjuan/penggunaan rumah itu berubah, dan
5. Penghuni rumah Pahlawan tersebut, belum pernah dan tidak akan mengchianati perdjuaan Bangsa Indonesia.

#### Kedua:

Kepada Pemerintah Daerah Kotapradja Surakarta kami menghaturkan pula terima kasih atas izin penggunaan tanah pekarangan di Lawejan ini diatas anugerah rumah pahlawan ini dibangun, hal mana kami artikan sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan dari pemerintah daerah kepada almarhum ajah kami djustru daerah Lawejan ini dahulu mendjadi salah satu pusat perdjuaan almarhum ajah kami bagi kemerdekaan bangsa dan tanah air.

Surat pernjjataan ini dibuat diatas surat bermeterai dalam lima ganda, satu ganda untuk dihaturkan kepada Bapak Pemimpin Besar Revolusi, dan empat ganda serta lampirannja berikut salinan-salinannja untuk para pedjabat sipil dan militer jang berkepentingan dari segenap ahliwaris/keturunan.

Kami jang dikuasakan

Sukanto Samanhudi



## DAFTAR SUMBER

### A. BUKU

- Abu Ahmadi, Drs, *Sejarah Pendidikan*, Penerbit C.V. Toha Putra, Semarang, 1975.
- Amelz, H.O.S. *Tjokroaminoto, Hidup dan perjuangannja*. Bulan Bintang, Djakarta, 1952.
- Anhar Gonggong, H. Umar Said Cokroaminoto, .Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975.
- Badan Pembina Pahlawan Pusat, *Pahlawan Pergerakan Nasional*, Departemen Sosial R.I. Jakarta, 1972.
- Burger, Prof. Dr. D.H. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I*. Pradnjaparamita, Djakarta, 1962.
- Darsiti Suratman, Ny, "*Politik Pendidikan Belanda Dan Masyarakat Di Jawa Pada Akhir Abad 19*", kertas kerja dalam Seminar Sejarah Nasional II di Jogjakarta, 1970.
- Dewantara, Ki Hadjar, *Dari Kebangunan Nasional Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, N.V. Pustaka Penerbit Endang, Djakarta, 1952.
- Dimjati, Jahja, *Peranan Sarekat Islam Dalam Menanamkan Kesadaran Nasional di Indonesia*", kertas kerja dalam Seminar Sedjarah II di Jogjakarta, 1970.
- Gibb, H.A.R., *Modern Trends in Islam. The University of Chicago Press*, Chicago, 1946.
- Gibb, H.A.R., *Islam dalam Lintasan Sedjarah*, Bhratara, Djakarta, 1960.
- Hanifah, Prof. Dr. Abu M.D., *Renungan Perjuangan Bangsa Dulu*

- Dan Sekarang*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978.
- Hatta, Mohammad, *Berpartisipasi dalam perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1976.
- Koch, DMG, *Menudju Kemerdekaan*, terjemahan Abdoel Moeis, Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1951.
- Kohn, Hans, *Nasionalisme, Arti dan Sedjarahnja*. P.T. Pembangunan, Djakarta, 1961.
- Mansur, Ahmad, "Benarkah 20 Mei Sebagai Hari Kebangkitan Nasional", kertas kerja dalam Seminar Sedjarah Nasional II. Jogjakarta, 1970.
- Mohammad Said, H., *Koeli Kontrak Tempo Doeloe*, Percetakan Waspada, Medan, 1977.
- Nugroho Notosusanto, *Sedjarah dan Hankam*, Lembaga Sedjarah Hankam, 1960.
- Panitia Penerbitan Buku *Karya Ki Hadjar Dewantara, Kerja Ki Hadjar Dewantara*, Madjelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta, 1976.
- Pitono, R. dan kawan-kawan, *Sedjarah Indonesia Djilid III*, Penerbit Utama, Malang, 1970.
- Pringgodigdo, A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Roem, Mohammad, *Tiga Peristiwa Bersedjarah*, P.T. Sinar Andaya, Djakarta, 1971.
- Rutgers, Ir. S.I. *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, CV. Hajam Wuruk, Surabaya, 1951.
- Sartono Kartodirdjo, dan kawan-kawan, *Sarekat Islam Lokal, Arsip Nasional Republik Indonesia*, Penerbitan Sumber-sumber sejarah No. 7, Jakarta, 1975.
- Sartono Kartodirdjo dan kawan-kawan, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Susanto Tirtodiprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1970.

- Sitorus, L.M., *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Pustaka Rakyat NV., Djakarta, 1951.
- Smith, W.C., *Islam Dalam Sedjarah Modern II*, terjemahan Abusalamah, Bhratara, Djakarta, 1964.
- Soeroto, Drs. *Tanam Paksa*, Penerbit P.T. Sangabuwana, Jakarta, 1977.
- Solichin, *Hadji Agus Salim, Pahlawan Nasional*, Penerbit Djajamurni, Djakarta, 1965.
- Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, terjemahan Prof. Dr. Tadjimah dkk., Panitia Penerbit, Djakarta, 1966.
- Subardjo Djojohadisurjo, Prof. Ahmad., *Peranan Ide-Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Idayu Press, Jakarta, 1977.
- Soekarno, Ir., *Indonesia Menggugat*, Penerbit S.K. Seno, Djakarta, 1956.
- Surjadinata, Leo, "Tjiri-Tjiri Chas Pergerakan Nasional Indonesia Sebelum Perang", kertas kerja dalam Seminar Sedjarah Nasional Indonesia II di Jogjakarta, 1970.
- Tamar Djaja, *Orang-orang Besar Indonesia II*, Pustaka Antara, Djakarta, 1974.
- Wolhoff, Prof. Drs. G.J., *Pengantar Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Djakarta, 1960.
- Wirjosuparto, Sutjipto, *Dari Lima Pendjadjahan Menuju Zaman Kemerdekaan*, Indira, Jakarta, 1953.

## B. MAJALAH

- BUDAYA JAYA, Jakarta, No. 120, Tahun ke-II, Mei 1978.
- MEDAN PRIJAJI, Bogor, Bundel Tahun 1909.
- PENELITIAN SEDJARAH, Djakarta, September 1961.
- SAROTOMO, Soerakarta, Bundel tahun 1915.

## C. INFORMAN

- Ahmad Musani (70 tahun) Jl. Laweyan 175 Surakarta.



- Atmo Kartono (73 tahun), Jl. Tiga Negeri, Kramat Surakarta (Putera ke-2 H. Samanhudi).
- Martidjo (70 tahun), Jl. Kauman II Klaten (Bekas aktivis BPRI di Klaten, teman dekat putera ke3 H. Samanhudi).
- Ngadimin Reksowijono (90 tahun), Serangan Ng. 5/62 Yogyakarta (Seorang Perintis Kemerdekaan, pernah menjadi anggota Sarekat Islam, 1912 – 1914).
- Reso Ramli (80 tahun), Ketanggungan Ng. 7/40 Yogyakarta (seorang Perintis kemerdekaan, teman dan pengikut H.O.S. Tjokroaminoto yang dekat dan setia).
- Sadat Atmosukanto, Ny., Jl. Pemuda Selatan 111 Klaten (isteri putera ke-3 H. Samanhudi).
- Sahlan Sastromartono, Padepokan H. Samanhudi, Laweyan, Surakarta (putera ke-5 H. Samanhudi).
- Siti Utari (69 tahun), Ngagel Jaya 93 Surabaya (puteri pertama H.O.S. Tjokroaminoto).
- Suwito Wignyowikanto (70 tahun), Taman Kidul 44 Yogyakarta, (seorang Perintis Kemerdekaan, bekas aktivis Sarekat Islam di Semarang).

**Perpustakaan  
Jenderal**

920

M